



2023



**RENJA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	2
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan	7
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	41
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	124
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	132
	2.5. Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat	132
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN	
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	134
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan	138
	3.3. Program dan Kegiatan	145
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
	4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan ..	149
BAB V	PENUTUP	
	5.1. Penutup	150
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mengamanatkan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yaitu RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah, dalam hal ini penyusunan RENSTRA PERANGKAT DAERAH dan RENJA PERANGKAT DAERAH. Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis perangkat daerah periode 5 tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif; sedangkan Renja Perangkat Daerah adalah rencana kerja perangkat daerah periode 1 tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan serta tetap memperhatikan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Renja ini menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, perencanaan dan penganggaran berpedoman pula pada Permendagri 90 Tahun 2019 yang mengatur tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Renja ini pula akan menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 - 2023.

1.2. Landasan Hukum

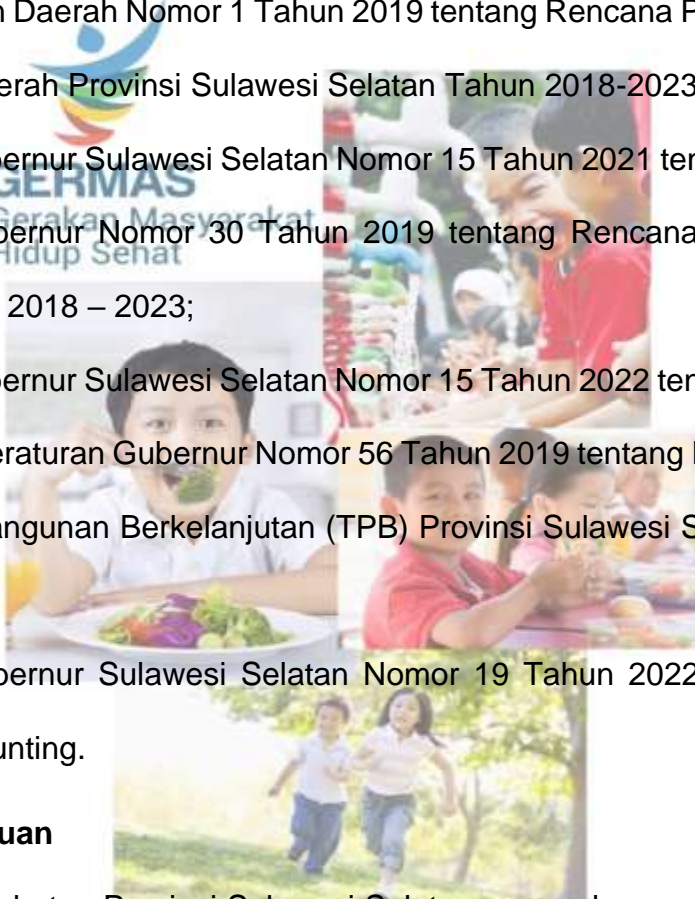
Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020 - 2024;



- q. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
- t. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023;
- u. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rancangan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023;
- v. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting.



1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penjabaran dari Renstra dan RKPD yang disusun untuk menjadi acuan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran dan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 - 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian

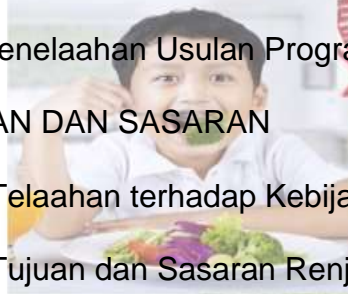


- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan



BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP



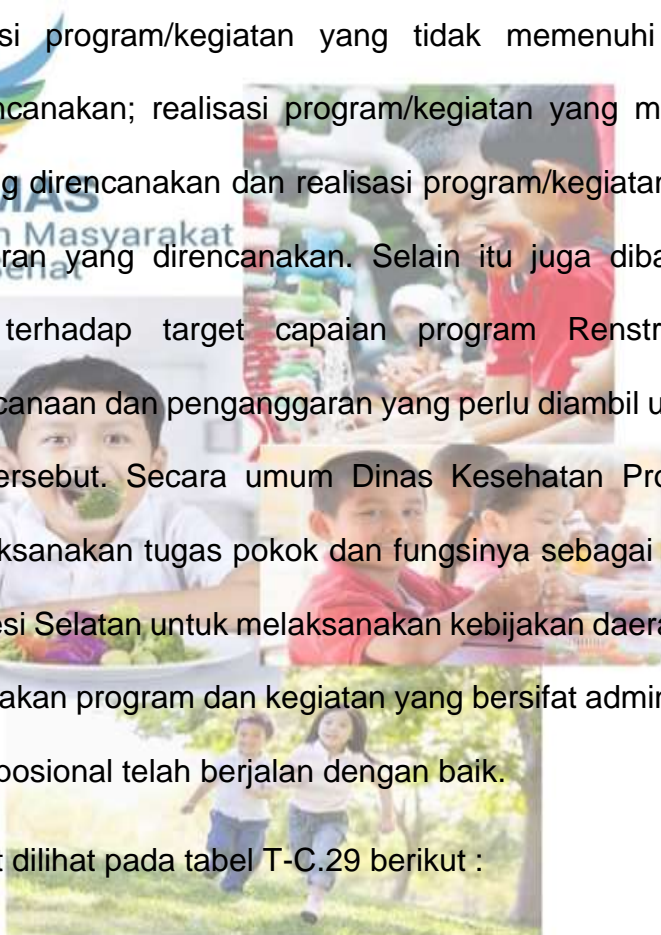
BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Secara umum Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik.

Hasil evaluasi renja dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut :



FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)				REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2020)				TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)				REALISASI KINERJA TRIMULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANG KAT DAERAH PENANG JAWAB	KET
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											K	Rp.	K		
1	3	4	5	6		7		8				9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%		17	18				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																																
	Dinas Kesehatan																																
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (SPM/Prioritas)																																
		Persentase RS Regional yang terbangun dan	%	100.0	230,748,380,762	0.0	2,356,663,580	33.0	68,130,314,342	32,871,234,048	0.0	1,103,614,506	0.0	2,624,905,520	0.0	5,163,677,955	0.0	27,838,671,042	0.0	27,838,671,042	0.0	84.69	0.0	30,195,334,622	0.0	13.09							
		Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	%	100.0		0.0		100.0			25.0		25.0		25.0		25.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0						
		% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	%	100.0		0.0		87.0			82.0		18.0		0.0		-30.0		70.0		80.46		70.0		70.0		70.0						
		Persentase ibu hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	%	13.0		0.0		12.0			0.0		0.0		12.10		0.0		12.10		100.83		12.10		93.08								
		Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	%	100.0		0.0		100.0			25.0		25.0		25.0		25.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0						
		Persentase anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	%	7.50		0.0		6.50			0.0		0.0		8.97		0.0		8.97		138.0		8.97		119.60								
	Penyediaan Fasilitas Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alikes UKP dan UKM Rujukan	%	100.0	77,070,997,342	0.0	0.0	100.0	36,665,997,342	7,795,373,912	25.0	0	25.0	993,772,139	25.0	1,604,766,247	25.0	6,870,569,025	100.0	6,870,569,025	100.0	88.14	100.0	6,870,569,025	100.0	8.91							
	Pembangunan Rumah Sakit Berserta Sarana dan Prasarana	Jumlah Rumah Sakit Regional yang dibangun dan ditingkalkan kualitasnya	Unit	6.0	60,000,000,000	0.0	0.0	1.0	30,000,000,000	4,964,204,305	0.0	0	0.0	129,204,304	0.0	129,204,304	0.0	4,165,475,963	0.0	4,165,475,963	0.0	83.91	0.0	4,165,475,963	0.0	6.94							
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penujangan Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan yang diadakan (UPK)	Jenis	10.0	9,360,000,000	10.0	589,165,895	10.0	4,060,000,000	589,165,895	0.0	0	0.0	506,165,895	0.0	506,165,895	0.0	589,165,895	0.0	589,165,895	0.0	100.0	10.0	1,178,331,790	100.0	12.59							
		Jumlah Alat Kesehatan di Rumah Sakit Regional yang	Paket	6.0		0.0		2.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								
		Jumlah Alat Kesehatan Brigade Siaga Bencana	Paket	2.0		0.0		1.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								
		Jumlah Alat Kesehatan Rest Area yang diadakan	Paket	10.0		0.0		1.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RPKD TAHUN LALU (2020)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RPKD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
				9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 * 100%	15 = 7+13	16 = 15/6 * 100%	17	18																
1	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Rumah Sakit Regional yang	Paket	6,0	1.965.997.342	0,0	0	2,0	885.997.342	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0		
		Jumlah pengadaan media KIE Kesehatan Haji yang	Paket	3,0		0,0		1,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0				
		Jumlah media KIE Imunisasi yang tersedia	Paket	1,0		0,0		1,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0				
		Jumlah Prasarana Rumah Sakit Regional yang	Paket	6,0		0,0		2,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0				
		Jumlah format Pencatatan hepatitis yang tersedia	Exemplar	300,0		0,0		100,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0				
		Jumlah format Pencatatan Program TB, TB MDR dan TB HIV yang tersedia	Paket	3,0		0,0		1,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0				
		Jumlah format pencatatan dan pelaporan Program	Paket	12,0		0,0		4,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0				
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	6,0	830.000.000	0,0	0	2,0	310.000.000	507.111.372	0,0	0	0,0	338.262.190	0,0	368.212.870	0,0	476.022.622	0,0	476.022.622	0,0	93,87	0,0	476.022.622	0,0	57,35			
		Jumlah Cold Room yang dipelihara	Unit	1,0		0,0		1,0			0,0		0,0		0,0		1,0		1,0		100,0		1,0		100,0				
		Jumlah Mobil Angkutan Vaksin yang dipelihara	Unit	1,0		0,0		1,0			0,0		0,0		0,0		1,0		1,0		100,0		1,0		100,0				
		Jumlah Kapal Penanggulangan	Unit	2,0		0,0		2,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0				
		Terpeliharanya Sarana Fasilitas Layanan	Unit	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		1,0		1,0		0,0		1,0		0,0				
	Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan	Jumlah Kab/Kota dengan distribusi Vaksin yang berkualitas	Kab/Kota	24,0	385.000.000	0,0	0	10,0	100.000.000	444.841.400	0,0	0	0,0	0	0,0	315.750.000	24,0	444.841.400	24,0	444.841.400	240,0	100,0	24,0	444.841.400	100,0	115,54			
		Terdistribusinya Obat dan Vaksin	Paket	0,0		0,0		1,0			0,0		0,0		0,0		1,0		1,0		100,0		1,0		0,0				
	Pengadaan Obat Vaksin Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Item Obat yang disiapkan sebagai Buffer	Item Obat	25,0	2.700.000.000	0,0	0	25,0	850.000.000	1.290.050.940	0,0	0	0,0	20.139.750	0,0	285.433.178	0,0	1.195.063.145	0,0	1.195.063.145	0,0	92,64	0,0	1.195.063.145	0,0	44,26			
		Jumlah Obat-Obatan, Bahan Kimia, Bahan Laboratorium, Bahan Logistik Kesehatan	Jenis	150,0		0,0		150,0			0,0		0,0		0,0		150,0		150,0		100,0		150,0		100,0				
		Tersedianya Obat dan Vaksin	Paket	0,0		0,0		1,0			0,0		0,0		0,0		1,0		1,0		100,0		1,0		0,0				

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN N/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2020)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)				REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	KET	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K			Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	3	4	5	6		7		8				9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%		17	18	
	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						30.83	9.60			20.83	0.0		
	Predikat Kinerja																													
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Layanan Kesehatan UKP dan UKM Rujukan	%	100.0	149,800,383,420	0.0	0	100.0	30,300,317,000	24,945,461,336	25.0	1,103,614,506	25.0	1,618,633,381	25.0	3,478,911,708	25.0	20,861,710,017	100.0	20,861,710,017	100.0	83.63	100.0	20,861,710,017	100.0	13.93				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Ambulans Laut siap siaga	Unit	8.0	38,939,633,483	0.0	0	6.0	10,200,000,000	3,307,252,700	0.0	0	0.0	0	0.0	0	6.0	1,420,509,400	6.0	1,420,509,400	100.0	42.95	6.0	1,420,509,400	75.0	3.65				
		Jumlah peserta Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan	Orang	90.0		0.0		30.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan	Kab./kota	24.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		24.0		24.0		100.0		24.0		100.0		100.0			
		Jumlah Kab/Kota sasaran Bimtek dan Supervisi Supportif Program Penanggulangan	Kab./kota	24.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		24.0		24.0		100.0		24.0		100.0		100.0			
		Jumlah Pengelola Program Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelolaan Program Bencana/Krisis Kesehatan Kab/Kota	Kab./kota	24.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		24.0		24.0		100.0		24.0		100.0		100.0			
		Jumlah paket penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan Krisis Kesehatan	Paket	6.0		0.0		2.0			0.0		0.0		0.0		2.0		2.0		100.0		2.0		33.33					
		Jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang dipelihara (Bencana dan KLB)	Unit	57.0		0.0		36.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
		Terlaksananya Pelatihan BTCLS (Basic Trauma and Cardiac Life Support)	Angkatan	12.0		0.0		4.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
		Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Medis dan Paramedis	Angkatan	13.0		0.0		4.0			0.0		0.0		0.0		3.0		3.0		75.0		3.0		23.08					

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2020)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%		17	18		
		Tertaksananya Sosialisasi Krisis Kesehatan	Kali	6.0		0.0		2.0				0.0		0.0			2.0		2.0		100.0		2.0		33.33					
		Jumlah hari pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemantauan kejadian krisis kesehatan	Hari	1,095.0		0.0		365.0				0.0		0.0			365.0		365.0		100.0		365.0		33.33					
		Jumlah Kabupaten/Kota yang diberi penguatan dan fasilitas Public Safety Centre (PSC)	Kab./kota	24.0		0.0		24.0				0.0		0.0			24.0		24.0		100.0		24.0		100.0					
		Jumlah Ambulans Laut yang diadakan	Unit	3.0		0.0		1.0				0.0		0.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah Ambulans Laut yang dipelihara	Unit	8.0		0.0		6.0				0.0		0.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah Ambulans Darat yang diadakan	Unit	9.0		0.0		3.0				0.0		0.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah Kendaraan Operasional Roda Empat (R-4) yang diadakan	Unit	2.0		0.0		1.0				0.0		0.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah Perahu Karet yang diadakan (Bencana/Krisis Kesehatan)	Unit	12.0		0.0		2.0				0.0		0.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah pemakaian bahan bakar untuk pemanasan dan operasional (Bencana/Krisis Kesehatan)	Liter	27,500.0		0.0		5,000.0				0.0		0.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah kejadian Krisis Kesehatan yang ditangani	Kejadian	120.0		0.0		40.0				0.0		0.0			40.0		40.0		100.0		40.0		33.33					
		Jumlah Aplikasi Sistem Panggilan Darurat Terpadu (SPDT) yang tersedia	Paket	3.0		0.0		1.0				0.0		0.0			1.0		1.0		100.0		1.0		33.33					
		Jumlah Mobil Ambulans BSB yang diadakan	Unit	15.0		0.0		5.0				0.0		0.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah petugas yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam rangka manajemen data NAR Antigen	Orang	0.0		0.0		70.0				0.0		0.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi pengendalian Covid-19 tingkat Provinsi	Orang	0.0		0.0		126.0				0.0		0.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan FGD terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19	Orang	0.0		0.0		225.0				0.0		0.0			198.0		198.0		88.0		198.0		0.0					

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2020)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET						
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%		17	18		
		Jumlah peserta pertemuan koordinasi Lintas Sektor Pencegahan dan Pengendalian Covid-19	Orang	0.0		0.0		124.0			0.0		0.0		0.0		124.0		124.0		100.0		100%	124.0		0.0				
		Jumlah Pelaksanaan On The Job Training (OJT) pelacakan Covid-19	Kali	0.0		0.0		16.0			0.0		0.0		0.0		1.0		1.0		6.25		62.5%	1.0		0.0				
		Jumlah Kab/Kota yang mengeluarkan kebijakan yang mendukung Prilaku Sehat dalam Pencegahan dan Penularan Covid-19	Kab/Kota	0.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		24.0		24.0		100.0		100%	24.0		0.0				
		Jumlah Kab/Kota yang dibina terkait penguatan peran PPKM dalam pengendalian Covid-19	Kab/Kota	0.0		0.0		25.0			0.0		0.0		0.0		24.0		24.0		96.0		96%	24.0		0.0				
		Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan peningkatan kapasitas penanggungjawab surveilans Penyakit Menular (PM) dan Penyakit Tidak Menular (PTM) secara terintegrasi dalam rangka pengendalian Covid-19	Kab/Kota	0.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		24.0		24.0		100.0		100%	24.0		0.0				
		Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan kunjungan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian covid-19	Kab/Kota	0.0		0.0		17.0			0.0		0.0		0.0		12.0		12.0		70.59		70.59%	12.0		0.0				
		Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi dalam rangka pendampingan bersama TNI/POLRI	Kab/Kota	0.0		0.0		10.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0%	0.0		0.0				
		Terlaksananya KIE Covid-19 melalui media elektronik, media cetak dan media sosial	Kab/Kota	0.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		24.0		24.0		100.0		100%	24.0		0.0				
		Jumlah petugas yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam rangka tracing Covid-19	Orang	0.0		0.0		70.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0%	0.0		0.0				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa KLB		Jumlah KLB Penyakit Menular yang tertangani	Kejadian	45.0	76,636,798,937	0.0	0	15.0	9,886,000,000	179,934,600	0.0	0	0.0	0	0.0	0	15.0	18,139,600	15.0	18,139,600	100.0	10.08	15.0	18,139,600	33.33	0.02				
		Tertanganinya Pandemi Kesehatan (Covid-19 dan Pandemi Kesehatan lainnya)	%	100.0		0.0		100.0			0.0		0.0		0.0		100.0		100.0		100.0		100%	100.0		100.0				
		Jumlah KLB yang di lakukan Penanggulangan		0.0		0.0		160.0			0.0		0.0		0.0		2.0		2.0		1.25		12.5%	2.0		0.0				

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2020)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%		17	18		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Kab/Kota sasaran pemantauan Antenatal Care Terpadu	Kab./kota	24.0	2,197,000,000	0.0	0	10.0	597,000,000	510,000,000	0.0	0	0.0	0	0.0	0	22.0	387,705,735	22.0	387,705,735	220.0	76.02	22.0	387,705,735	91.67	17.65				
		Jumlah Kab/Kota sasaran Audit Maternal dan Perinatal	Kab./kota	24.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		23.0		23.0		95.83		23.0		95.83					
		Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Hasil Pengkajian Kasus Kematian Maternal dan Perinatal oleh Tim AMP Provinsi	Orang	105.0		0.0		35.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah Kab/Kota sasaran kegiatan Penjangkaran Kesehatan Anak Sekolah	Kab./kota	24.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah Peserta Pertemuan Pelayanan Neonatal Esensial	Orang	90.0		0.0		30.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Regulasi Penurunan AKI dan AKB	Orang	30.0		0.0		30.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Rutin Tim AMP Provinsi	Orang	105.0		0.0		35.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah Peserta Pertemuan Balita Terintegrasi	Orang	70.0		0.0		0.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah peserta Surveilans kesehatan ibu Anak, Audit Maternal Perinatal surveilans response/autopsi verbal kematian ibu dan bayi bagi kab/kota dan RS di tingkat Provinsi	Orang	0.0		0.0		122.0			0.0		0.0		0.0		122.0		122.0		100.0		122.0		0.0					
		Jumlah peserta pertemuan pengumpulan dan pelaporan DATA KIA terintegrasi di Tingkat Provinsi	Orang	0.0		0.0		90.0			0.0		0.0		0.0		90.0		90.0		100.0		90.0		0.0					
		Jumlah Peserta orientasi Kohor ibu bayi dan balita di Kab/Kota (DAK)	Orang	0.0		0.0		275.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah kab/kota yang dilakukan bimbingan teknis/monitoring supervisi program kesehatan ibu dan anak	Kab/Kota	0.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2020)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%		17	18
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Intervensi Micronutrient pada Anak Umur 6-24 Bulan	Orang	74,878.0	9,400,000,000	0.0	0	4,878.0	2,200,000,000	14,103,103,526	0.0	1,103,614,506	0.0	1,103,614,506	0.0	2,555,797,306	8,738.0	13,740,016,966	8,738.0	13,740,016,966	179.13	97.43	8,738.0	13,740,016,966	11.67	146.17		
		Jumlah Intervensi Gizi pada Ibu Hamil	Orang	59,262.0		0.0		5,642.0			0.0		0.0		0.0		32,748.0		32,748.0		580.43		32,748.0		55.26			
		Jumlah pendampingan dalam pemanfaatan paket intervensi Gizi pada Anak	Kab./kota	24.0		0.0		2.0			0.0		0.0		2.0		2.0		4.0		200.0		4.0		16.67			
		Jumlah pendampingan dalam pemanfaatan paket intervensi Gizi pada Ibu Hamil yang terlaksana	Kab./kota	24.0		0.0		2.0			0.0		0.0		2.0		2.0		4.0		200.0		4.0		16.67			
		Jumlah peserta pelatihan pendamping Gizi di Kabupaten Lulus	Orang	0.0		0.0		100.0			0.0		0.0		0.0		85.0		85.0		85.0		85.0		0.0			
		Jumlah laporan Bimbingan teknis Pembinaan gizi dalam rangka Penanganan Stunting	Kab/Kota	0.0		0.0		10.0			0.0		0.0		0.0		10.0		10.0		100.0		10.0		0.0			
		Pengadaan Suplemen makanan bagi ibu hamil Vit K	Orang	0.0		0.0		1,030.0			0.0		0.0		0.0		1,030.0		1,030.0		100.0		1,030.0		0.0			
		Pengadaan Suplemen makanan bagi ibu hamil susu	Orang	0.0		0.0		4,744.0			0.0		0.0		0.0		4,744.0		4,744.0		100.0		4,744.0		0.0			
		Pengadaan multi vitamin bagi balita	Orang	0.0		0.0		1,700.0			0.0		0.0		0.0		1,700.0		1,700.0		100.0		1,700.0		0.0			
		Jumlah tenaga pendampingan gizi dalam rangka pendampingan pemanfaatan	Orang	0.0		0.0		85.0			0.0		0.0		0.0		85.0		85.0		100.0		85.0		0.0			
		Jumlah peserta yang mengikuti pengumpulan dan pelaporan Data gizi	Lokus	0.0		0.0		6.0			0.0		0.0		0.0		6.0		6.0		100.0		6.0		0.0			
		Jumlah Peserta pertemuan Konvergensi dalam rangka penilaian kinerja pemda dalam penanganan stunting		0.0		0.0		150.0			0.0		0.0		0.0		150.0		150.0		100.0		150.0		0.0			

NO	URUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2020)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	KET			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
				1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 * 100%	15 = 7+13	16 = 15/6*100%	17	18											
		Jumlah Peserta pertemuan evaluasi tenaga pendamping gizi tingkat Provinsi		0.0		0.0		85.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								
		Jumlah Peserta pertemuan evaluasi tenaga pendamping tingkat Kabupaten		0.0		0.0		60.0			0.0		0.0		70.0		70.0		116.67		70.0		0.0								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pegawai Dirkes yang diukur kebugarannya	Orang	150.0	610,000,000	0.0	0	50.0	180,000,000	360,000,000	0.0	0	0.0	0	0.0	0	96.0	148,427,600	96.0	148,427,600	192.0	41.23	96.0	148,427,600	64.0	24.33					
		Jumlah kab/kota yang dilakukan pengamatan penyakit akibat kerja di	Kab./kota	6.0		0.0		2.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						
		Jumlah dan Jenis Rambu-Rambu K3	Jenis	15.0		0.0		5.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang di pantau	Faskes	60.0		0.0		20.0			4.0		0.0		0.0		20.0		24.0		120.0		24.0		40.0						
		Jumlah Sarana Kesehatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dibina	Sarkes	11.0		0.0		3.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						
		Jumlah Perusahaan yang dipantau oleh tim Gerakan Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)	Perusahaan Binaan	90.0		0.0		30.0			0.0		0.0		22.0		22.0		73.33		22.0		24.44								
		Jumlah peserta pertemuan rutin tim Gerakan Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)	Orang	90.0		0.0		30.0			20.0		0.0		0.0		16.0		36.0		120.0		36.0		40.0						
		Jumlah Kabupaten yang dibina Sektor Informalnya	Kab./kota	24.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						
		Jumlah pengamatan dampak keterpaparan peptisida terhadap pekerja informal	Orang	180.0		0.0		60.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						
		Jumlah Aparat Sipil Negara (ASN) yang mengikuti senam setiap pelaksanaan	Orang	300.0		0.0		100.0			0.0		0.0		70.0		70.0		70.0		70.0		70.0		23.33						
		Meningkatnya pengetahuan pekerja perempuan terhadap penurunan angka stunting (DAK)	Orang	0.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						
		Meningkatnya pengetahuan pekerja perempuan terhadap penurunan angka Stunting (DAK)	Orang	0.0		0.0		20.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						
		Terlaksananya orientasi pengukuran kebugaran dalam rangka pembudayaan aktivitas fisik (DAK)	Orang	0.0		0.0		63.0			0.0		0.0		59.0		59.0		93.65		59.0		59.0		0.0						
		Terlaksananya pembinaan pos upaya kesehatan kerja sistem upaya peningkatan deteksi dini penyakit pada pekerja di kab / kota (DAK)	Kab/Kota	0.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2020)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	KET	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%		17	18	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa STBM yang dibimtek	Desa	72.0	870,000,000	0.0	0	24.0	400,000,000	655,295,800	0.0	0	0.0	0	0.0	0	19.0	351,884,800	19.0	351,884,800	79.17	53.70	19.0	351,884,800	26.39	40.45			
		Jumlah Desa STBM yang diverifikasi	Desa	10.0		0.0		10.0			0.0		0.0		0.0		9.0		9.0		90.0		9.0		90.0				
		Jumlah Kawasan Sehat melalui pendekatan dan pemberdayaan masyarakat	Kab./kota	24.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		24.0		24.0		100.0		24.0		100.0				
		Jumlah klasifikasi penghargaan Swasti Saba	Kab./Kota a Swasti Saba	24.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		14.0		14.0		58.33		14.0		58.33				
		Jumlah Kab./Kota yang Melaksanakan Tata Kawasan Sehat	Kab./Kota a Swasti Saba	24.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		24.0		24.0		100.0		24.0		100.0				
		Jumlah laporan monitoring dan pendampingan STBM di kab / kota	Kab/Kota	0.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		13.0		13.0		54.17		13.0		0.0				
		Jumlah laporan pemantauan kualitas air minum (PKAM) di kab / kota	Kab/Kota	0.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		13.0		13.0		54.17		13.0		0.0				
		Jumlah pelaporan pembinaan dan verifikasi	Kab/Kota	0.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		24.0		24.0		100.0		24.0		0.0				
		Jumlah peserta orientasi hygienis sanitasi pangan (HSP)	Orang	0.0		0.0		45.0			0.0		0.0		0.0		43.0		43.0		95.56		43.0		0.0				
		Orientasi pemetaan pelaporan kesling terpadu	Orang	0.0		0.0		45.0			0.0		0.0		0.0		44.0		44.0		97.78		44.0		0.0				
		Orientasi sanitasi di fasilitas kesehatan di kab/kota	Orang	0.0		0.0		45.0			0.0		0.0		0.0		45.0		45.0		100.0		45.0		0.0				
		Orientasi sanitasi di fasilitas kesehatan di kab/kota	Kab/Kota	0.0		0.0		45.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2020)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	KET		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%		17	18		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Pengelola Program Yang Terlatih Implementasi Kawasan tanpa Rokok (KTR) dan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Orang	80.0	3,687,022,000	0.0	0	80.0	1,571,674,000	1,157,996,780	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	713,506,970	0.0	713,506,970	0.0	61.62	0.0	713,506,970	0.0	19.35				
		Jumlah kab/kota yang mengembangkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	Kab./kota	24.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		8.0		8.0		33.33		8.0		33.33					
		Jumlah Peserta Pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara (Pengembangan Daerah)	Orang	180.0		0.0		60.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah Kab/Kota sasaran monitoring dan evaluasi Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Kab./kota	24.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		23.0		23.0		95.83		23.0		95.83					
		Jumlah petugas/pengelola program TB yang yang mendapat bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan program P2 TB	Orang	30.0		0.0		15.0			0.0		0.0		0.0		4.0		4.0		26.67		4.0		13.33					
		Jumlah Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi Program Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)	Kab./kota	24.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		4.0		4.0		16.67		4.0		16.67					
		Jumlah Petugas/Pengelola Program Kesehatan Indra yang mendapat bimbingan teknis Program Kesehatan Indra	Orang	24.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dalam rangka pelaksanaan Program Vektor	Kab./kota	20.0		0.0		6.0			0.0		0.0		0.0		5.0		5.0		83.33		5.0		25.0					
		Jumlah Kab/Kota sasaran pembinaan dalam rangka pelaksanaan Program P2	Kab./kota	24.0		0.0		12.0			0.0		0.0		0.0		4.0		4.0		33.33		4.0		16.67					
		Jumlah Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi dalam rangka pelaksanaan	Kab./kota	24.0		0.0		10.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah Peserta Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program Imunisasi	Orang	48.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		24.0		24.0		100.0		24.0		50.0					
		Jumlah pelaksanaan Survey Prevalensi Kecacingan pada Anak Pra Sekolah dan Anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah pada Kab/Kota	Kab./kota	4.0		0.0		2.0			0.0		0.0		0.0		2.0		2.0		100.0		2.0		50.0					

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2020)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	KET	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%		17	18	
		Jumlah Kab/kota yang dipantau dan dievaluasi dalam rangka pelaksanaan	Kab./kota	24.0		0.0		6.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
		Jumlah Peserta Workshop Advokasi Imunisasi	Orang	25.0		0.0		25.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
		Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan pembinaan program imunisasi	Kab./kota	12.0		0.0		12.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
		Jumlah Kab/kota yang dipantau dan dievaluasi dalam rangka pelaksanaan	Kab./kota	24.0		0.0		7.0			0.0		0.0		0.0		4.0		4.0		57.14		4.0		16.67				
		Jumlah Petugas Kesehatan yang mendapat bimtek dalam rangka pelaksanaan	Kab./kota	24.0		0.0		8.0			0.0		0.0		0.0		7.0		7.0		87.50		7.0		29.17				
		Jumlah Peserta Pertemuan Berbasis Penyakit Tular Vektor dan Zoonotic	Orang	185.0		0.0		185.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
		Jumlah Peserta Pertemuan Berbasis Penyakit Menular Langsung	Orang	185.0		0.0		185.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
		Jumlah kegiatan kampanye TB pada kelompok masyarakat berisiko yang	Paket	3.0		0.0		1.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
		Jumlah Kabupaten/Kota yang Mengembangkan Deteksi Dini Melalui Pelayanan Terpadu (PANDU)	Kab./kota	24.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
		Jumlah Peserta Workshop Hipertensi	Orang	100.0		0.0		50.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
		Jumlah Kab./Kota yang Melaksanakan Impelementasi Kawasan	Kab./kota	24.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		14.0		14.0		58.33		14.0		58.33				
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Kab./kota	24.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN N/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2020)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%		17	18		
		Jumlah peserta workshop dalam rangka penyusunan rencana tindak lanjut masing masing peran organisasi profesi dalam penanggulangan TB	Orang	50.0		0.0		50.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
		Jumlah Ranperda TB yang disusun	Paket	1.0		0.0		1.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
		Jumlah OPD Yang Melaksanakan Posbindu	OPD Provinsi	25.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
		Jumlah petugas/pengelola program tifoid kab/kota yang mendapat bimbingan teknis pelaksanaan program Tifoid	Kab./kota	24.0		0.0		9.0				0.0		0.0		0.0		4.0		4.0		44.44		4.0		16.67				
		Jumlah Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi dalam rangka pelaksanaan program Zoonosis	Kab./kota	24.0		0.0		14.0				0.0		0.0		0.0		5.0		5.0		35.71		5.0		20.83				
		Jumlah Kab/Kota dilaksanakan EVM (Effective Vaccine Management)	Kab./kota	8.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
		Jumlah sample yang dilakukan pemeriksaan sample paket spesimen TB	sampel	0.0		0.0		20.0				0.0		0.0		0.0		55.0		55.0		275.0		55.0		0.0				
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantauan dan pembinaan pengembangan KTR Di Sekolah dan di instansi (DAK)	Kab/Kota	0.0		0.0		16.0				0.0		0.0		0.0		8.0		8.0		50.0		8.0		0.0				
		Jumlah jenis Spesimen pemeriksaan laboratorium Program Hepatitis(DAK)	Jenis	0.0		0.0		5.0				0.0		0.0		0.0		5.0		5.0		100.0		5.0		0.0				
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program filiarisis dan kecacingan kabupaten / kota yang dilakukan pembinaan program filiarisis dan kecacingan (DAK)	Kab/Kota	0.0		0.0		5.0				0.0		0.0		0.0		4.0		4.0		80.0		4.0		0.0				
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantauan pelaksanaan program ISPA (DAK)	Kab/Kota	0.0		0.0		4.0				0.0		0.0		0.0		4.0		4.0		100.0		4.0		0.0				
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantauan terpadu program pencegahan dan pengendalian penyakit (DAK)	Kab/Kota	0.0		0.0		24.0				0.0		0.0		0.0		4.0		4.0		16.67		4.0		0.0				

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2020)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)				REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	KET							
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENUJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13			16 = 15/8*100%						
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K			Rp.	K	Rp.				
1	3	4	5	6		7		8				9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/8*100%		17	18			
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantauan terpadu program pencegahan dan pengendalian penyakit Menular (P2PM) (DAK)	Kab/Kota	0.0		0.0		4.0				0.0		0.0		0.0		4.0		4.0		100.0		4.0		0.0						
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan wilayah (Binwil) terpadu P2P (DAK)	Kab/Kota	0.0		0.0		4.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						
		Jumlah Kabupaten Kota Yang dilakukan pembinaan pelaksanaan Program TB, TB MDR dan TB HIV (DAK)	Kab/Kota	0.0		0.0		4.0				0.0		0.0		0.0		4.0		4.0		100.0		4.0		0.0						
		Jumlah Kabupaten Kota yang dilakukan supervisi dan bimtek program penyakit tidak menular (PTM) (DAK)	Kab/Kota	0.0		0.0		23.0				0.0		0.0		0.0		23.0		23.0		100.0		23.0		0.0						
		Jumlah Kabupaten Kota Yang Mendapatkan bimbingan teknis peningkatan kewaspadaan dini penyakit DBD (DAK)	Kab/Kota	0.0		0.0		7.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						
		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Bimbingan Teknis Program Hepatitis (DAK)	Kab/Kota	0.0		0.0		5.0				0.0		0.0		0.0		7.0		7.0		140.0		7.0		0.0						
		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Bimbingan Teknis Program ISPA (DAK)	Kab/Kota	0.0		0.0		4.0				0.0		0.0		0.0		4.0		4.0		100.0		4.0		0.0						
		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Bimbingan Teknis Program P2 Kusta & Frambusia (DAK)	Kab/Kota	0.0		0.0		4.0				0.0		0.0		0.0		4.0		4.0		100.0		4.0		0.0						
		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Bimbingan Teknis Program Vektor (DAK)	Kab/Kota	0.0		0.0		5.0				0.0		0.0		0.0		5.0		5.0		100.0		5.0		0.0						
		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Bimbingan Teknis Program Zoonosis (DAK)	Kab/Kota	0.0		0.0		5.0				0.0		0.0		0.0		5.0		5.0		100.0		5.0		0.0						
		Jumlah ODHA yang dilakukan pemeriksaan Viral Load (DAK)	orang	0.0		0.0		80.0				0.0		0.0		0.0		80.0		80.0		100.0		80.0		0.0						
		Jumlah peserta Advokasi dan koordinasi lintas sektor (LS) / Lintas program (LP) dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit malaria tingkat provinsi (DAK)	Orang	0.0		0.0		70.0				0.0		0.0		0.0		50.0		50.0		71.43		50.0		0.0						

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2020)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6 * 100%			
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6 * 100%		17	18
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Peserta Pelatihan Petugas (SKDR)	Orang	144.0	1,104,300,000	0.0	0	48.0	368,100,000	265,291,350	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	161,654,300	0.0	161,654,300	0.0	60.93	0.0	161,654,300	0.0	14.64		
		Jumlah Peserta Pertemuan/Reviu Petugas District Surveilans Officer	Orang	180.0		0.0		60.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
		Jumlah Kab/Kota sasaran bimbingan teknis Program Sistem Terpadu Penyakit	Kab./kota	24.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		7.0		7.0		29.17		7.0		29.17			
		Jumlah peserta pengembangan PEST (Provincial Epidemiologi Surveillance Team)	Orang	210.0		0.0		70.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
		Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan didampingi perencanaan RAD Program Imunisasi (DAK)	Kab/Kota	0.0		0.0		11.0			0.0		0.0		0.0		2.0		2.0		18.18		2.0		0.0			
		Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan supervisi pelaksanaan surveilans penyakit infeksi Emerging (DAK)	Kab/Kota	0.0		0.0		2.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
		Jumlah kabupaten /kota yang dilakukan pemantauan pengamanan vaksin dan inventory Cold Chain (DAK)	Kab/Kota	0.0		0.0		14.0			0.0		0.0		0.0		14.0		14.0		100.0		14.0		0.0			
		Jumlah kabupaten /kota yang dilakukan penilaian kualitas Data (DOS) Program imunisasi (DAK)	Kab/Kota	0.0		0.0		14.0			0.0		0.0		0.0		14.0		14.0		100.0		14.0		0.0			
		Jumlah kabupaten /kota yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan Surveilans penyakit terpadu dan PIEI (DAK)	Kab/Kota	0.0		0.0		7.0			0.0		0.0		0.0		6.0		6.0		85.71		6.0		0.0			
		Jumlah kasus yang dilakukan pemantauan / pelacakan penyakit menular pada pelaku perjalanan (DAK)		0.0		0.0		0.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
		Jumlah kejadian alert / rumor penyakit menular potensial KLB yang dilakukan	kejadian	0.0		0.0		0.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
		Jumlah peserta pertemuan evaluasi dan perencanaan serta RAD Program Imunisasi TK Kab / Kota (DAK)		0.0		0.0		0.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
		Jumlah peserta pertemuan koordinasi KOMDA KIPI dan pembahasan kasus KIPI (DAK)	orang	0.0		0.0		40.0			0.0		0.0		0.0		40.0		40.0		100.0		40.0		0.0			
		Jumlah petugas imunisasi kab/kota yang mengikuti penyegaran program imunisasi (DAK)		0.0		0.0		0.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
		Jumlah petugas surveilans kab / kota yang mengikuti pertemuan revisi kinerja DSO (DAK)		0.0		0.0		0.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKP TAHUN LALU (2020)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKP TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKP)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	KET				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
				6		7		8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%				17	18		
		Jumlah peserta pertemuan evaluasi kinerja bagi institusi penerima wajib lapor (IPWL) (DAK)	Orang	0.0		0.0		56.0			0.0		0.0		0.0		42.0		42.0		75.0		42.0		0.0							
		Jumlah peserta pertemuan koordinasi kegiatan upaya berheni merokok (UBM) (DAK)	Orang	0.0		0.0		36.0			0.0		0.0		0.0		36.0		36.0		100.0		36.0		0.0							
		Jumlah peserta pertemuan monitoring dan evaluasi program GIF TK. Provinsi Sulawesi Selatan (DAK)	Orang	0.0		0.0		54.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0							
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa ODMK	Jumlah Peserta Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Jiwa Provinsi	Orang	40.0	224,000,000	0.0	0	40.0	118,000,000	90,834,500	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	34,962,500	0.0	34,962,500	0.0	38.49	0.0	34,962,500	0.0	15.61							
	Jumlah Pengelola Kesehatan Jiwa yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Kesehatan Jiwa di Kab/Kota	Orang	144.0		0.0		48.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0								
	Jumlah Kabupaten Kota yang di lakukan pemanfaatan dan bimbingan teknis Program Kesehatan Jiwa (DAK)	Kab/Kota	0.0		0.0		10.0			0.0		0.0		0.0		9.0		9.0		9.0		90.0		9.0		0.0						
	Jumlah Kabupaten Kota yang di lakukan pembinaan dan bimbingan teknis	Kab/Kota	0.0		0.0		9.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						
	Jumlah peserta pertemuan koordinasi masalah kesehatan jiwa Lintas Program dan Lintas Sektor Tk. Provinsi (DAK)	orang	0.0		0.0		90.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						
	Jumlah peserta pertemuan koordinasi petugas program kesehatan jiwa dan guru BK pada kesehatan jiwa anak	orang	0.0		0.0		52.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						
	Jumlah peserta pertemuan monitoring dan evaluasi pelaporan manajemen informasi aplikasi SIMKESWA pada pengelola	orang	0.0		0.0		55.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0						

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN N/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2020)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANG KAT DAERAH PENANG GAWAB	KET
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%		17	18
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi terpadu tentang pengelolaan Program Kesehatan Tradisional, Gigi Mulut, Laboratorium dan Pelayanan Darah	Kab./kota	24.0	11,825,000,000	0.0	0	24.0	3,479,000,000	4,315,752,080	0.0	0	0.0	515,018,875	0.0	923,114,402	0.0	3,884,902,146	0.0	3,884,902,146	0.0	90.02	0.0	3,884,902,146	0.0	32.85		
		Terlaksananya Pelayanan kesehatan di UPK	Bulan	36.0		0.0		12.0			0.0		0.0		9.0		3.0		12.0		100.0		12.0		33.33			
		Jumlah peserta Pertemuan Koordinasi dalam mendukung Quickwins Program Pelayanan Darah	Orang	48.0		0.0		48.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
		Jumlah Peserta Peningkatan dan Penguatan Tenaga Pendamping Akreditasi FKTP (Fasilitas Kesehatan	Orang	144.0		0.0		48.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
		Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Kab./kota	24.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
		Jumlah Puskesmas Berprestasi (Kinerja Terbaik) Tingkat Provinsi Sulsel yang	Puskesmas	36.0		0.0		12.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
		Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Petugas Kegawatdaruratan BSB	Orang	150.0		0.0		50.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
		Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Klinik BSB	Orang	150.0		0.0		50.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
		Jumlah Mobiler BSB	Paket	3.0		0.0		1.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
		Jumlah Peserta Pertemuan Peningkatan Tenaga Klinik Rest Area	Orang	90.0		0.0		30.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
		Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi Rest Areanya	Kab./kota	12.0		0.0		4.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
		Jumlah Mobil Ambulans Rest Area yang diadakan	Unit	12.0		0.0		4.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
		Jumlah Mobiler Rest Area	Unit	12.0		0.0		4.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		47.53	3.25					11.01	0.0		
	Predikat Kinerja																											

NO	URUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE GIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2016 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2020)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNAW JAWAB	KET
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				1	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%			
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Kesehatan	%	100.0	829,000,000	0.0	0	100.0	264,000,000	130,396,800	25.0	0	25.0	12,500,000	25.0	80,000,000	20.0	106,392,000	95.0	106,392,000	95.0	81.59	95.0	106,392,000	95.0	12.83		
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	Laporan	252.0	169,000,000	0.0	0	84.0	54,000,000	70,396,800	30.0	0	22.0	12,500,000	17.0	20,000,000	20.0	46,392,000	89.0	46,392,000	105.95	65.90	89.0	46,392,000	35.32	27.45		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan	Sistem Informasi	10.0	660,000,000	0.0	0	10.0	210,000,000	60,000,000	0.0	0	0.0	0	0.0	60,000,000	4.0	60,000,000	4.0	60,000,000	40.0	100.0	4.0	60,000,000	40.0	9.09		
		Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	berita/inf ormasi	600.0		0.0		200.0		45.0		32.0		43.0		47.0		167.0		83.50		167.0		27.83				
		Jumlah data dan informasi yang di kumpulkan dan dipublikasikan	dokumen	0.0		0.0		1.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
		Tersedianya website dengan teknologi baru	%	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			45.89	41.48				20.63	0.0		
	Predikat Kinerja																											
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Izin RS Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan	%	100.0	3,048,000,000	0.0	0	100.0	900,000,000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	100.0	0	100.0	0	100.0	100.0	0	100.0	0	100.0		
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah petugas yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan Ambulans RS	Orang	98.0	990,000,000	0.0	0	0.0	250,000,000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		Jumlah Petugas dalam pengelolaan CSSD di RS yang meningkat	Orang	49.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
		Jumlah Kab/Kota yang dipantau tentang implementasi Klinik di Rest Area	Kab./kota	12.0		0.0		12.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
		Jumlah Tim PPRa yang meningkat pemahamannya tentang pengendalian Resistensi Antimikroba di RS	Orang	98.0		0.0		49.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				
	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			0.0	0.0				0.0	0.0		
	Predikat Kinerja																											

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN N/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RP/JMD s/d RKPD TAHUN LALU (2020)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RP/JMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RP/JMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%		17	18	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (Prioritas)	Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk	%	23.0	11,423,000,000	0.0	0	23.0	3,612,000,000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	24.0	0	24.0	0	104.35		24.0	0	104.35				
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Cakupan Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Unit Pelayanan Kesehatan	%	100.0	3,446,000,000	0.0	0	100.0	1,097,000,000	0	20.0	0	10.0	0	0.0	0	33.70	0	63.77	0	63.77		63.77	0	63.77				
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kab/Kota sasaran pelaksanaan advokasi pemenuhan 5 jenis profesi tenaga kesehatan untuk upaya promotif dan preventif	Kab./kota	24.0	3,446,000,000	0.0	0	24.0	1,097,000,000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0	0	0.0				
		Jumlah jenis profesi tenaga kesehatan di Kab/Kota yang terdala	Jenis Profesi	22.0		0.0		22.0		0.0		11.0		0.0		0.0		11.0		50.0		11.0		50.0					
		Jumlah peserta Pertemuan Pengelola SDMK	Orang	72.0		0.0		24.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan upaya pemenuhan tenaga kesehatan sesuai analisis beban kerja	Kab./kota	24.0		0.0		24.0		0.0		24.0		0.0		0.0		24.0		100.0		24.0		100.0					
		Jumlah peserta Koordinasi Upaya Pemenuhan NAKES di Provinsi	Orang	90.0		0.0		30.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah peserta koordinasi dalam upaya pemenuhan NAKES di Kab/Kota	Orang	234.0		0.0		78.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah peserta koordinasi pemenuhan tenaga kesehatan 6 RS Regional	Orang	150.0		0.0		50.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah pemetaan tenaga kesehatan pada RS Swasta/Klinik/TNI/POLRI	Rumah Sakit	60.0		0.0		30.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah peserta Sosialisasi Upaya Pemenuhan Tenaga Kesehatan	Orang	216.0		0.0		72.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			16.67	0.0			16.67	0.0				
	Predikat Kinerja																												

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN N/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2020)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	KET		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%		17	18		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK	%	100.0	7,977,000,000	0.0	0	100.0	2,515,000,000	0	10.0	0	3.60	0	0.0	0	84.47	0	98.07	0	98.07	0	98.07	0	98.07	0				
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang telah menerapkan E-Logistik dan E-Purchasing	Kab./kota	24.0	4,742,000,000	0.0	0	24.0	1,495,000,000	0	0.0	0	24.0	0	0.0	0	0.0	0	24.0	0	100.0	0	24.0	0	100.0	0				
		Jumlah Wahana Intersip di Kab/Kota yang dipantau	Wahana	28.0		0.0		28.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
		Jumlah tenaga kesehatan yang dibekali dalam penerapan POR (Penggunaan Obat Rasional)	Orang	450.0		0.0		150.0		0.0	0.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.0	0.0	32.0	48.0	0.0	10.67	0.0					
		Jumlah peserta Sosialisasi e-Monev RKO	Orang	60.0		0.0		60.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
		Jumlah tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang terpilih	Orang (9 Kategori)	81.0		0.0		27.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
		Jumlah peserta Sosialisasi Pemberdayaan Tenaga Kesehatan di Unit Pelayanan Kesehatan	Orang	222.0		0.0		74.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
		Jumlah peserta Sosialisasi Perundang-Undangan SDMK	Orang	321.0		0.0		107.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
		Jumlah Jenis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang disosialisasikan	Jenis Jafung	9.0		0.0		7.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
		Jumlah peserta Workshop Penguatan Lintas Sektor dalam rangka Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Orang	180.0		0.0		60.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
		Jumlah peserta Pertemuan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan	Orang	216.0		0.0		72.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				9.19	0.0			6.77	0.0				
	Predikat Kinerja																													

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2020)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPd)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	KET		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%		17	18		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	%	85.0	3,790,000,000	0.0	0	66.0	1,130,000,000	1,043,730,000	0.0	0	0.0	0	25.0	0	50.0	822,386,000	75.0	822,386,000	113.64	78.79	75.0	822,386,000	88.24	21.70				
	Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat	%	100.0	2,390,000,000	0.0	0	100.0	760,000,000	267,091,000	0.0	0	0.0	0	0.0	0	85.0	150,157,000	85.0	150,157,000	85.0	56.22	85.0	150,157,000	85.0	6.28				
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan Pemberdayaan Penggalangan Kemitraan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyebaran informasi kesehatan melalui Pemeran Kesehatan	Kali	6.0	2,390,000,000	0.0	0	2.0	760,000,000	267,091,000	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.0	150,157,000	1.0	150,157,000	50.0	56.22	1.0	150,157,000	16.67	6.28				
		Jumlah Tenaga Kesehatan yang telah dibekali GEMA Cermat dalam pemberdayaan masyarakat	Orang	600.0		0.0		200.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan Pengelolaan Obat Satu Pintu (One Gate Policy)	Kab/Kota	24.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		24.0		24.0		100.0		24.0		100.0					
		Jumlah Tenaga Promosi Kesehatan yang mengikuti Konas Promkes	Orang	10.0		0.0		10.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Jumlah penyebaran informasi kesehatan melalui Kampanye Kesehatan	Kali	3.0		0.0		1.0			0.0		0.0		0.0		1.0		1.0		100.0		1.0		33.33					
		Jumlah tenaga Apoteker dan Apoteker AOC yang telah dievaluasi Penerapan Gema Cermat dalam Pemberdayaan Masyarakat	Apoteker	410.0		0.0		130.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Terbentuknya jejaring Obat dan Pangan Lintas Sektor	Orang	50.0		0.0		20.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		Terlaksananya advokasi pengembangan kebijakan publik berwawasan Kesehatan dan gerakan masyarakat perilaku hidup sehat (DAK)	Kab/Kota	0.0		0.0		0.0			0.0		0.0		0.0		24.0		24.0		0.0		24.0		0.0					
		Terlaksananya kemitraan /jejaring kerja dengan mitra potensial terkait gemas (DAK)	kelompo k	0.0		0.0		0.0			0.0		0.0		0.0		4.0		4.0		0.0		4.0		0.0					
	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			27.78	56.22			16.67	0.0					
	Predikat Kinerja																													

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2020)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%		17	18		
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Tersebarluasnya Informasi PHBS melalui berbagai Media	%	100.0	580,000,000	0.0	0	100.0	150,000,000	776,639,000	0.0	0	0.0	0	0.0	0	100.0	672,229,000	100.0	672,229,000	100.0	86.56	100.0	672,229,000	100.0	115.90				
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah penyebarluasan informasi melalui radio, TV, media cetak, merchandise, kelompok potensial dan evaluasi media	Paket	15.0	580,000,000	0.0	0	5.0	150,000,000	776,639,000	0.0	0	0.0	0	0.0	0	5.0	672,229,000	5.0	672,229,000	100.0	86.56	5.0	672,229,000	33.33	115.90				
		Terlaksananya orientasi gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat pada pembina dan kader	kali	0.0		0.0		1.0			0.0		0.0		0.0		1.0		1.0		100.0		1.0		0.0					
		Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kampanye gerakan masyarakat Hidup Sehat di Kab / Kota TK. Provinsi (DAK)	kab/kota	0.0		0.0		24.0			0.0		0.0		0.0		4.0		4.0		16.67		4.0		0.0					
		Terlaksananya konsultasi program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat terkait Germas (DAK)	kali	0.0		0.0		4.0			0.0		0.0		0.0		1.0		1.0		25.0		1.0		0.0					
		Terlaksananya Penggerakan masyarakat Hidup Sehat Tingkat Provinsi	kali	0.0		0.0		1.0			0.0		0.0		0.0		1.0		1.0		100.0		1.0		0.0					
		Tersosialisasinya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui kampanye Lokal Media Cetak dan Media Elektronik (DAK)	tahun	0.0		0.0		1.0			0.0		0.0		0.0		1.0		1.0		100.0		1.0		0.0					
	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				73.61	86.56			5.56	0.0				
	Predikat Kinerja																													

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2020)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%		17	18		
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat UKBM Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%	100.0	820,000,000	0.0	0	100.0	220,000,000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah pimpinan dan anggota SBH yang mengikuti persiapan dan pelaksanaan PERTINAS SBH	Orang	30.0	820,000,000	0.0	0	10.0	220,000,000	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
		Jumlah Posyandu terbaik tingkat Provinsi	Posyandu	15.0		0.0		5.0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0.0	0.0					0.0	0.0				
	Predikat Kinerja																													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	100.0	230,713,700,000	0.0	0	100.0	69,759,700,000	70,611,942,030	7.79	10,249,449,488	31.04	39,048,572,764	5.40	53,132,247,026	50.71	69,674,539,620	94.94	69,674,539,620	94.94	98.67	94.94	69,674,539,620	94.94	30.20				
		Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%	100.0		0.0		100.0			25.0		23.0		23.0		27.0		98.0		98.0		98.0		98.0					
		Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	%	0.0		0.0		2.0			0.0		0.0		0.0		0.02		0.02		1.0		0.02		0.0					
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%	100.0	659,000,000	0.0	0	100.0	192,000,000	396,247,230	25.0	0	25.0	81,820,000	25.0	109,967,500	25.0	249,894,150	100.0	249,894,150	100.0	63.07	100.0	249,894,150	100.0	37.92				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	9.0	94,000,000	0.0	0	3.0	24,000,000	67,169,000	2.0	0	0.0	50,320,000	0.0	56,320,000	1.0	67,088,000	3.0	67,088,000	100.0	99.88	3.0	67,088,000	33.33	71.37				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	Dokumen	3.0	274,000,000	0.0	0	1.0	84,000,000	171,310,150	1.0	0	0.0	21,500,000	0.0	35,900,000	0.0	60,491,700	1.0	60,491,700	100.0	35.31	1.0	60,491,700	33.33	22.08				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	3.0	33,000,000	0.0	0	1.0	10,000,000	19,492,650	0.0	0	0.0	0	1.0	0	0.0	14,324,500	1.0	14,324,500	100.0	73.49	1.0	14,324,500	33.33	43.41				
	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	3.0	24,000,000	0.0	0	1.0	7,000,000	13,323,900	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6,107,000	1.0	6,107,000	100.0	45.83	1.0	6,107,000	33.33	25.45				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	3.0	24,000,000	0.0	0	1.0	7,000,000	9,287,380	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.0	7,546,550	1.0	7,546,550	100.0	81.26	1.0	7,546,550	33.33	31.44				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	Dokumen	18.0	210,000,000	0.0	0	6.0	60,000,000	115,664,150	1.0	0	1.0	10,000,000	1.0	17,747,500	3.0	94,336,400	6.0	94,336,400	100.0	81.56	6.0	94,336,400	33.33	44.92				
	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		100.0	11.59					33.33	0.0				
	Predikat Kinerja																													

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN N/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2020)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)	REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV				K	Rp.	K	Rp.				
				1	3	4	5	6		7		8			9		10				11		12				13 = 9+10+11+12	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100.0	218,900,700,000	0.0	0	100.0	66,286,700,000	66,919,275,130	25.0	10,081,687,783	25.0	37,130,253,030	25.0	50,752,269,499	25.0	66,447,418,147	100.0	66,447,418,147	100.0	99.29	100.0	66,447,418,147	100.0	30.36		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		3.0	218,000,000,000	0.0	0	1.0	66,000,000,000	66,632,553,580	0.25	10,081,687,783	0.25	37,036,253,030	0.25	50,570,417,429	0.25	66,162,077,977	1.0	66,162,077,977	100.0	99.29	1.0	66,162,077,977	33.33	30.35		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Laporan	36.0	27,500,000	0.0	0	12.0	8,500,000	8,043,200	3.0	0	3.0	0	3.0	0	3.0	7,376,600	12.0	7,376,600	100.0	91.71	12.0	7,376,600	33.33	26.82		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	Laporan	300.0	538,700,000	0.0	0	100.0	173,700,000	143,736,070	15.0	0	35.0	50,000,000	20.0	99,947,070	30.0	143,733,570	100.0	143,733,570	100.0	100.0	100.0	143,733,570	33.33	26.68		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di susun	Laporan	3.0	10,000,000	0.0	0	1.0	2,000,000	1,402,280	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.0	1,400,000	1.0	1,400,000	100.0	99.84	1.0	1,400,000	33.33	14.0		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang di susun	Laporan	54.0	315,000,000	0.0	0	18.0	100,000,000	131,120,000	4.0	0	4.0	44,000,000	5.0	79,705,000	5.0	130,630,000	18.0	130,630,000	100.0	99.63	18.0	130,630,000	33.33	41.47		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Laporan	3.0	9,500,000	0.0	0	1.0	2,500,000	2,420,000	0.0	0	0.0	0	1.0	2,200,000	0.0	2,200,000	1.0	2,200,000	100.0	90.91	1.0	2,200,000	33.33	23.16		
	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																											
	Predikat Kinerja																											
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	%	100.0	1,195,000,000	0.0	0	100.0	360,000,000	246,099,730	25.0	0	25.0	89,000,000	25.0	153,897,900	25.0	229,997,900	100.0	229,997,900	100.0	93.46	100.0	229,997,900	100.0	19.25		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	3.0	628,000,000	0.0	0	1.0	178,000,000	117,759,400	1.0	0	0.0	42,000,000	0.0	69,532,400	0.0	101,752,400	1.0	101,752,400	100.0	86.41	1.0	101,752,400	33.33	16.20		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah di SKPD	Laporan	3.0	567,000,000	0.0	0	1.0	182,000,000	128,340,330	0.0	0	0.0	47,000,000	0.0	84,365,500	1.0	128,245,500	1.0	128,245,500	100.0	99.93	1.0	128,245,500	33.33	22.62		
	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																											
	Predikat Kinerja																											

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2020)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	KET	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%		17	18	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Kinerja ASN		89.0	2,821,000,000	0.0	0	87.0	856,000,000	305,520,010	25.0	0	25.0	106,500,000	25.0	178,850,000	23.0	287,307,450	98.0	287,307,450	112.64	94.04	98.0	287,307,450	110.11	10.18			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang dikelola Administrasi Kepegawaiannya	Orang	1,000.0	1,466,000,000	0.0	0	1,000.0	481,000,000	305,520,010	167.0	0	234.0	106,500,000	331.0	178,850,000	145.0	287,307,450	877.0	287,307,450	87.70	94.04	877.0	287,307,450	87.70	19.60			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	90.0	300,000,000	0.0	0	30.0	100,000,000	0	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	4.0	0	13.33		4.0	0	4.44				
	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			25.26	11.76			23.04	0.0				
	Predikat Kinerja																												
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100.0	2,818,000,000	0.0	0	100.0	835,000,000	1,287,196,301	25.0	24,651,760	25.0	876,676,860	25.0	1,012,403,110	25.0	1,199,035,170	100.0	1,199,035,170	100.0	93.15	100.0	1,199,035,170	100.0	42.55			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Unit	35.0	420,000,000	0.0	0	35.0	130,000,000	104,923,900	0.0	0	0.0	20,000,000	0.0	66,000,000	35.0	104,525,000	35.0	104,525,000	100.0	99.62	35.0	104,525,000	100.0	24.89			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan Perlengkapan Dan Peralatan Gedung Kantor Sesuai Kebutuhan Kantor	Jenis	20.0	1,480,000,000	0.0	0	20.0	400,000,000	722,873,500	0.0	0	0.0	720,453,500	0.0	720,453,500	20.0	720,453,500	20.0	720,453,500	100.0	99.67	20.0	720,453,500	100.0	48.68			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	Jenis	30.0	27,000,000	0.0	0	30.0	8,000,000	13,533,501	0.0	0	0.0	0	0.0	0	30.0	3,560,000	30.0	3,560,000	100.0	26.31	30.0	3,560,000	100.0	13.19			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Orang	2,136.0	891,000,000	0.0	0	2,136.0	297,000,000	277,141,200	212.0	24,651,760	574.0	73,723,360	734.0	114,757,610	534.0	201,778,470	2,054.0	201,778,470	96.16	72.81	2,054.0	201,778,470	96.16	22.65			
		Jumlah Orang yang melakukan Konsultasi	Orang	30.0		0.0		30.0			8.0		3.0		9.0		10.0		30.0		100.0		30.0		100.0				
	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			99.23	14.23			99.23	0.0				
	Predikat Kinerja																												

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RPKD TAHUN LALU (2020)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RPKD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		15 = 7+13		16 = 15/6*100%		17	18		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	%	100,0	870.000.000	0,0	0	100,0	230.000.000	167.520.150	0,0	0	100,0	167.520.150	0,0	167.520.150	0,0	167.520.150	100,0	167.520.150	100,0	100,0	100,0	167.520.150	100,0	19,26				
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia sesuai Kebutuhan	Buah	90,0	870.000.000	0,0	0	30,0	230.000.000	167.520.150	0,0	0	30,0	167.520.150	0,0	167.520.150	0,0	167.520.150	30,0	167.520.150	100,0	100,0	30,0	167.520.150	33,33	19,26				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja																				100,0	50,0			33,33	0,0				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan	%	0,0	2.270.000.000	0,0	0	100,0	700.000.000	608.540.520	25,0	108.303.065	25,0	200.756.185	25,0	304.497.728	25,0	434.906.623	100,0	434.906.623	100,0	71,47	100,0	434.906.623	0,0	19,16				
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Bulan	36,0	2.270.000.000	0,0	0	12,0	700.000.000	608.540.520	3,0	108.303.065	3,0	200.756.185	3,0	304.497.728	3,0	434.906.623	12,0	434.906.623	100,0	71,47	12,0	434.906.623	33,33	19,16				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja																				100,0	35,73			33,33	0,0				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	%	100,0	1.180.000.000	0,0	0	100,0	300.000.000	681.542.959	25,0	34.806.880	25,0	397.046.539	25,0	452.841.139	25,0	658.460.030	100,0	658.460.030	100,0	96,61	100,0	658.460.030	100,0	55,80				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Operasional Dinas yang dipelihara	Unit	52,0	1.180.000.000	0,0	0	52,0	300.000.000	0	0,0	0	9,0	0	0,0	0	0,0	0	9,0	0	17,31		9,0	0	17,31					
		Jumlah Kendaraan Operasional Dinas yang dibayarkan Pajak	Unit	52,0		0,0		52,0		0	0,0		50,0		0,0		0,0	50,0		96,15		50,0		96,15						
	Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja																				56,73	32,20			56,73	0,0				

Berikut Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program pada Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Triwulan IV Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan :

I. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Rata – rata capaian kinerja Program adalah 86,55 % dengan realisasi keuangan sebesar 84,69 % . Indikator Kinerja Program adalah :

- Persentase anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Target Renstra adalah 7,5 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 6,5 %. Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 8,97 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 138 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 119,6 %.

- Persentase Ibu Hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Target Renstra adalah 13 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 12 %. Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 12,1 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 100,83 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 93,08 %.

- Persentase Penduduk/ Warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)

Target Renstra adalah 100 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 100 %. Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 100 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 100% dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 100 %.

- Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)

Target Renstra adalah 100 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 100 %. Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 100 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 100 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 100 %.

- Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan

Target Renstra adalah 100 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 33 %. Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 0 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 0 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 0 %.

- Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi

Target Renstra adalah 100 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 87 %. Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 70 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 70% dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 80,46%.

Kegiatan pada Program ini adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Cakupan ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan. Rata – rata capaian kinerja kegiatan adalah 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 88,14 % .

Target Renstra adalah 100 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 100 %. Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 100 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 100 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 100 %.

2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Cakupan Layanan Kesehatan UKP dan UKM Rujukan. Rata – rata capaian kinerja kegiatan adalah 100 % dengan realisasi

keuangan sebesar 83,63 % .

Target Renstra adalah 100 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 100 %. Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 100 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 100 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 100 %.

3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi dengan indikator kinerja Cakupan ketersediaan data dan informasi kesehatan. Rata – rata capaian kinerja kegiatan adalah 95% dengan realisasi keuangan sebesar 81,59%. Target Renstra adalah 100 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 100%. Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 95 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 95 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 95 %.

4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja persentase izin RS Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan. Rata – rata capaian kinerja kegiatan adalah 100 %. Kegiatan ini tidak memiliki alokasi anggaran di dalam DPA, namun mendapatkan support anggaran dari APBN.

Target Renstra adalah 100 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 100 %. Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 100 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 100 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 100 %..

II. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Rata – rata capaian kinerja Program adalah 104,35 % . Program ini tidak memiliki alokasi anggaran di dalam DPA. Indikator Kinerja Program adalah:

- Rasio Tenaga Kesehatan

Target Renstra adalah 23/100.000 penduduk dan Target Kinerja pada Renja adalah 23/100.000. Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 24/100.000,

sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 104,35 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 104,35 %.

Kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan indikator kinerja Cakupan Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Unit Pelayanan Kesehatan. Rata – rata capaian kinerja kegiatan adalah 63,77 %

Target Renstra adalah 100 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 100 %. Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 63,77 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 63,77 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 63,77 %.

2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja cakupan peningkatan kompetensi teknis SDMK. Rata – rata capaian kinerja kegiatan adalah 98,07 % .

Target Renstra adalah 100 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 100 %. Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 98,07 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 98,07 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 98,07 %.

III. Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Rata – rata capaian kinerja Program adalah 100 %. Program ini tidak memiliki alokasi anggaran di dalam DPA. Indikator Kinerja Program adalah :

- Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar

Target Renstra adalah 100 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 85 %. Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 85 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 100 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 100 %.

Kegiatan pada Program ini adalah sebagai berikut :

1. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dengan Indikator kinerja persentase pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang diterbitkan.

Target Renstra adalah 100 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 100 %. Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 100 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 100 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 100 %.

IV. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Rata – rata capaian kinerja Program adalah 113,64 % dengan realisasi keuangan sebesar 78,79 %. Indikator Kinerja Program adalah:

- Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS

Target Renstra adalah 85 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 66%. Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 75 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 113,64 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 88,24 %.

Kegiatan pada Program ini adalah sebagai berikut :

1. Advokasi, Pemberdayaan , Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Cakupan pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat. Rata – rata capaian kinerja kegiatan adalah 85 % dengan realisasi keuangan sebesar 56,22, % .

Target Renstra adalah 100 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 100 %. Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 85 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 85 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 85 %.

2. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS) dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja tersebarluasnya informasi PHBS melalui berbagai media. Rata – rata capaian kinerja kegiatan adalah 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 86,56 %.

Target Renstra adalah 100 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 100 %. Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 100 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 100 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 100 %.

3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi dengan Indikator Cakupan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dengan indikator kinerja cakupan pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM). Rata – rata capaian kinerja kegiatan adalah 100%. Kegiatan ini tidak memiliki anggaran di DPA, namun mendapat support anggaran APBN.

Target Renstra adalah 100 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 100 %. Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 100 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 100 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 100 %.

V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Rata – rata capaian kinerja Program adalah 64,65 % dengan realisasi keuangan sebesar 98,67 %. Indikator Kinerja Program adalah:

- Persentase ASN Perangkat Daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik.

Target Renstra adalah 100 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 100 %. Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 98 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 98% dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 98 %.

- Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP

Target Renstra adalah 2 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 2 %. Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 0,02 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 10 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 10 %.

- **Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**

Target Renstra adalah 100 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 100 %. Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 94,94 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 94,04 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 94,04 %.

Kegiatan pada program ini adalah :

1. Perencanaan, Penanganan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu. Rata – rata capaian kinerja kegiatan adalah 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 63,07 % . Indikator Kinerja Kegiatan adalah:

Target Renstra adalah 100 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 100 %. Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 100 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 100 % dan tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 100 %.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja persentase penyusunan Dokumen Laporan Keuangan tepat waktu. Rata – rata capaian kinerja kegiatan adalah 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 99,29 % . Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

Target Renstra adalah 100 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 100 %. Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 100 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 100 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 100 %.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator kinerja persentase pemenuhan administrasi Barang Milik Daerah. Rata – rata capaian kinerja kegiatan adalah 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 93,46 % . Indikator Kinerja Kegiatan adalah:

Target Renstra adalah 100 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 100 % . Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 100 % , sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 100 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 100 % .

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja rata-rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN. Rata – rata capaian kinerja kegiatan adalah 112,64 % dengan realisasi keuangan sebesar 94,04 % . Indikator Kinerja Program adalah :

Target Renstra adalah 89 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 87 % . Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 98 % , sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 112,64 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 110,11 % .

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja persentase pemenuhan administrasi umum kantor. Rata – rata capaian kinerja kegiatan adalah 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 93,15 % . Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

Target Renstra adalah 100 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 100 % . Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 100 % , sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 100 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 100 % .

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah. Rata – rata capaian kinerja kegiatan adalah 100 %

dengan realisasi keuangan sebesar 100 % . Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

Target Renstra adalah 100 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 100 % .
Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 100 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 100 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 100 % .

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah. Rata – rata capaian kinerja kegiatan adalah 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 71,47 % . Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

Target Renstra adalah 100 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 100 % .
Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 100 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 100 % dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 100 % .

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik. Rata – rata capaian kinerja kegiatan adalah 100% dengan realisasi keuangan sebesar 96,61 % . Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

Target Renstra adalah 100 % dan Target Kinerja pada Renja adalah 100 % .
Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah 100 %, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target pada Renja adalah 100% dan tingkat Capaian kinerja terhadap target pada Renstra adalah 100 % .

Pada Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 terdapat 5 Program yaitu 4 Program Teknis dan 1 Program Non Teknis. Pada 5 Program terdiri dari 18 Kegiatan dan 61 Sub Kegiatan. Pada Triwulan IV Tahun 2021, rata – rata capaian kinerja program pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Selatan adalah 61,58 % dengan realisasi keuangan sebesar 94,08 % dan realisasi fisik sebesar 97,19 %.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target rencana kerja adalah karena sistem pencatatan dan pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan belum terlaksana secara optimal sehingga diperlukan koordinasi dan sinergitas antar program yang lebih baik.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Selatan disajikan dalam tabel T-C.30 berikut :

GERMAS										
TABEL TC.30										
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN										
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 - 2023										
NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun 2021	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah			100%	100%	100%	97,50%	100%	100%	
2	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik Dan Sangat Baik			100%	100%	100%	98%	100%	100%	
3	Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP			2%	1,00%	0,00%	0,02%	1,00%	0,50%	
4	Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan			33%	50%	100%	0%	16,67%	33%	
5	Persentase Penduduk / Warga Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (SPM)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	% RS Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi			87%	90%	100%	70%	70%	75%	
7	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Asupan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)			12%	12,5%	13%	12,1%	12,5%	13%	
8	Persentase Penduduk / Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau berpotensi Bencana Provinsi Yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan (SPM)			100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	
9	Persentase Anak Yang Mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)			6,5%	7%	7,5%	8,5%	9%	9,5%	
10	Persentase Kabupaten / Kota Yang Memiliki Kebijakan PHBS			66%	75%	85%	75%	78%	80%	

Berdasarkan Tabel TC. 30 di atas, tingkat pencapaian kinerja Dinas Kesehatan selama tahun 2021 menunjukkan pencapaian sebagian besar indikator kinerja telah mengalami peningkatan dan telah mencapai target yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa Indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan, antara lain :

1. Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah
2. Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik Dan Sangat Baik
3. Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan
4. Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi

Selanjutnya Indikator yang telah mencapai target yang ditetapkan, sebagai berikut:

1. Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP
2. Persentase Penduduk / Warga Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (SPM)
3. Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Asupan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
4. Persentase Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau berpotensi Bencana Provinsi Yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan (SPM)
5. Persentase Anak Yang Mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)
6. Persentase Kabupaten/Kota Yang Memiliki Kebijakan PHBS

Faktor-faktor yang mempengaruhi belum tercapainya indikator di atas, antara lain :

1. Berlangsungnya pandemi Covid-19 yang berlangsung kurang lebih 2 tahun ini mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan KIA, dimana adanya ketakutan ibu hamil dan keluarga untuk membawa anak untuk mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kehamilan sehingga deteksi dini terhadap ibu hamil dengan resiko tinggi tidak optimal dilaksanakan. Selain itu dalam masa pandemi covid-19 resiko terhadap tingkat keparahan suatu penyakit dan resiko kematian lebih tinggi khususnya bagi kelompok rentan dengan penyakit penyerta.

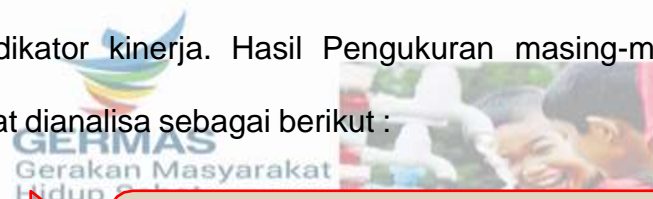
2. Belum terbentuknya Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan di tingkat OPD.
3. Adanya Penyakit Infeksi dan penyakit penyerta yang merupakan dampak dari kekurangan gizi dalam jangka waktu lama berpengaruh terhadap kondisi kesehatan ibu, ibu hamil dan balita. Selain itu kondisi kesehatan lingkungan sekitar yang tidak sehat juga berperan menyebabkan munculnya penyakit infeksi.
4. Faktor ekonomi yang berpengaruh pada penyediaan pangan keluarga dan pengambilan keputusan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
5. Mobilitas tenaga kesehatan yang sudah dilatih masih cukup tinggi, proses mutasi yang sering terjadi utamanya pada Puskesmas di daerah non perkotaan, sehingga menyebabkan permasalahan sama di setiap tahun dari sisi jumlah tenaga kesehatan tidak merata secara proporsional, tugas rangkap bagi petugas kesehatan sehingga tidak maksimal dalam menjalankan profesinya.
6. Belum optimalnya semua sektor berperan dalam program/kegiatan yang dilaksanakan untuk tujuan bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga beban tanggungjawab dirasa hanya pada OPD teknis yang bersangkutan langsung sehingga pencapaian sasaran kurang maksimal.

Upaya pemecahan yang dapat dilakukan terhadap masalah tersebut di atas antara lain :

1. Penguatan, penegakan dan penegasan Kebijakan terkait Covid-19, Integritas dan kerjasama yang maksimal dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, stakeholder dan semua lapisan masyarakat.
2. Pembentukan Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan di Tingkat OPD
3. Peningkatan Surveilans epidemiologi dan Gizi, peningkatan promosi kesehatan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan selama masa pandemi.
4. Intervensi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang (kurus). Selain itu pemberian stimulant baik berupa material atau pendidikan keterampilan yang mendukung terbukanya peluang kerja bagi masyarakat tidak mampu.

5. Pembatasan mutasi untuk pegawai yang sudah terlatih. Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan menganalisis kebutuhan tenaga kesehatan di daerahnya dan pelaksanaan distribusi secara proporsional
6. Sinergitas lintas program/sector terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang melibatkan program kesehatan serta perlunya kesepakatan yang diperkuat dengan regulasi mengenai tugas dan fungsi masing-masing lintas sector terkait dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Sesuai dengan Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2 (dua) sasaran yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja, masing-masing memiliki beberapa indikator kinerja. Hasil Pengukuran masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dianalisa sebagai berikut :



SASARAN 1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-1 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu *"Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif dan tujuan "Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah"*.

Dalam pelaksanaannya, Sasaran ini didukung dengan strategi meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dan sumber daya aparatur dengan arah kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi dan kompetensi sumber daya manusia.

Pencapaian kinerja sasaran ini diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel III.3

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 1

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	Nilai SAKIP OPD	79	82,86	104,89%	Sangat Tinggi (ST)
2.	Persentase Temuan Material	2%	0,02%	>100%	Sangat Tinggi (ST)
Rata Rata Nilai Pencapaian Kinerja				102,44%	Sangat Tinggi (ST)

Tabel pengukuran pencapaian kinerja di atas menunjukkan rata-rata realisasi capaian kinerja indikator Sasaran Strategis 1 “**Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah**” telah mencapai dan melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar **102,44%** dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun - tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.4

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 1

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN		
		2019	2020	2021
1.	Nilai SAKIP OPD	77,24%	82,86%	82,86%
2.	Persentase Temuan Material	0,12%	0,26%	0,02%

Hasil Pengukuran kinerja indikator dibandingkan dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya menunjukkan telah mengalami kenaikan realisasi capaian pada semua indikator kinerja. Untuk Indikator Nilai SAKIP OPD tahun 2021 masih menggunakan capaian tahun 2020 dan akan disajikan nilainya pada Laporan Kinerja tahun 2022, karena penilaian SAKIP dilaksanakan setelah Laporan Kinerja ini dibuat.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional

Tabel III.5

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DAN TARGET NASIONAL CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 1

NO.	INDIKATOR KINERJA	PERBANDINGAN		
		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET JANGKA MENENGAH	TARGET NASIONAL
1.	Nilai SAKIP OPD	82,86%	81%	-
2.	Persentase Temuan Material	0,02%	0%	-

Bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah seperti yang terlihat pada tabel di atas, terdapat 1 (satu) indikator yang telah mencapai bahkan melebihi target jangka menengah yaitu indikator Nilai SAKIP OPD dan terdapat 1 (satu) indikator yang menghampiri target yaitu Persentase Temuan Material, diharapkan untuk tahun berikutnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dapat mencapai target jangka menengah yang ditetapkan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Dari hasil evaluasi di atas, selanjutnya dipaparkan faktor penyebab keberhasilan, permasalahan dan upaya pemecahan yang dilakukan, sebagai berikut :

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini, antara lain :

- 1) Adanya regulasi/kebijakan terkait pelaksanaan program pembangunan kesehatan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
- 2) Rekomendasi perbaikan dari hasil Evaluasi SAKIP tahun 2020 oleh Tim dari Inspektorat Prov. Sulawesi Selatan dan hasil Coaching Clinic oleh KemenpanRB dalam pelaksanaan SAKIP, evaluasi kinerja dan penyusunan laporan kinerja.
- 3) Adanya Cascading dan Pohon Kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi sehingga pencapaian kinerja dapat maksimal.
- 4) Adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi rutin setiap triwulan dari Tim Inspektorat Provinsi dan Rekomendasi hasil Audit BPK di tahun sebelumnya dalam pengelolaan dan penatalaksanaan keuangan dan Asset milik daerah, sebagai faktor koreksi dalam pengelolaan anggaran belanja daerah dalam meminimalisir terjadinya temuan material.

Secara umum beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- 1) Masih berlangsungnya Pandemi Covid-19 secara langsung berdampak pada perubahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan
- 2) Belum terbentuknya Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan di tingkat OPD

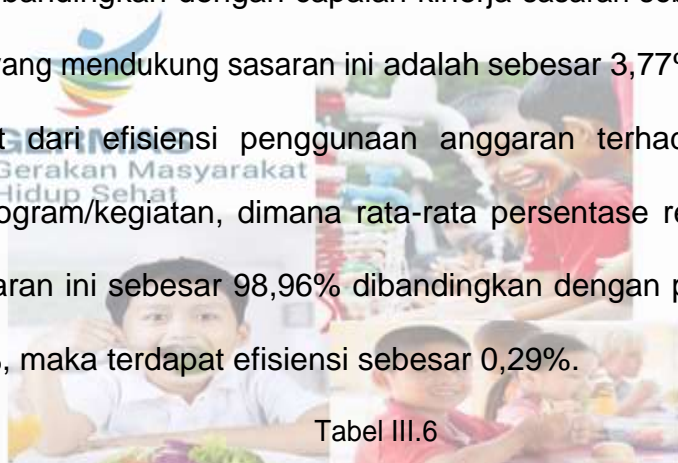
Upaya pemecahan yang dapat dilakukan terhadap masalah tersebut di atas antara lain:

1. Penguatan, penegakan dan penegasan Kebijakan terkait Covid-19, Integritas dan kerjasama yang maksimal dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, stakeholder dan semua lapisan masyarakat.
2. Pembentukan Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan di Tingkat OPD

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini sebesar Rp70.611.942.030,- dengan realisasi sebesar Rp69.674.539.620,- atau 98,67%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 102,44%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 3,77%.

Bila dilihat dari efisiensi penggunaan anggaran terhadap persentase fisik pelaksanaan program/kegiatan, dimana rata-rata persentase realisasi fisik program pendukung sasaran ini sebesar 98,96% dibandingkan dengan persentase keuangan sebesar 98,67%, maka terdapat efisiensi sebesar 0,29%.



Tabel III.6

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PROGRAM PENDUKUNG SASARAN 1

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2021 (Rp)	REALISASI (Rp)	% KEU	% FISIK	EFISIENSI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	70.611.942.030,-	69.674.539.620,-	98,67%	98,96%	0,29%
	JUMLAH	70.611.942.030,-	69.674.539.620,-	98,67%	98,96%	0,29%

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah didukung sebanyak 1 program, 8 kegiatan dan 23 sub kegiatan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Povinsi**

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk melaksanakan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.70.611.942.030,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 69.674.539.620,-

(98,67%) dan realisasi fisik 98,96%. Hasil pencapaian indikator kinerja program, antara lain :

- Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah sebesar 97,50%
- Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik sebesar 98%
- Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP sebesar 0,24%

Kegiatan yang mendukung terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sejumlah Rp 396.247.230,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp249.894.150,- (63,07%) dan realisasi fisik 91,67%. Hasil pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebesar 100%. Pencapaian hasil kegiatan ini didukung oleh 6 sub kegiatan, antara lain :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 67.169.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 67.088.000 (99,88%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya 3 dokumen Rencana Kerja yaitu Renstra Perubahan, Rencana Kerja tahun 2022 dan Rencana Kerja Perubahan tahun 2021.

2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 171.310.150,00 dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 60.491.700 (35,31%) dan Realisasi Fisik 50%. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya 1 dokumen RKA - SKPD.

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 19.492.650,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 14.324.500 (73,49%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya 1 dokumen Perubahan RKA – SKPD Tahun Anggaran 2021.

4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 13.323.900,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 6.107.000 (45,83%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya 1 dokumen DPA – SKPD Tahun Anggaran 2021.

5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 9.287.380,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 7.546.550 (81,26%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya 1 dokumen Perubahan DPA – SKPD Tahun Anggaran 2021.

6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 115.664.150,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 94.336.400 (81,56%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya 6 dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sejumlah Rp. 66.919.275.130,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 66.447.418.147,- (99,29%) dan realisasi fisik 100%. Hasil pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu sebesar 100%. Pencapaian hasil kegiatan ini didukung oleh 6 sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 66.632.553.580.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 66.162.077.977,- (99,29%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya gaji dan gaji tunjangan serta jumlah gaji selama tahun 2021.

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 8.043.200,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 7.376.600 (91,71%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terealisasinya jumlah laporan administrasi keuangan selama 12 bulan.

3) Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan LPPD

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 143.736.070,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 143.733.570,- (100%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terealisasinya jumlah laporan administrasi keuangan selama 12 bulan secara rutin.

4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 1.402.280,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 1.400.000 (99,84%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terealisasinya penyusunan laporan keuangan sebanyak 1 laporan.

5) Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 305.520.010,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 287.307.450,- (94,04%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terealisasinya 18 laporan penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD.

6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 2.420.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 2.200.000 (90,91%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya 1 laporan analisis keuangan tahun 2021.

3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 246.099.730,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 229.997.900,- (93,46%) dan realisasi fisik 100%. Hasil pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah sebesar 100%. Pencapaian hasil ini didukung 2 sub kegiatan, yaitu :

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 117.759.400,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 101.752.400 (86,41%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya 1 dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun 2021.

2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 128.340.330,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 128.245.500,- (99,93%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya laporan barang milik daerah di SKPD.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 305.520.010,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 287.307.450,- (94,04%) dan realisasi fisik 100%. Hasil pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah sebesar 100%. Pencapaian ini didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu :

1) Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 305.520.010.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 287.307.450,- (94,04%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terdatanya jumlah pegawai yang dikelola administrasi kepegawaiannya sebanyak 877 orang.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.287.196.301,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.199.035.170,- (93,15%) dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah Persentase Pemenuhan administrasi kantor sebesar 100%. Pencapaian hasil ini didukung oleh 5 sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 104.923.900,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 104.525.000,- (99,62%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia sebanyak 19 jenis.

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 722.873.500,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 720.453.500,- (99,87%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan sebanyak 8 jenis..

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 168.724.200,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 168.718.200,- (100%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan selama tahun 2021.

4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 13.533.501,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 3.580.000,- (26,31%) dan

Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terealisasinya jumlah barang cetakan dan pengadaan sebanyak 12 jenis selama tahun 2021.

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 277.141.200,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 201.778.470,- (72,81%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah jumlah orang yang mengikuti koordinasi rapat sebanyak 2.054 orang.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 167.520.150,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 167.520.150,- (100%) dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik sebesar 100%. Pencapaian hasil ini didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Mebel

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 167.520.150,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 167.520.150,- (100%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya jumlah mebel yang tersedia sesuai kebutuhan.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 608.540.520,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 434.906.623,- (71,43%) dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100%. Pencapaian hasil ini didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 608.540.520,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 434.906.623,- (71,43%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya jumlah tagihan telepon, air dan listrik.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 681.542.959,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 658.460.030,- (96,61%) dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah persentase barang pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik. Pencapaian hasil ini didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Dinas

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 681.542.959,- dengan Realisasi Keuangansebesar Rp 658.460.030,- (96,61%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya jumlah kendaraan operasional yang dipelihara atau dibayarkan pajaknya sebanyak 15 unit.



SASARAN 2

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Sasaran strategis ini juga merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu "***Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter***" dengan tujuan "***Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat***".

Pencapaian kinerja sasaran ini dilakukan dengan strategi meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan serta mengendalikan penyakit. Sasaran ini juga diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel III.7

**PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 2**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	Angka Kematian Ibu	92/100.000 KH	129/100.000 KH	71,32%	Sedang (S)
2.	Angka Kematian Bayi	5/1.000 KH	5/1.000 KH	100%	Sangat Tinggi (ST)
3.	Prevalensi Balita Stunting	24,59 Persen	27,4%	89,74%	Tinggi (T)
Rata Rata Nilai Pencapaian Kinerja				87,02%	Tinggi (T)

Tabel Pengukuran pencapaian kinerja indikator Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” di atas memperlihatkan dari 3 (tiga) indikator kinerja hanya 1 (satu) indikator yang telah mencapai target yang ditetapkan yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) dan 2 (dua) indikator belum mencapai target yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) dan Prevalensi Balita Stunting. Namun rata-rata nilai pencapaian kinerja sudah mencapai kriteria **Tinggi**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.8

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 2**

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN		
		2019	2020	2021
1.	Angka Kematian Ibu	94/100.000 KH	86/100.000 KH	129/100.000 KH
2.	Angka Kematian Bayi	6/1.000 KH	5/1.000 KH	5/1.000 KH
3.	Prevalensi Balita Stunting	30,59%	30,59%	27,4%

Pengukuran kinerja indikator Prevalensi Balita Stunting dibandingkan dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya menunjukkan telah mengalami kenaikan persentase capaian kinerja (kinerja meningkat), artinya terjadi penurunan jumlah prevalensi balita stunting di Sulawesi Selatan. Sedangkan pada indikator Angka Kematian Balita (AKB) masih tetap sama dengan kondisi tahun sebelumnya (tahun 2020). Selanjutnya diakui pada indikator Angka Kematian Ibu (AKI) terjadi penurunan

persentase capaian kinerja dimana Angka Kematian Ibu meningkat, ini menunjukkan jumlah kasus kematian ibu di Sulawesi Selatan juga meningkat.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional

Tabel III.9

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DAN TARGET NASIONAL CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 2

NO	INDIKATOR KINERJA	PERBANDINGAN		
		2021	TARGET JANGKA MENENGAH	TARGET NASIONAL
1.	Angka KematianIbu	129/100.000 KH	90/100.000 KH	205/100.000 KH
2.	Angka Kematian Bayi	5/1.000 KH	4/1.000 KH	18,6/1.000 KH
3.	Prevalensi Balita Stunting	27,4%	18,59%	21,1%

Bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah seperti yang terlihat pada tabel di atas, pencapaian kinerja indikator sasaran ini belum ada yang mencapai target jangka menengah yang ditetapkan. Namun bila dibandingkan dengan target Nasional terdapat 2 (dua) indikator yang capaiannyatelah melampaui target (Angka Kematian masih di bawah target Nasional) yaitu Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Sedangkan untuk Prevalensi Balita Stunting, Realisasi kinerja Sulawesi Selatan belum mencapai target yang ditetapkan (masih di atas target Prevalensi Nasional)

Indikator kinerja pada sasaran ini secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu didefinisikan sebagai banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian ibu adalah kematian wanita yang terjadi selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/incidental (ICD 10, WHO).

Informasi mengenai tingginya kasus kematian ibu di suatu wilayah akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi,

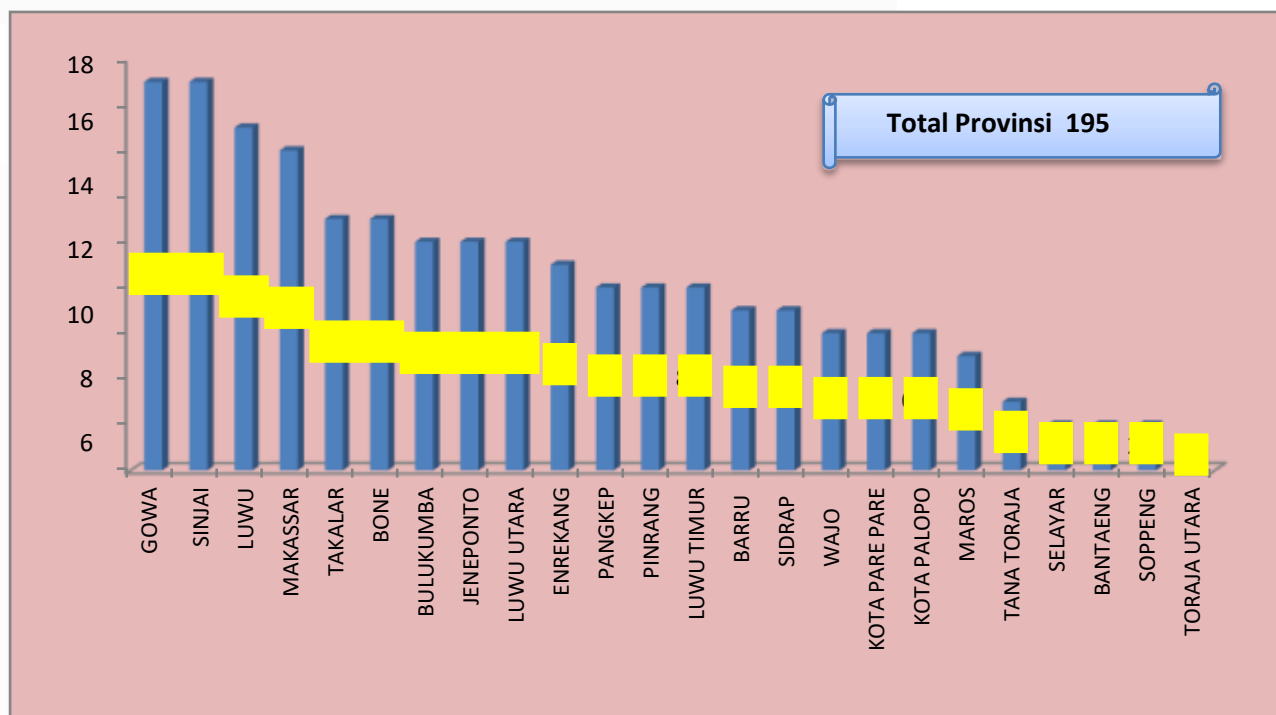
terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi, program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Berdasarkan rekapitulasi data Kabupaten/Kota menunjukkan jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 sebanyak 195 kasus dan mengalami peningkatan sebanyak 62 kasus dari tahun sebelumnya (tahun 2020 = 133 kasus). Peningkatan jumlah kasus kematian ibu ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, antara lain status kesehatan ibu dan kesiapan untuk hamil, pemeriksaan antenatal (masa kehamilan), pertolongan persalinan dan perawatan segera setelah persalinan, serta faktor sosial budaya. Terbatasnya akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, terutama bagi ibu hamil di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) juga turut mempengaruhi peningkatan kasus kematian ibu.

Kondisi pandemi Covid-19 selama 2 (dua) tahun ini juga turut berperan dalam penurunan intensitas pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Sebagian masyarakat takut untuk memeriksakan kehamilannya di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga tidak dapat dilakukan deteksi dini jika ada risiko tinggi pada ibu hamil. Selain itu tenaga kesehatan di Puskesmas termasuk bidan menjalankan peran ganda selama masa pandemi sehingga pelayanan KIA tidak optimal. Sebaran kasus jumlah kematian ibu di Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.2

**KEMATIAN IBU DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**



Dari grafik di atas terlihat jumlah kasus kematian ibu terbanyak berada pada Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai sebanyak 17 kasus disusul oleh Kabupaten Luwu sebanyak 15 kasus. Sedangkan Jumlah kasus kematian ibu terendah ada di Kabupaten Toraja Utara dengan jumlah 1 kasus kematian ibu.

Angka Kematian Ibu diperoleh dengan membagi jumlah kasus kematian ibu sesuai dengan definisi di atas dalam kurun waktu satu tahun dengan jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu yang sama. Perhitungan AKI di Provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel III.10

**ANGKA KEMATIAN IBU DI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2017-2021**

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Ibu hami yang meninggal karena hamil, bersalin dan Nifas	Orang	115	139	144	133	195
Jumlah Kelahiran Hidup	Orang	150.220	150.624	152.680	154.733	151.060
AKI per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	Angka (per 100.000 KH)	77	92	94	86	129

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi juga merupakan salah satu indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. AKB didefinisikan sebagai Jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun yang terjadi per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

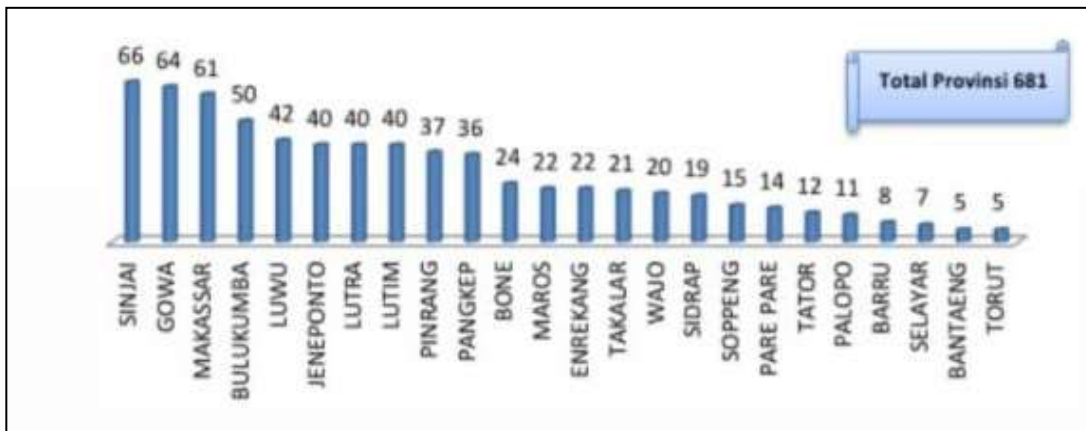
Jumlah kasus kematian bayi erat hubungannya dengan kondisi lingkungan tempat tinggal dan status sosial dari orang tua bayi tersebut. Bayi merupakan investasi SDM untuk masa yang akan datang. Kualitas kehidupan bayi secara tidak langsung akan menjadi estimasi kualitas kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Jumlah kasus kematian bayi selain merupakan indikator yang mengukur derajat kesehatan juga sebagai indikator yang menilai tingkat kesejahteraan suatu bangsa.

Pada tahun 2019 Jumlah Kasus kematian bayi di Sulawesi Selatan sebanyak 916 kasus, menurun menjadi 791 kasus di tahun 2020 dan sampai dengan penghujung tahun 2021. Jumlah kasus kematian bayi kembali meningkat menjadi 844 kasus. Peningkatan jumlah kasus ini menunjukkan perlunya ditingkatkan upaya-upaya yang lebih maksimal dalam menekan jumlah kasus kematian bayi. Kondisi ini diharapkan menjadi rujukan dalam evaluasi pencapaian program kependudukan dan dalam penentuan kebijakan di sektor kesehatan keluarga khususnya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Data jumlah kasus kematian bayi neonatal (0-28 hari) di Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

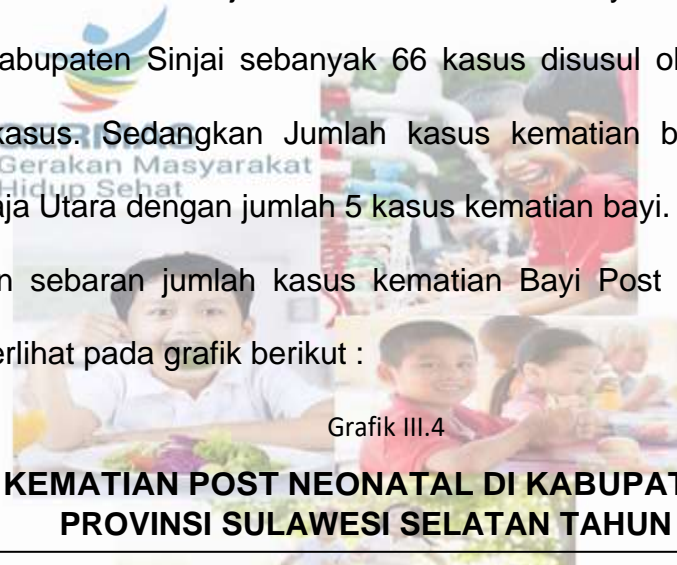
Grafik III.3

**KEMATIAN NEONATAL DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**



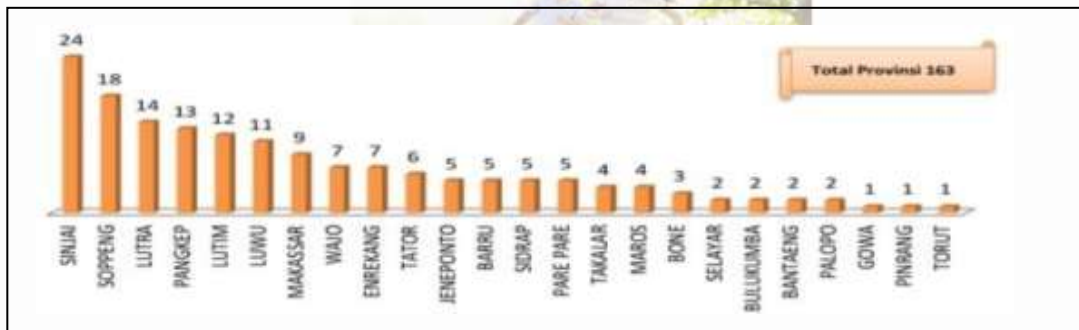
Dari grafik di atas terlihat jumlah kasus kematian bayusia 0-28 hari terbanyak berada pada Kabupaten Sinjai sebanyak 66 kasus disusul oleh Kabupaten Gowa sebanyak 64 kasus. Sedangkan jumlah kasus kematian bayi terendah ada di Kabupaten Toraja Utara dengan jumlah 5 kasus kematian bayi.

Sedangkan sebaran jumlah kasus kematian Bayi Post Neonatal (29 hari-11 bulan) seperti terlihat pada grafik berikut :



Grafik III.4

**KEMATIAN POST NEONATAL DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**



Dari grafik di atas terlihat jumlah kasus kematian bayi usia 29 hari – 11 bulan terbanyak berada pada Kabupaten Sinjai sebanyak 24 kasus disusul oleh Kabupaten Soppeng sebanyak 18 kasus. Sedangkan jumlah kasus kematian bayi terendah ada di Kabupaten Toraja Utara dengan jumlah 1 kasus kematian bayi.

Berdasarkan jumlah total kematian bayi di atas, nampak bahwa lebih dari 2/3 kematian bayi (usia 0 – 11 bulan) itu terjadi pada masa neonatal (usia 0 – 28) hal ini berkaitan dengan kondisi dan kualitas kesehatan ibu pada saat hamil dan melahirkan,

kemudian deteksi faktor risiko, kompetensi petugas dan dukungan sarana prasarana untuk penanganan neonatal esensial.

Angka Keamtian Bayi diperoleh dengan membagi jumlah kasus kematian bayi sesuai dengan definisi di atas dalam kurun waktu satu tahun dengan jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu yang sama. Perhitungan AKB di Provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel III.11

**ANGKA KEMATIAN BAYI DI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2017-2021**

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kematian bayi berumur kurang dari 1tahun	Orang	1.059	1.037	919	791	844
Jumlah Kelahiran Hidup	Orang	150.220	150.624	152.680	154.733	151.060
AKB per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	Angka (per 1.000 KH)	7	6	6	5	5

Dari tabel di atas, terlihat di tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kasus kematian bayi sebanyak 53 kasus. Fenomena 2/3 kematian bayi, terjadi pada masa neonatal (0-28 hari) yang penyebabnya terbanyak adalah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia, Penyebab kematian bayi (post neonatal) adalah adanya penyakit pneumonia dan diare. Selain itu kondisi pandemi selama 2 tahun (2020 dan 2021) menyebabkan beberapa faktor yang mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan KIA diantaranya sebagian ibu atau keluarga takut untuk membawa anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga sulit untuk deteksi dini faktor resiko.

Menyikapi kondisi di atas tenaga Kesehatan di sektor KIA perlu didorong untuk lebih mengencangkan edukasi dan sosialisasi terkait dengan rencana kehamilan, kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi, terutama pada saat masa pandemi Covid-19 berlangsung. Beberapa permasalahan lainnya akan dikemukakan selanjutnya pada poin permasalahan.

3. Prevalensi Balita Stunting

Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal

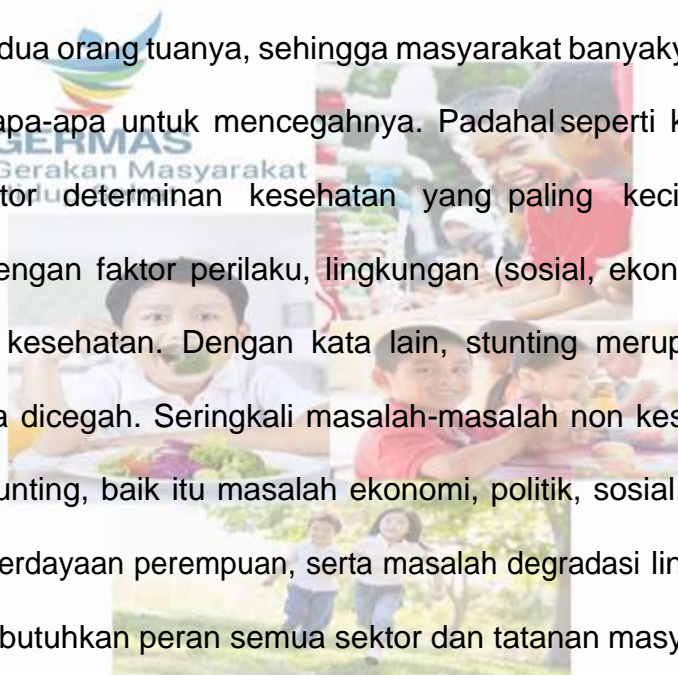
dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global.

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (Balita) akibat kekuarangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi badan anak seumurnya. (Kepmenkes RI. No.1995 tahun 2010).

Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan (genetik) dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik), dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Seringkali masalah-masalah non kesehatan menjadi akar dari masalah stunting, baik itu masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan, serta masalah degradasi lingkungan. Karena itu, kesehatan membutuhkan peran semua sektor dan tatanan masyarakat.

Prevalensi Balita Stunting di Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalami penurunan. Berdasarkan data Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, Prevalensi Stunting di Sulawesi Selatan sebesar 35,6%, mengalami penurunan menjadi 30,6% (SSGBI 2019) dan pada tahun 2021 menurun menjadi 27,4% (SSGI 2021).

Akan tetapi prevalensi balita stunting di Sulawesi Selatan masih berada di atas rata-rata nasional yaitu 24,4%. Sebaran Prevalensi Stunting di 24 Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik III.5
**PREVALENSI BALITA STUNTING
 DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**



Dari grafik di atas terlihat Kabupaten/Kota dengan prevalensi balita stunting tertinggi adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 37,9% disusul oleh Kabupaten Maros sebesar 37,5%. Sedangkan Kabupaten dengan prevalensi balita stunting terendah adalah Kota Makassar sebesar 18,8%.

Selama tahun 2021, pencegahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Oleh karena itu, Pemerintah Sulawesi Selatan mencanangkan program inovasi dalam percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting yaitu Program Gammarana “Gerakan Masyarakat Mencegah Stunting” (GAMMARA’NA) pada Hari Kesehatan Nasional ke-57 Tahun 2019. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2020 dan 2021 yaitu fokus pada 2 Kabupaten dengan kelompok sasaran utama Remaja Putri, Ibu Hamil, Bayi 0-5 bulan, Baduta usia 6-23 bulan dan keluarga/sasaran lainnya. Dalam pelaksanaannya, program Gammara’na melakukan intervensi di 17 Kabupaten lokus tahun 2021, yaitu Kabupaten Selayar, Jeneponto, Takalar, Gowa, Pangkep, Pinrang, Enrekang, Toraja Utara, Tana Toraja, Bone, Sinjai, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Makassar, Maros dan Bulukumba.

Adapun bentuk intervensinya terbagi menjadi 2 bagian yaitu :

- 1) Pemberian paket intervensi gizi kepada kelompok sasaran, terdiri dari :
 - Multivitamin untuk balita gizi kurang (kurus0 sebanyak 1.700 balita
 - Suplemen makanan bagi ibu hamil Kurang Energi Kalori (KEK) sebanyak 4.744 ibu hamil

- 2) Pendampingan dalam pemanfaatan paket intervensi gizi pada anak dan ibu hamil, yaitu sebanyak 85 orang tenaga pendamping gizi, dengan rincian sebagai berikut :
- Sebanyak 40 Petugas Gizi Pendamping ditempatkan di 40 desa lokus di Kabupaten Enrekang
 - Sebanyak 45 Petugas Gizi Pendamping ditempatkan di 45 desa lokus di Kabupaten Bone
- c. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Dari hasil evaluasi di atas, selanjutnya dipaparkan faktor penyebab keberhasilan, permasalahan dan upaya pemecahan yang dilakukan, sebagai berikut :

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini, antara lain :

1. Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota baik berupa Regulasi, anggaran (bantuan dana stimulan/DAK/Jampersal), dana bansos/sharing untuk pembiayaan pelayanan kesehatan gratis, dana tanggap bencana/KLB, dll)
2. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang bermitra dengan BPJS yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya pelaksanaan kesehatan secara merata dan mampu menciptakan akses pelayanan khususnya di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan.
3. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam penyediaan tenaga-tenaga kontrak spesialistik dan internship.
4. Adanya kelompok-kelompok UKBM (Upaya Kesehatan bersumber Masyarakat) yang melaksanakan upaya surveilans berbasis masyarakat (pemantauan penyakit, KIA, Gizi, Lingkungan dan Perilaku) dan Tingkat keaktifan kader Posyandu dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat.
5. Kemajuan Teknologi informasi yang mempermudah penyampaian pesan- pesan kesehatan, berimbas kepada meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sehingga dapat memperbanyak dan memperkuat jejaring/mitra dalam

implementasi program/kegiatan pembangunan kesehatan.

6. Adanya aplikasi pelaporan berbasis elektronik yang diharapkan dengan efektif dan cepat diperoleh data keefektifan koordinasi data dan permasalahan kesehatan di masyarakat sehingga dapat mempermudah dalam proses analisa, pengambilan solusi/keputusan dan penentuan kebijakan.
7. Upaya Penanganan Stunting Terintegrasi yang dituangkan dengan dibentuknya Tim Percepatan Penanganan Stunting Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Secara umum beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Berlangsungnya Pandemi Covid-19 selama kurang lebih 2 tahun ini mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan KIA, dimana adanya ketakutan ibu hamil dan keluarga membawa anak mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kehamilan sehingga deteksi dini terhadap ibu hamil dengan resiko tinggi tidak optimal dilaksanakan. Selain itu dalam masa Pandemi Covid-19 resiko terhadap tingkat keparahan suatu penyakit dan resiko kematian lebih tinggi khususnya bagi kelompok rentan dengan penyakit penyerta.
2. Belum semua Kabupaten/Kota membentuk Tim Audit Maternal dan Perinatal yang berperan untuk mengkaji kasus-kasus kematian Ibu dan Bayi.
3. Faktor keterlambatan pengambilan keputusan keluarga untuk mengakses pelayanan kesehatan berimbas pada terlambatnya penanganan . Selain itu adanya faktor 4 T (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat Jarak Kehamilan dan Terlalu banyak anak) yang menambah tingkat resiko tinggi kehamilan.
4. Adanya Penyakit Infeksi dan penyakit penyerta yang merupakan dampak dari kekurangan gizi dalam jangka waktu lama berpengaruh terhadap kondisi kesehatan ibu, ibu hamil dan balita. Selain itu kondisi kesehatan lingkungan sekitar yang tidak sehat juga berperan menyebabkan munculnya penyakit infeksi.
5. Faktor ekonomi yang berpengaruh pada penyediaan pangan keluarga dan pengambilan keputusan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
6. Mobilitas tenaga kesehatan yang sudah dilatih masih cukup tinggi, proses mutasi

yang sering terjadi utamanya pada Puskesmas di daerah non perkotaan, sehingga menyebabkan permasalahan sama di setiap tahun dari sisi jumlah tenaga kesehatan tidak merata secara proporsional, tugas-rangkap bagi petugas kesehatan sehingga tidak maksimal dalam menjalankan profesinya.

7. Belum optimalnya semua sektor berperan dalam program/kegiatan yang dilaksanakan untuk tujuan bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga beban tanggungjawab dirasa hanya pada OPD teknis yang bersangkutan langsung sehingga pencapaian sasaran kurang maksimal.

Upaya pemecahan yang dapat dilakukan terhadap masalah tersebut di atas

antara lain:

1. Integritas dalam penanganan Covid-19 dari semua lapisan masyarakat, Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat harus lebih maksimal melaksanakan pendisiplinan secara tegas dalam penerapan Protokol Covid-19 dan pembatasan kontak.
2. Pembentukan Tim Audit Maternal dan Perinatal di Kabupaten Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
3. Peningkatan deteksi dini dan edukasi keluarga/suami siaga.
4. Peningkatan Surveilans epidemiologi dan Gizi, peningkatan promosi kesehatan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan selama masa pandemi.
5. Intervensi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang (kurus). Selain itu pemberian stimulan baik berupa material atau pendidikan keterampilan yang mendukung terbukanya peluang kerja bagi masyarakat tidak mampu.
6. Pembatasan mutasi untuk pegawai yang sudah terlatih. Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan menganalisis kebutuhan tenaga kesehatan di daerahnya dan pelaksanaan distribusi secara proporsional
7. Sinergitas lintas program/sector terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang melibatkan program kesehatan serta perlunya

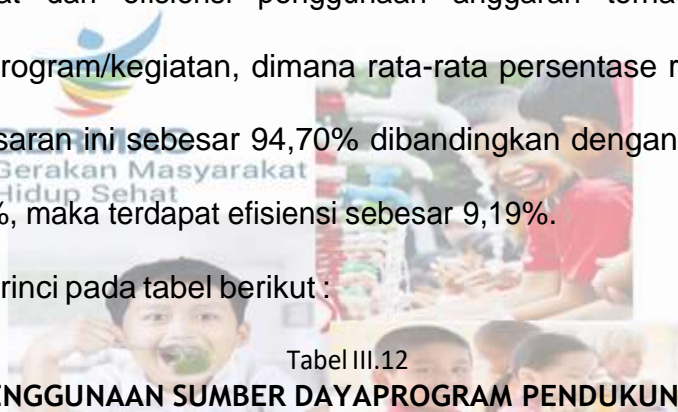
kesepakatan yang diperkuat dengan regulasi mengenai tugas dan fungsi masing-masing lintas sektor terkait dalam pelaksanaan program/kegiatan.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini sebesar Rp33.914.964.048,- dengan realisasi sebesar Rp28.661.057.042,- atau 84,51%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 87,02%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 2,99%.

Bila dilihat dari efisiensi penggunaan anggaran terhadap persentase fisik pelaksanaan program/kegiatan, dimana rata-rata persentase realisasi fisik program pendukung sasaran ini sebesar 94,70% dibandingkan dengan persentase keuangan sebesar 84,51%, maka terdapat efisiensi sebesar 9,19%.

Seperti yang terinci pada tabel berikut :



Tabel III.12

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PROGRAM PENDUKUNG SASARAN 2

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2021 (Rp)	REALISASI (Rp)	% KEU	% FISIK	EFISIENSI
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	32.871.234.048,-	27.838.671.042,-	84,69%	96,90%	12,21%
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.043.730.000,-	822.386.000,-	78,79%	92,50%	13,71%
JUMLAH		33.914.964.048,-	28.661.057.042,-	84,51%	94,70%	9,19%

e. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat didukung sebanyak 2 Program, 5 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Untuk melaksanakan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 32.871.234.048.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 27.838.671.042,- (84,69%) dan realisasi Fisik 96,90% dengan capaian indikator program sebagai berikut :

- Persentase Anak Yang Mendapat Asupan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebesar 8,5%
- Persentase Ibu Hamil Yang Mendapat Asupan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) 12,1%
- Persentase Penduduk / warga Pada Kondisi Kejadian Luar Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan (SPM) sebesar 100%
- Persentase Penduduk / warga Terdampak Pada Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (SPM) sebesar 100%
- Persentase RS Regional Yang Terbangun dan ditingkatkan sebesar 0% (progress pembangunan RS Bone sudah pada tahap pematangan lahan)
- Persentase RS Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi sebesar 70%

Kegiatan yang mendukung terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebagai berikut :

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 7.795.373.912,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 6.870.569.025,- (88,14%) dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana Dan Alkes UKP dan UKM Rujukan sebesar 100%. Pencapaian hasil ini didukung oleh 5 sub kegiatan, yaitu :

1) Pembangunan RS beserta sarana dan prasarana pendukungnya

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 4.964.204.305,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 4.165.475.963,- (83,91%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah jumlah Rumah Sakit Regional yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya sebanyak 0 unit.

Namun dapat dilaporkan bahwa progress pembangunan RS Regional Bone di tahun 2021 telah berjalan pada tahap pematangan lahan. Kegiatan dilanjutkan pada tahun berikutnya hingga direncanakan diselesaikan 100% di tahun 2023.

2) Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 589.165.895,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 589.165.895,- (100%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah jumlah alat kesehatan di Balai Pelayanan Kesehatan dan Balai Kulit Kelamin dan Kosmetika yang diadakan sebanyak 1 paket.

3) Pemeliharaan sarana fasilitas layanan kesehatan

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 507.111.372,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 476.022.622,- (93,87%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya sarana fasilitas layanan kesehatan sebanyak 1 unit.

4) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan subkegiatan ini sebesar Rp 444.841.400,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 444.841.400,- (100%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terdistribusinya obat dan vaksin sebanyak 1 paket.

5) Pengadaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya.

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 1.290.050.940,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 1.195.063.145,- (92,64%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya obat dan vaksin sebanyak 1 paket.

2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 24.945.461.336,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 20.861.710.017,- (83,63%) dan realisasi fisik 90,71%. Hasil yang dicapai adalah Cakupan layanan kesehatan UKP dan UKM Rujukan. Pencapaian hasil ini didukung oleh 10 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 3.307.252.700,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 1.420.509.400,- (42,95%) dan Realisasi Fisik 50%. Hasil yang dicapai adalah jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan kunjungan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian Covid – 19 sebanyak 12 Kabupaten/Kota, jumlah pelaksanaan OJT (On The Job Training) Pelacakan Covid-19 sebanyak 1 kali, jumlah pelaksanaan pertemuan koordinasi lintas sektor pencegahan dan pengendalian Covid - 19 tingkat Provinsi secara luring sebanyak 124 orang.

- 2) Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 179. 934.600,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 18.139.600,- (10,08%) dan Realisasi Fisik 15%. Hasil yang dicapai adalah jumlah KLB yang dilakukan penanggulangan < 24 jam sebanyak 114 kejadian.

- 3) Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 510.000.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 387.705.735,- (76,02%) dan Realisasi Fisik 85%.

Hasil yang dicapai adalah jumlah peserta pertemuan pengumpulan dan pelaporan data KIA terintegrasi di tingkat provinsi sebanyak 90 orang, jumlah

peserta surveilans kesehatan ibu anak, audit maternal perinatal surveilans response / autopsi verbal kematian ibu dan bayi bagi Kabupaten/Kota dan RS di Tingkat provinsi sebanyak 122 orang.

4) Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 14.103.103.526,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 13.740.016.966,- (97,43%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah jumlah laporan bimbingan teknis pembinaan gizi dalam rangka penanganan stunting di Sulawesi Selatan sebanyak 10 Kabupaten/Kota, jumlah peserta pelatihan pendampingan gizi di kabupaten lokus sebanyak 85 orang, jumlah pertemuan konvergensi dalam rangka penilaian kinerja pemda dalam penanganan stunting terintegrasi sebanyak 150 orang, jumlah peserta yang mengikuti pengumpulan dan pelaporan data gizi secara terintegrasi di lokus stunting sebanyak 6 lokus, jumlah tenaga pendamping gizi dalam rangka pendampingan pemanfaatan paket intervensi gizi sebanyak 85 orang, pengadaan multi vitamin bagi balita sebanyak 1.700 orang, pengadaan suplemen makanan bagi Ibu Hamil Susu Soya sebanyak 4.744 orang.

5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 360.000.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 148.247.600,- (41,23%) dan Realisasi Fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah meningkatnya pengetahuan pekerja perempuan terhadap penurunan angka stunting sebanyak 14 Kabupaten/Kota, terlaksananya orientasi pengukuran kebugaran dalam rangka pembudayaan aktivitas fisik sebanyak 59 orang.

6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 655.295.800,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 351.884.800,- (53.70%) dan Realisasi Fisik 55 %.

Hasil yang dicapai adalah jumlah monitoring dan pendampingan STMB di Kabupaten/Kota sebanyak 14 Kabupaten/Kota, jumlah laporan pemantauan kualitas air minum (PKAM) di Kabupaten/Kota sebanyak 15 Kabupaten/Kota, Jumlah peserta orientasi higienis sanitasi pangan (HSP) sebanyak 45 orang, Orientasi pemetaan pelaporan kesling terpadu sebanyak 45 orang, Orientasi Sanitasi di fasilitas kesehatan Kabupaten/Kota sebanyak 46 orang

7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 1.157.996.780,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 713.506.970,- (61.62%) dan Realisasi Fisik 65%. Hasil yang dicapai adalah jumlah sampel yang dilakukan pemeriksaan sampel paket spesimen TB sebanyak 55 sampel, jumlah jenis specimen pemeriksaan laboratorium program Hepatitis sebanyak 5 jenis, jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan program filariasis dan kecacingan sebanyak 4 kabupaten/kota, jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pemantauan pelaksanaan program ISPA sebanyak 4 Kabupaten/Kota, jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pemantauan terpadu program pencegahan dan pengendalian penyakit menular (P2PM) sebanyak 4 Kabupaten/Kota, jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis program Hepatitis sebanyak 5 Kabupaten/Kota, jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis program ISPA sebanyak 4 Kabupaten/Kota, jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis program P2 Kusta dan Frambusia sebanyak 4 Kabupaten/Kota, jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis program Vektor sebanyak 5 Kabupaten/Kota, jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis program Zoonosis sebanyak 5 Kabupaten/Kota, jumlah ODHA yang dilakukan pemeriksaan Viral ODHA sebanyak 80 orang, jumlah peserta Advokasi dan Koordinasi Lintas Sektor (LS)/Lintas Program (LP) dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit Malaria tingkat provinsi sebanyak 50 orang.

8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 90.834.500,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 34.962.500,- (38,49%) dan Realisasi Fisik 50 %. Hasil yang dicapai adalah jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pemantauan dan bimbingan teknis program Kesehatan Jiwa sebanyak 9 Kabupaten/Kota.

9) Pengelolaan Surveilans kesehatan

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 265.291.350,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 161.654.300,- (60,93%) dan Realisasi Fisik 65 %. Hasil yang dicapai adalah jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi dandidampingi perencanaan RAD program imunisasi sebanyak 2 Kabupaten/Kota, jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pemantauan pengamanan Vaksin dan *Inventory Cold Chain* sebanyak 14 Kabupaten/Kota, jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan penilaian kualitas data (DOS) sebanyak 14 Kabupaten/Kota, jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan surveilans penyakit terpadu dan PIE sebanyak 6 Kabupaten/Kota, jumlah peserta pertemuan Koordinasi KOMDA KIPi dan pembahasan Kasus KIPi sebanyak 40 orang.

10) Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp 4.315.752.080,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 3.884.902.146,- (90,02%) dan Realisasi Fisik 100 %. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya upaya pelayanan kesehatan selama 1 tahun.

3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 130.398.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 106.392.000,- (81,59%) dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah Cakupan ketersediaan data dan informasi kesehatan

dimana hasil ini didukung oleh 2 sub kegiatan, yaitu :

1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan subkegiatan ini sebesar Rp 70.398.800,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 46.392.000,- (65,90%) dan Realisasi Fisik 100 %. Hasil yang dicapai adalah jumlah data dan informasi dikumpulkandan dipublikasikan sebanyak 1 dokumen.

2) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan subkegiatan ini sebesar Rp 60.000.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 60.000.000,- (100%) dan Realisasi Fisik 100 %. Hasil yang dicapai adalah tersedianya website dengan teknologi baru sebanyak 100%.

➤ **Program Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Untuk melaksanakan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.043.730.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 822.386.000,- (78,79%) dan Realisasi Fisik 92,50% dengan capaian indikator program sebagai berikut persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS sebesar 75%.

Kegiatan yang mendukung terlaksananya Program Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

1. Advokasi, Pemberdayaan, kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 267.091.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 150.157.000,- (56,22%) dan realisasi fisik 85%. Hasil yang dicapai adalah Cakupan pelaksanaan advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat sebesar 85%, dimana hasil ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

1) Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi.

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 267.091.000,- dengan

realisasi keuangan sebesar Rp 150.157.000,- (56,22%) dan realisasi fisik 85%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya advokasi pengembangan kebijakan publik berwawasan kesehatan dan gerakan masyarakat Berprilaku Hidup Sehat di 23 Kabupaten/Kota, terlaksananya kemitraan/jejaring kerja dengan mitra potensial terkait germas sebanyak 2 kelompok.

2. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 776.639.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 672.229.000,- (86,56%) dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah Tersebarluasnya informasi PHBS di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 100%, dimana hasil ini didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu :

1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 776.639.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 672.229.000,- (86,56%) dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya orientasi gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat pada Pembina dan Kader Kesehatan tingkat provinsi sebanyak 1 kali, terlaksananya evaluasi pelaksanaan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat di Kabupaten/Kota Provinsi sebanyak 4 kali, terlaksananya konsultasi program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat terkait Germas sebanyak 1 kali, terlaksananya penggerakan masyarakat hidup sehat tingkat provinsi sebanyak 1 kali, tersosialisasinya gerakan masyarakat hidup sehat melalui kampanye lokal media cetak dan media elektronik selama 1 tahun.

✚ REALISASI ANGGARAN

Untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian intern Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di dalam pelaksanaan anggaran dilakukan beberapa hal antara lain:

- a) Monitoring tidak langsung melalui pelaporan rutin (bulanan dan triwulan).

- b) Monitoring langsung melalui pertemuan evaluasi dan monitoring yang juga dilaksanakan secara berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan).

Berikut penyajian Akuntabilitas Keuangan Dinas Kesehatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran pembangunan di bidang kesehatan :

Kondisi Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 4.476.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.462.036.900,- (77,34%), yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha, dengan perincian sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum

Dengan target pendapatan sebesar Rp 4.460.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.447.086.900,- (77,29%), terdiri atas :

- Retribusi Pelayanan Kesehatan

- ❖ UPK Balai Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan target pendapatan sebesar Rp 960.000.000,- dan realisasi Rp 714.333.700,- (74,41%)

- ❖ UPK Kulit Kelamin dan Kosmetika dengan target pendapatan sebesar Rp 3.500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 2.732.753.200,- (78,08%)

2. Retribusi Jasa Usaha

Dengan target pendapatan sebesar Rp16.200.000,- dan realisasi sebesar Rp 14.950.000,- (92,28%), terdiri atas :

- ❖ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1. Sewa Kantin satu tahun dengan target pendapatan sebesar Rp 1.800.000,- dan realisasi Rp 550.000,- (30,56%)
2. ATM Bank Sulawesi Selatanbar (BPD) satu tahun dengan target pendapatan sebesar Rp 14.400.000,- dan realisasi Rp 14.400.000,- (100%)

Situasi Anggaran Tahun 2021

Dalam pelaksanaan kegiatan dan program berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari adanya dukungan pembiayaan/penganggaran. Gambaran situasi anggaran kesehatan dan sumber pendanaan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel III.13

SITUASI ANGGARAN PADA DINAS KESEHATANPROVINSI SULAWESI SELATAN TA. 2021

NO	JENIS ANGGARAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	APBN/ Dekonsentrasi	30.202.290.000,-	28.320.605.335,-	93,77%
2.	APBD-P Provinsi	104.526.906.078,-	98.335.596.662,-	94,08%
TOTAL		134.729.196.078,-	126.656.201.997,-	94,01%

Realisasi Anggaran APBD-P Tahun 2021

Total Alokasi Anggaran Perubahan APBD (APBD-P) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 104.526.906.078,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 98.335.596.662,- (94,08%) dan realisasi fisik 97,50%.

Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasional

Alokasi anggaran belanja Operasi sebesar Rp. 98.198.923.779,- dengan realisasi sebesar Rp. 92.791.170.770,- (94,46%) dan realisasi fisik 95%. yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai, berupa Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp 66.632.553.580,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 66.162.077.977,- (99,29%) dan realisasi fisik100%.
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 29.566.370.199,- dengan realisasi keuangan Rp 24.629.092.793,- (83,30%) dan realisasi fisik 85%.
- c. Belanja Hibah ke Palang Merah Indonesia (PMI) sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.

2. Belanja Modal

Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 6.327.982.299,- terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan realisasi Keuangan sebesar Rp. 5.544.425.892,- (87,62%) dan realisasi fisik 100%, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.448.777.994,- dan realisasi keuangan Rp.1.446.357.993,- (99,83%) dan realisasi fisik 100%.
3. **Belanja Modal Gedung dan bangunan** sebesar Rp. 4.879.204.305,- dengan realisasi keuangan Rp 4.098.067.899 (83,99 %) dan realisasi fisik 100%.

Realisasi Anggaran APBN/Dekonsentrasi

Total alokasi anggaran APBN/Dekonsentrasi yang dialokasikan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp30.202.290.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 28.320.605.335,- (93,77%) dan realisasi fisik 100%, yang didukung oleh 6 Program, sebagai berikut :

1) Program Pendukung Manajemen (Satker 01)

Alokasi anggaran sebesar Rp 640.615.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 623.015.000,- (97,25%) dan realisasi fisik 100%.

2) Program Kesehatan Masyarakat (Satker 03)

Alokasi anggaran sebesar Rp 4.113.253.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 3.414.253.000,- (83,01%) dan realisasi fisik 100%.

3) Program Pelayanan Kesehatan dan JKN (Satker 04)

Alokasi anggaran sebesar Rp 1.698.624.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.538.933.200,- (90,60%) dan realisasi fisik 100%.

4) Program Pelayanan Kesehatan (Kefarmasian/Alkes) (Satker 07)

Alokasi anggaran sebesar Rp 477.788.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 437.575.000,- (91,58%) dan realisasi fisik 100%.

5) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Satker 05)

Alokasi anggaran sebesar Rp 19.721.297.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 19.178.910.835,- (97,29%) dan realisasi fisik 100%.

6) Program Pelayanan Kesehatan (Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan/PPSDMK) dan JKN (Satker 012)

Alokasi anggaran sebesar Rp 3.559.713.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 3.127.918.300,- (87,87%) dan realisasi fisik 100%.

Program Prioritas yang terdapat di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan meliputi beberapa program diantaranya Brigade Siaga Bencana, Pembangunan Rumah Sakit Regional dan Penanggulangan Stunting. Berikut capaian kinerja Program Prioritas sejak tahun 2018 – 2021 :

I. PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN KESEHATAN BRIGADE SIAGA BENCANA (BSB)

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam rangka memfasilitasi layanan evakuasi, transportasi, rujukan korban bencana dan krisis kesehatan, yang diprioritaskan pada daerah terpencil, pedalaman, pesisir dan kepulauan.

- Pelaksanaan Kegiatan :

Tahun 2018, pengadaan Ambulans Darat 5 unit dan Ambulans Laut 1 unit.

Tahun 2019, pengadaan Ambulans Darat 7 unit dan Ambulans Laut 5 unit

Tahun 2020 :

1. Pemeliharaan Ambulance Laut
2. Operasional dan Crew Kapal

- **Capaian Indikator Program :**

- a. Persentase Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan target 100% dan capaian kinerja 100%.
- b. Persentase Penduduk/Warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan dengan target 100% dan capaian kinerja 100%

II. PROGRAM PEMBANGUNAN RS REGIONAL

- **Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (Pembangunan dan Peningkatan RS Regional)**

- Pembangunan RS Regional dimaksudkan untuk mendekatkan akses layanan masyarakat dengan menempatkan pada posisi strategis maupun pada titik tertentu khususnya pada daerah lintas batas, hal ini bertujuan agar rujukan pasien secara berjenjang dan terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan secara cepat dan tepat.

- **Capaian Indikator Program :**

% Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan sebesar 17%

- Pelaksanaan Kegiatan :

Tahun 2018, dilaksanakan pekerjaan Feasibility Study dan pekerjaan Master Plan untuk untuk 2 RS yaitu RS Regional Kota Palopo dan RS Regional Kabupaten Bone.

Tahun 2019, dilaksanakan :

- Pekerjaan Feasibility Study dan pekerjaan Master Plan untuk Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Regional Kabupaten Wajo.
- Pekerjaan AMDAL untuk 3 lokasi RS yaitu RS Regional Kota Palopo, RS Regional Kabupaten Bone dan Rumah Sakit Regional Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Regional Kabupaten Wajo
- Dilaksanakan lelang pekerjaan Manajemen Konstruksi untuk RS Regional Kota Palopo dan RS Regional Kabupaten Bone.

Tahun 2020, dilaksanakan :

- Pekerjaan Perencanaan (Manajemen Konstruksi) pembangunan RS Regional Bone
- Operasional Dukungan Administrasi
- Perencanaan pembangunan Rumah Sakit Regional Bone

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Sulawesi Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 075/VIII/PEM-MoU/DISKES dan Nomor : 02/VIII/DPRD/2021 tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Rumah Sakit

Regional Kelas C Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh kesepakatan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan RS Regional Kelas C Kabupaten Bone dilaksanakan tahun Jamak yaitu Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 dengan total anggaran sebesar Rp. 98.435.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Dengan rincian pekerjaan dan besaran anggaran per tahun, yaitu :

Tahun 2021 :

- a. Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Penyiapan Lahan senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- b. Pekerjaan Penyiapan Lahan senilai Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah)
- c. Pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi Perencanaan senilai Rp. 1.650.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- d. Pengelolaan Kegiatan senilai Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)

Tahun 2022:

- a. Pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi Perencanaan senilai Rp. 1.350.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- b. Pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi senilai Rp. 1.692.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)
- c. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan RS senilai Rp. 85.219.000.000,- (Delapan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah)
- d. Pengelolaan Kegiatan senilai Rp. 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

Tahun 2023:

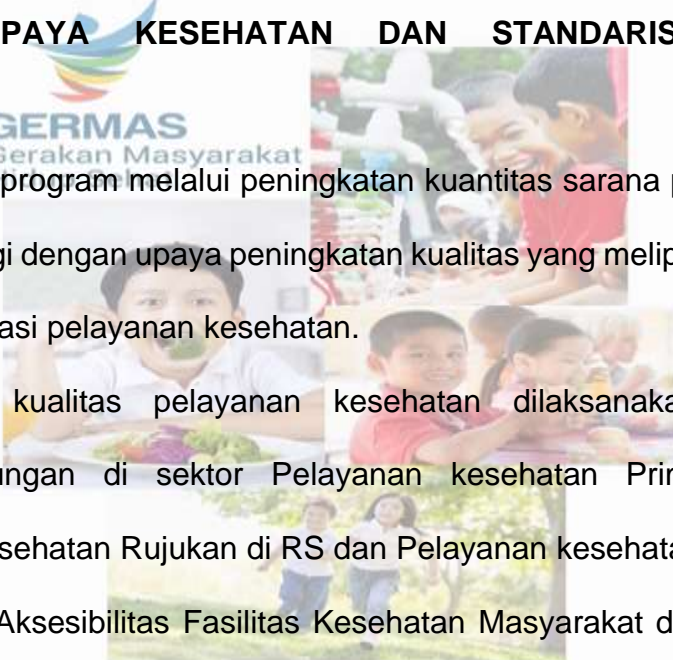
- a. Pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi senilai Rp. 423.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah)
- b. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan RS senilai Rp. 4.401.000.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Satu Juta Rupiah)

c. Pengelolaan Kegiatan senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat 4 rincian kegiatan Pembangunan RS Regional Kelas C Kabupaten Bone yang dilaksanakan secara tahun jamak (multy years) yaitu :

1. Pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi Perencanaan RS (Tahun 2021 – 2022)
2. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan RS (Tahun 2022 – 2023)
3. Pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi (Tahun 2022 – 2023)
4. Pengelolaan Kegiatan (Tahun 2021, 2022, 2023)

III. PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

- 
- Pelaksanaan program melalui peningkatan kuantitas sarana pelayanan kesehatan yang dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas yang meliputi mutu, manajemen dan standarisasi pelayanan kesehatan.
 - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dilaksanakan terintegrasi dan berkesinambungan di sektor Pelayanan kesehatan Primer di Puskesmas, Pelayanan kesehatan Rujukan di RS dan Pelayanan kesehatan Tradisional.
 - Peningkatan Aksesibilitas Fasilitas Kesehatan Masyarakat di Area Publik melalui pengembangan klinik rest area

- Pelaksanaan Kegiatan :

Tahun 2018 :

- Jumlah Puskesmas = 456 PKM, terakreditasi = 403 PKM
- Jumlah RS = 105 RS, terakreditasi = 75 RS (36 RS Pemerintah / TNI Polri, 39 RS Swasta)

Tahun 2019 :

- Jumlah Puskesmas = 459 PKM, terakreditasi = 454 PKM
- Jumlah RS = 106 RS, terakreditasi = 75 RS (36 RS Pemerintah/TNI Polri, 39 RS Swasta)

Tahun 2020, dilaksanakan kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan di UPK Balai Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulsel dan Balai Pelayanan Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetik Provinsi Sulawesi Selatan.

Tahun 2021, kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan alat kesehatan untuk klinik rest area namun tidak dilaksanakan karena menunggu kejelasan pembangunan rest area.

Capaian Indikator Program:

- Jumlah Klinik Rest Area yang berfungsi dengan target 2 klinik dan capaian kinerja 0 klinik (0%)
- Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan target 50% dan capaian kinerja 36%
- Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Penunjang dengan target 50% dan capaian kinerja 62%
- Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan target 60% dan capaian kinerja 96,8%
- Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Nasional dengan target 60% dan capaian kinerja 70%
- Persentase Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang telah menjadi BLU dengan target 75% dan capaian kinerja 75,6%

IV. PROGRAM PELAYANAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

- Upaya memperkuat komitmen rencana aksi untuk percepatan perbaikan gizi sejak 1000 hari dari masa kehamilan hingga usia dua tahun dalam rangka penanggulangan permasalahan di sektor gizi masyarakat (gizi buruk, gizi kurang, stunting, wasting, Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan anemia ibu hamil)
- Upaya penanganan gizi kurang dan Stunting melalui program HPK dimulai dari usiak Kehamilan (usia janin 370 hari dalam kandungan) dan Balita 2 tahun (730 hari setelah lahir).

- Pelaksanaan Kegiatan :

Dampak intervensi tersebut telah dapat menurunkan angka stunting di Provinsi Sulawesi Selatan dari 35,6% pada tahun 2018 menjadi 30,59% di tahun 2020 dan menurun menjadi 27,4% di tahun 2021.

Selama tahun 2021, pencegahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Oleh karena itu Pemerintah Sulawesi Selatan mencanangkan program inovasi dalam percepatan pencegahan dan Penanganan stunting yaitu Program Gammarana “Gerakan Masyarakat Mencegah Stunting” (GAMMARA’NA) pada hari Kesehatan Nasional ke-57 tahun 2019. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2020 dan 2021 yaitu fokus pada 2 Kabupaten dengan kelompok sasaran utamanya Remaja Putri, Ibu Hamil, Bayi 0-5 bulan, Baduta usia 6-23 bulan dan keluarga/sasaran lainnya. Dalam pelaksanaannya, program Gammara’na melakukan intervensi di 17 Kabupaten lokus tahun 2021, yaitu Kabupaten Selayar, Jeneponto, Takalar, Gowa, Pangkep, Pinrang, Enrekang, Toraja Utara, Tana Toraja, Bone, sinjai, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Makassar, Maros dan Bulukumba.

Adapun bentuk intervensinya adalah terbagi menjadi 2 bagian yaitu :

- 1) Pemberian paket intervensi gizi kepada kelompok sasaran, terdiri dari :
 - Multivitamin untuk balita gizi kurang (kurus sebanyak 1.700 balita
 - Suplemen makanan bagi ibu hamil Kurang Energi Kalori (KEK) sebanyak 4.744 ibu hamil
- 2) Pendampingan dalam pemanfaatan paket intervensi gizi pada anak dan ibu hamil, yaitu sebanyak 85 orang tenaga pendamping gizi, dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebanyak 40 Petugas Gizi Pendamping ditempatkan di 40 desa lokus di Kabupaten Enrekang
 - Sebanyak 45 Petugas Gizi Pendamping ditempatkan di 45 desa lokus di Kabupaten Bone

V. PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT

- Pengembangan Infrastruktur Organisasi dan Manajemen RS Pemerintah Provinsi Sulsel kearah Spesialisasi Rujukan.
- Strategi peningkatan kualitas dan fokus pelayanan pasien berdasarkan Spesialisasi, sehingga tingkat kinerja pelayanan lebih maksimal.
- Rencana Pengembangan pada 6 RS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan :
 1. RS Labuang Baji : Pusat Pelayanan Vaskuler (Vascular Center)
 2. RSKD Provinsi Sulsel (Dadi) : Pusat Pelayanan Otak dan Tulang Belakang (Brain and Spine Center)
 3. RS Haji : Pusat Pelayanan Sistem Pencernaan dan Hati (Gastrohepatologi Center)
 4. RSKDIA Siti Fatimah : Pusat Pelayanan Anak (Child Center)
 5. RSKDIA Pertiwi : Pusat Pelayanan Perempuan (Women Center)
 6. RS Sayang Rakyat : Pusat Pelayanan Jiwa

Pelaksanaan tahun 2020:

- Kegiatan Pendukung yaitu Pengembangan infrastruktur organisasi dan Manajemen Rumah Sakit.

Capaian Indikator Program :

Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi dengan target 6 unit dan capaian kinerja 0 unit.

Namun dengan terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kegiatan prioritas tersebut di atas disesuaikan dengan Nomenklatur Permendagri sehingga program prioritas tidak berdiri sendiri sebagai nama program dan pada umumnya masuk ke dalam nomenklatur **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)**. Oleh karena itu, program baru ini menjadi program prioritas karena memuat program prioritas tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah capaian beberapa indikator kinerja :

✚ INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah indikator kinerja yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis

Capaian indikator kinerja utama sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2021	SUMBER DATA
1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	70,66 Tahun	BPS (Badan Pusat Statistik)
	Angka Kematian Ibu (AKI)	129/100.000 Kelahiran Hidup	Dinkes Provinsi Sulsel (Laporan Kab/Kota)
	Angka Kematian Bayi (AKB)	5/1.000 Kelahiran Hidup	Dinkes Provinsi Sulsel (Laporan Kab/Kota)
	Prevalensi Balita Stunting	27.4 %	Survey Status Gizi Indonesia (SSGI)

✚ INDIKATOR SPM

Indikator SPM Provinsi terkait dengan penanggulangan krisis/bencana kesehatan dan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Capaian indikator SPM Provinsi adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SPM PROVINSI	CAPAIAN 2021
1	Jumlah Warga Negara yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%
2	Jumlah Warga Negara pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%

Jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan tahun 2017-2021 mencapai 100% setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah total warga terdampak krisis yang harus dilayani sebanyak 65.460 orang dan telah terlayani seluruhnya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanganan warga terdampak Krisis/Bencana/KLB diantaranya pelaporan SPM belum sesuai dengan peraturan

pelaksanaan SPM Provinsi untuk Pengelola Program Provinsi dan Kabupaten/Kota, ketenagaan kabupaten/kota sebagai pendukung dalam melakukan pengumpulan data di lapangan masih terbatas, kapasitas petugas kabupten/kota dalam melakukan pengumpulan data perlu ditingkatkan, responden/masyarakat tidak sepenuhnya memberikan data yang diperlukan dalam penanganan KLB, belum ada perhitungan kebutuhan pelayanan KLB sesuai standar dari penanggung jawab pelayanan KLB di Provinsi/Kabupaten/Kota, pelaksanaan pelayanan KLB banyak terkendala Pandemi COVID-19, Logistik yang diperlukan belum sepenuhnya cukup tersedia dalam pemberian pelayanan KLB.

Adapun tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM di Kabupaten/Kota, perlu ketersediaan Tim Penanggulangan KLB di Kabupaten/Kota yang dapat dilegalkan melalui SK Penetapan Tim peningkatan kapasitas petugas kabupaten/kota, pelayanan KLB melibatkan LS/LP terkait seperti tenaga Promkes dan lain-lain, perlu dilakukan workshop perhitungan kebutuhan pelayanan SPM, dibutuhkan dukungan anggaran pelayanan KLB dari APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi, pelayanan KLB tetap dilaksanakan pada masa Pandemi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, serta penyediaan logistik untuk mendukung pelayanan.

Khusus pelayanan dalam rangka penanggulangan COVID-19 dilakukan dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Data kasus konfirmasi COVID-19 Provinsi Sulawesi sampai tanggal 31 Desember 2021 adalah sebanyak 110.000 kasus. Pelayanan Kesehatan akibat pandemi COVID-19 dilakukan melalui kegiatan peningkatan testing, Pelacakan Kontak/Tracer, Isolasi/Karantina dan tatalaksana klinis, Penegakan Protokol Kesehatan serta pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan melibatkan banyak sektor terutama dari pihak Pemerintah Daerah dengan dukungan dari Pemerintah Pusat, unsur Forkopimda terutama TNI/Polri, LSM, pihak swasta dll. Kegiatan testing dilakukan dengan meningkatkan pengambilan sampel untuk ditest baik dari pelaksanaan skrining, maupun untuk testing dari hasil pelacakan kontak.

Sedangkan untuk kasus pelacakan kontak dilakukan dengan melibatkan TNI/Polri/Kader dan Relawan untuk membantu tenaga kesehatan di lapangan.

Untuk isolasi/karantina dilakukan secara terpusat maupun yang dilakukan secara mandiri, untuk kasus yang memerlukan isolasi pada fasilitas kesehatan telah disediakan rumah sakit rujukan untuk menampung kasus-kasus tersebut.

Upaya penanganan COVID-19 yang sementara digalakkan oleh Pemerintah adalah pelaksanaan Vaksinasi, yang capaian kumulatif dosis pertama telah mencapai target Nasional diatas 70%. Capaian tersebut didapatkan melalui dukungan dari banyaknya sektor terkait yang secara bersama-sama bergerak dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.

Adapun jumlah warga negara pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang mendapatkan layanan kesehatan tahun 2017-2021 mencapai 100% setiap tahunnya.

Pada tahun 2021, jumlah total warga terdampak krisis yang harus dilayani sebanyak 3.244 orang dan telah terlayani seluruhnya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanganan warga terdampak Krisis/Bencana/KLB diantaranya pelaporan SPM belum sesuai dengan peraturan pelaksanaan SPM Provinsi untuk Pengelola Program Provinsi dan Kabupaten/Kota, ketenagaan kabupaten/kota sebagai pendukung dalam melakukan pengumpulan data di lapangan masih terbatas, kapasitas petugas kabupten/kota dalam melakukan pengumpulan data perlu ditingkatkan, responden/masyarakat tidak sepenuhnya memberikan data yang diperlukan dalam penanganan KLB, belum ada perhitungan kebutuhan pelayanan KLB sesuai standar dari penanggung jawab pelayanan KLB di Provinsi/Kab/Kota, pelaksanaan pelayanan KLB banyak terkendala Pandemi COVID-19, Logistik yang diperlukan belum sepenuhnya cukup tersedia dalam pemberian pelayanan KLB.

Adapun tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM di Kabupaten/Kota, perlu ketersediaan Tim Penanggulangan KLB di Kabupaten/Kota yang dapat dilegalkan melalui SK Penetapan Tim peningkatan kapasitas petugas kabupaten/kota, pelayanan

KLB melibatkan LS/LP terkait seperti tenaga Promkes dan lain-lain, perlu dilakukan workshop perhitungan kebutuhan pelayanan SPM, dibutuhkan dukungan anggaran pelayanan KLB dari APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi, pelayanan KLB tetap dilaksanakan pada masa Pandemi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, serta penyediaan logistik untuk mendukung pelayanan.



INDIKATOR SDGs

Capaian indikator SDGs pada tahun 2021 sebagai berikut :

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	Target 2021	Capaian 2021
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN						
TARGET 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan						
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas kesehatan	%	87,02	97	92.97
TARGET 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro						
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas kesehatan	%	89.43	92.5	94.35
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah)	Dinas kesehatan	%	95.5	94.5	98.3
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas kesehatan	%	73	73.57	73.41

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	Target 2021	Capaian 2021
TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN						
TARGET 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun						
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas kesehatan	%	15.30	20.3	19% (SSGI, Survei Status Gizi Indonesia)
TARGET 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula						
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas kesehatan	%	30.59	24.59	27.4% (SSGI, Survei Status Gizi Indonesia)
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas kesehatan	%	17.64	27	9.94
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas kesehatan	%	70,82	79	74.60

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	Target 2021	Capaian 2021
TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA						
TARGET 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup						
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Dinas kesehatan	%	90,97	97	95.04
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas kesehatan	kematian per 100.000 kelahiran hidup	144	92/100.000 KH	129/100.000KH
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas kesehatan	%	89,43	92.5	94.35
TARGET 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000						
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas kesehatan	kematian per 1000 kelahiran hidup	991	5/1.000 KH	6/1000KH
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas kesehatan	kematian per 1000 kelahiran hidup	919	5/1.000 KH	5/1000KH
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas kesehatan	%	96,15	95.5	91.67

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	Target 2021	Capaian 2021
TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA						
TARGET 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan						
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinas kesehatan	%	3,10	7.06	4.1

3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas kesehatan	%	4,7	18.58	9.06
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Dinas kesehatan	%	4,35	10.11	2.33
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Dinas kesehatan	Kab/ Kota	18	24	24
TARGET 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membayakan						
TARGET 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional						
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas kesehatan	%	73	73.57	73.41
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Dinas kesehatan	%	17,13	18.5	21.11

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	Target 2021	Capaian 2021
TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA						
TARGET 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang						
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Dinas kesehatan	Jiwa	8.200 Jiwa	9.000 jiwa	8.484 Jiwa
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas kesehatan	%	87,02	97	92.97
TARGET 3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat						
TARGET 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua						
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas kesehatan	%	90%	90%	90%
TARGET 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil						

3.c.1*	Rasio Tenaga Kesehatan	Dinas kesehatan	Tenaga Kesehatan/100.00 penduduk	17/100.000 penduduk	23/100.000 penduduk	24/100.000 penduduk
--------	------------------------	-----------------	----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	Target 2021	Capaian 2021
Tujuan 6 : AIR BERSIH DAN SANITASILAYAK						
TARGET 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan						
21.11	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas kesehatan	Desa / Kelurahan	3,047	3.047	3.047
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas kesehatan	Desa / Kelurahan	2.070	2.000	2.863

❖ Analisis Kinerja UPT Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

UPT Dinas Kesehatan pada umumnya adalah Rumah Sakit atau instansi yang melaksanakan dan memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat. Analisis kinerja pelayanan masing-masing UPT dapat dilihat sebagaimana penjelasan berikut :

✚ RSKD DADI

Capaian indikator mutu pelayanan untuk mengukur tingkat efisiensi Rumah Sakit Dadi selama 6 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

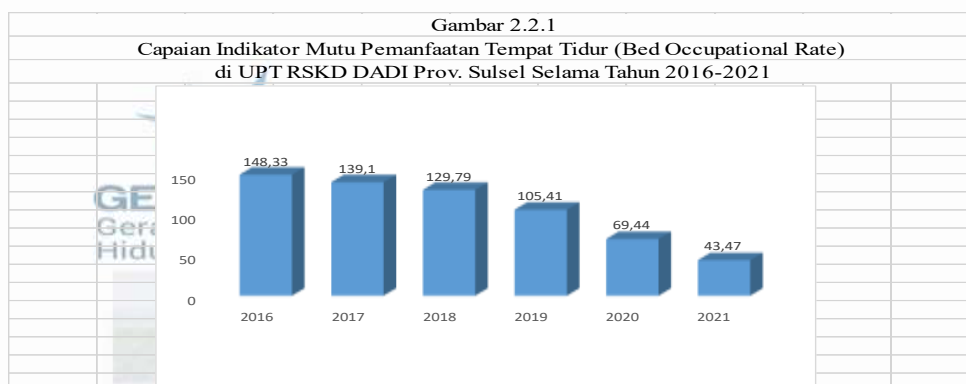
Tabel 2.2.1
Capaian Indikator Mutu Pelayanan untuk Mengukur Tingkat Efisiensi RS di UPT RSKD Dadi Prov. Sulsel Selama Tahun 2015-2020

NO	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	BOR (%)	148,33	139,10	129,79	105,41	69,44	43,47
2	LOS (Hari)	68,49	59,94	87,01	88,44	33,43	21,79
3	TOI (Hari)	-20,73	-18,65	-16,49	-2,72	20,37	39,35
4	BTO (Hari)	8,51	7,65	6,59	7,25	5,48	5,24

Sumber data : Bagian Program & Informasi, tahun 2021

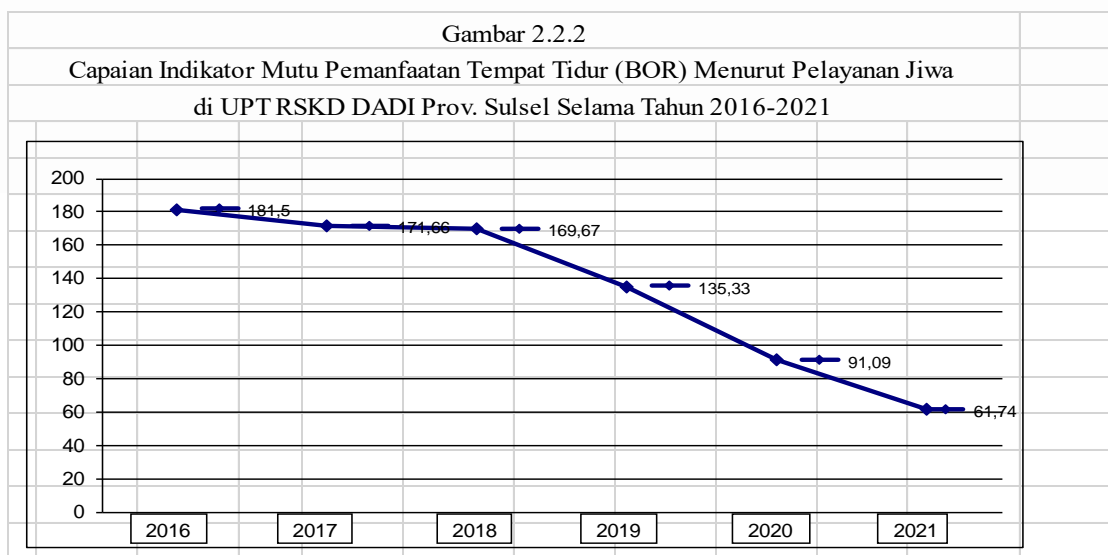
Indikator Bed Occupancy Rate (BOR), Length Of Stay (LOS), Turn Of Interval (TOI) dan Bed Turn Over (BTO) merupakan indikator yang menggambarkan mutu pelayanan dari tingkat efisiensi Rumah Sakit melalui pemanfaatan tempat tidur dan lama hari perawatan seseorang. Berdasarkan data di atas, nampak bahwa secara garis besar mutu pelayanan di UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan masih perlu ditingkatkan khususnya pelayanan kesehatan jiwa.

Gambaran trend indikator BOR Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :



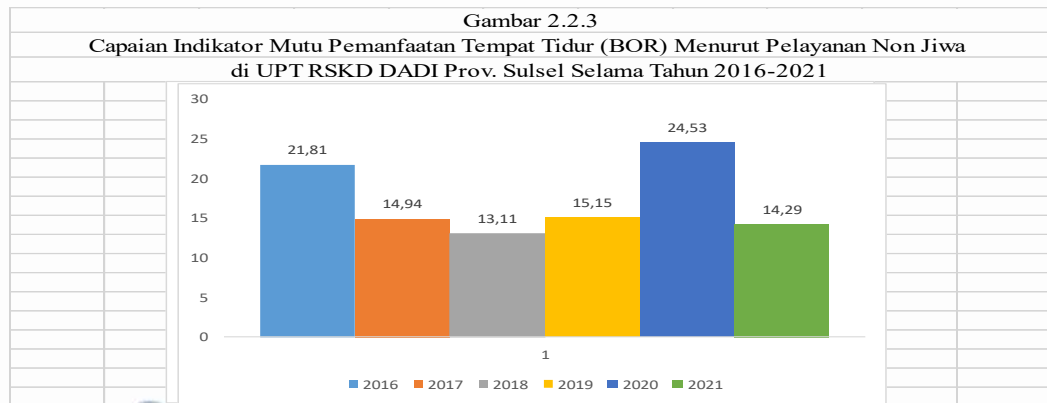
Sumber data : Bagian Program & Informasi Tahun 2021

Rata-rata indikator pemanfaatan tempat tidur di UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan selama 6 tahun terakhir cenderung menurun. Kecenderungan tersebut belum menunjukkan makna yang berarti dalam dimensi mutu pelayanan. Kondisi ini nampak jelas keberadaannya pada masing-masing pelayanan yang diberikan. Adapun capaian indikator mutu untuk masing-masing pelayanan baik jiwa maupun non jiwa sebagai berikut :



Sumber data : Bagian Program & Informasi Tahun 2021

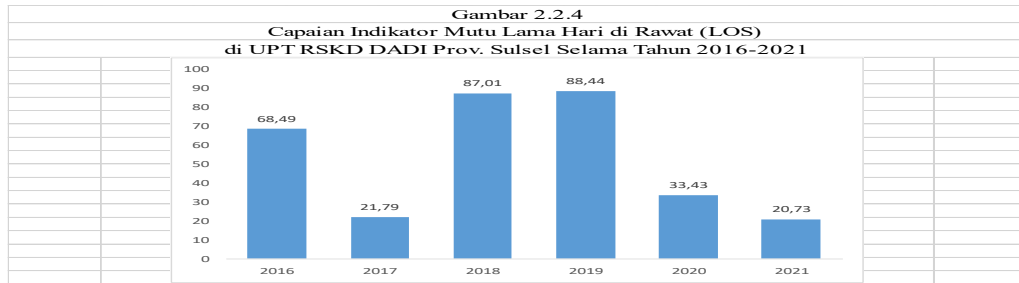
Indikator mutu pelayanan jiwa selama tahun 2016 hingga 2021 cenderung menurun. Hal ini tercermin pada angka pemanfaatan tempat tidur dari 181,5% menjadi 61,74%. Kecenderungan tersebut disebabkan oleh karena masih banyak penderita gangguan jiwa yang telah tenang namun tetap berada di dalam perawatan rumah sakit, sehingga jumlah pasien yang dilayani tidak sebanding dengan jumlah tempat tidur.



Sumber data : Bagian Program & Informasi Tahun 2021

Bed Occupancy Rate (BOR) adalah tingkat pemanfaatan tempat tidur di Rumah Sakit. BOR ideal yaitu 60–85 %, yang artinya pemakaian tempat tidur untuk periode satu tahun belum memadai. Kondisi ini menggambarkan Banyak pasien jiwa yang mengendap di rumah sakit sehingga jumlah pasien tidak sesuai dengan jumlah tempat tidur yang tersedia. Sementara indikator mutu pelayanan non jiwa juga mengalami peningkatan karena cenderung meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Meningkatnya indikator BOR ini disebabkan karena tempat tidur yang tersedia sudah dimanfaatkan sepenuhnya. Salah satu penyebab kondisi ini adalah tercukupinya jumlah tenaga keperawatan yang ada di UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan.

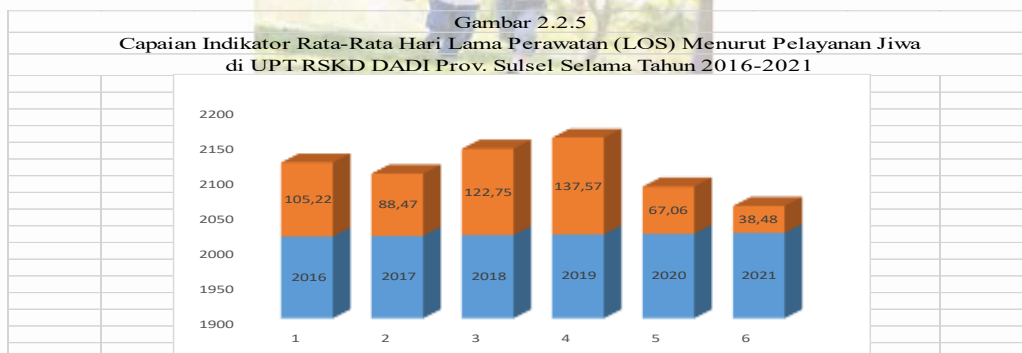
Indikator mutu lainnya adalah indikator lama hari dirawat atau Length of Stay (LOS) seorang penderita. Indikator lama hari dirawat pada UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Sulawesi Selatan selama 6 tahun terakhir cenderung meningkat dari 68,49 hari di tahun 2016 menjadi 21,79 hari di tahun 2021 seperti pada grafik berikut ini :



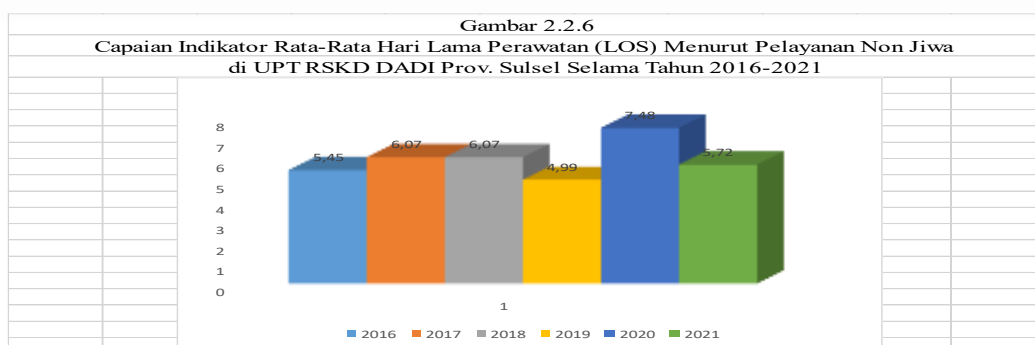
Sumber data : Bagian Program & Informasi Tahun 2021

Indikator LOS ini menunjukkan bahwa indikator lama hari di rawat belum menunjukkan mutu yang baik. Kondisi ini nampak pada lama hari dirawat pada masing-masing pelayanan baik pelayanan jiwa dan non jiwa.

Capaian rata-rata lama hari dirawat selama tahun 2016-2021 pada pelayanan jiwa cenderung menurun dari 105,22 hari menjadi 41,85 hari. Hal ini disebabkan karena terintegrasinya Jaminan Kesehatan Daerah (Kesehatan Gratis) dengan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) dimana sebelumnya penderita gangguan jiwa dapat dipulangkan setiap dua bulan sekali namun dengan program BPJS maka hitungan hari perawatan menjadi minimal 45 hari dan maksimal 180 hari. Disamping itu, banyak penderita gangguan jiwa yang sebenarnya telah layak pulang namun tidak dijemput oleh keluarga sehingga tetap tercatat sebagai pasien rawat inap serta kurangnya frekuensi *dropping* pasien dan *home visit*.



Sumber data : Bagian Program & Informasi Tahun 2021

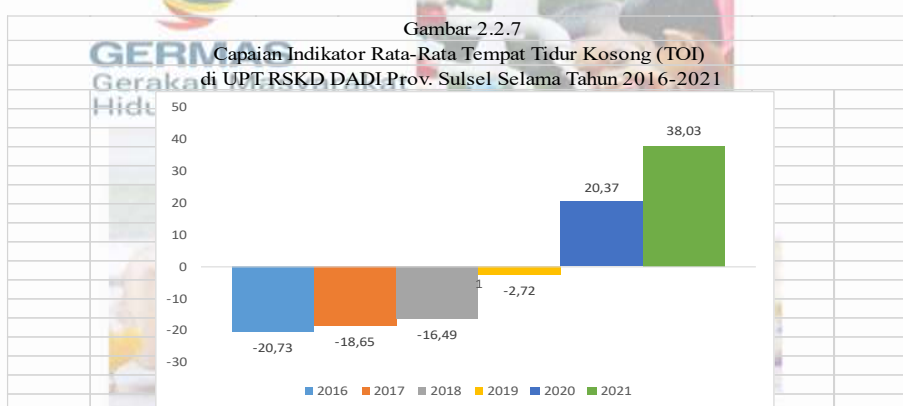


Sumber data : Bagian Program & Informasi Tahun 2021

Lenght Of Stay (LOS) adalah tingkat lamanya perawatan pasien. Lama dirawat untuk penderita jiwa berbeda dengan lama dirawat penderita non jiwa (fisik). Jika mengacu pada standar pelayanan minimal rawat inap untuk pasien jiwa adalah ≤ 6 minggu atau kurang lebih 45 hari.

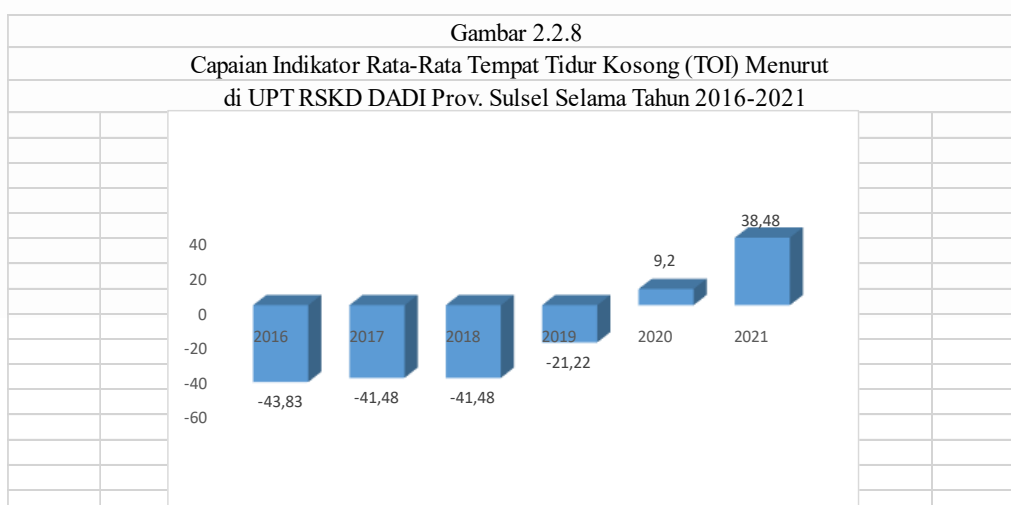
Sementara capaian rata-rata lama hari dirawat selama tahun 2016-2021 pada pelayanan non jiwa cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian mutu pelayanan non jiwa telah menunjukkan pelayanan yang sesuai standar.

Untuk pencapaian mutu pelayanan Turn Over Internal (TOI) atau rata-rata interval tempat tidur kosong selama tahun 2021 pada UPT. Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber data : Bagian Program & Informasi Tahun 2021

Sementara gambaran rata-rata tempat tidur kosong untuk masing-masing jenis pelayanan sebagai berikut :

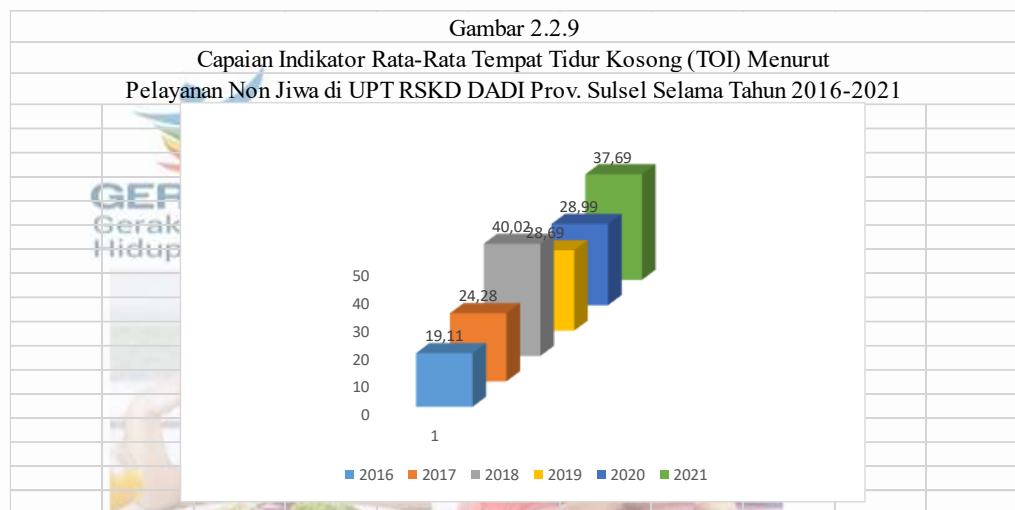


Sumber data : Bagian Program & Informasi Tahun 2021

Nilai negatif tersebut mengindikasikan bahwa tempat tidur untuk pasien jiwa tidak pernah kosong. Rata-rata dalam waktu kurang 41 hari, tempat tidur terisi lagi (ada pasien lain) meskipun masih digunakan oleh pasien sebelumnya. Artinya jumlah tempat tidur yang tersedia lebih sedikit dari jumlah pasien jiwa yang dirawat inap.

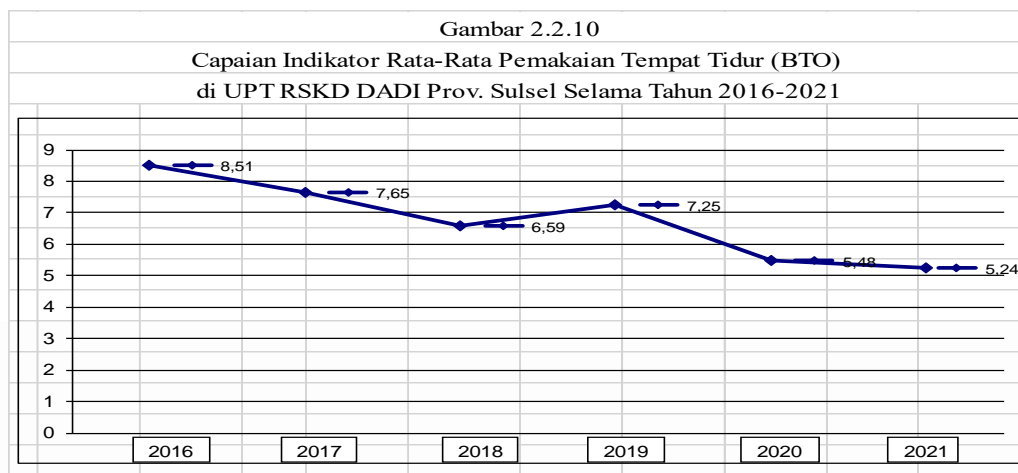
Selain itu, rata-rata lama hari rawat pasien jiwa juga panjang sehingga ketika seorang pasien belum sembuh tapi sudah ada lagi pasien yang masuk untuk dirawat inap.

Sementara untuk pelayanan non jiwa, situasi tempat tidur kosong rata-rata pada setiap 40 hari tampak pada grafik berikut ini :



Sumber data : Bagian Program & Informasi Tahun 2021

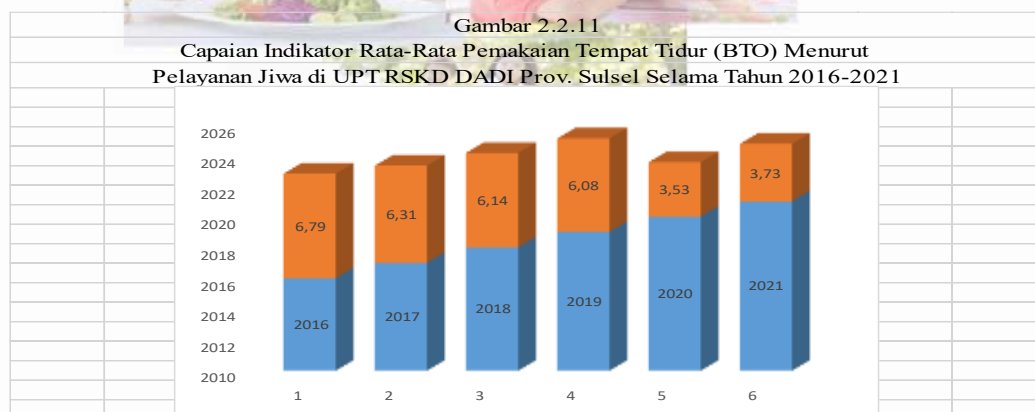
Turn Of Interval (TOI) adalah tingkat hari tempat tidur tidak ditempati dari saat ke saat sampai terisi berikutnya. TOI di UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan nampak bahwa interval waktu penggunaan tempat tidur mulai dari tempat tidur kosong sampai terisi kembali cenderung meningkat dengan nilai negative (baca : tidak ada interval). Artinya untuk pelayanan jiwa tidak pernah ada kekosongan tempat tidur, karena jumlah tempat tidur dengan jumlah pasien yang dirawat tidak seimbang.



Sumber data : Bagian Program & Informasi Tahun 2021

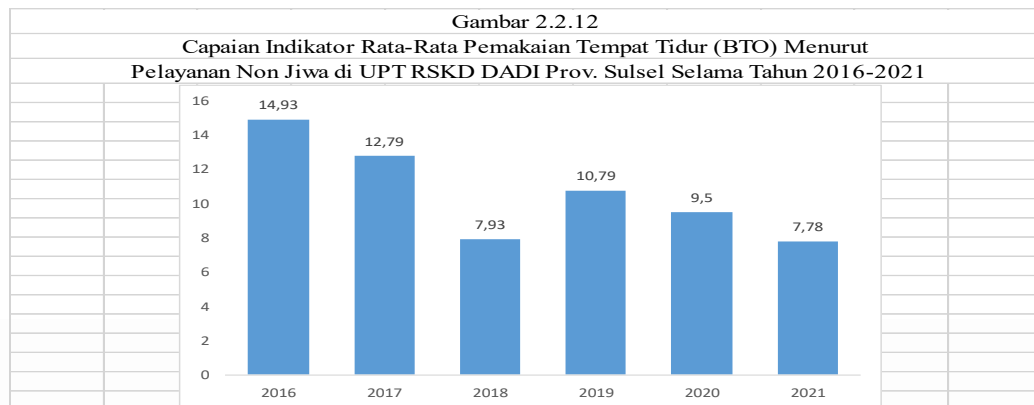
Untuk indikator mutu *Bed Turn Over* (BTO) atau frekuensi rata-rata pemakaian tempat tidur selama 6 tahun terakhir di UPT. Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan cenderung menurun dari 8,51 kali tahun 2016 menjadi 5,24 kali tahun 2021. Artinya dalam 1 tahun rata-rata satu unit tempat tidur hanya digunakan sebanyak 2 atau 3 kali.

Jika dilihat secara terpisah maka rata-rata frekuensi pemakaian tempat tidur untuk pelayanan jiwa dan pelayanan non jiwa cenderung menurun selama tahun 2021.



Sumber data : Bagian Program & Informasi Tahun 2021

Frekuensi pemakaian tempat tidur untuk pelayanan jiwa menurun 6.79 kali pada tahun 2016 menjadi 3.73 kali pada tahun 2021. Demikian juga halnya dengan rata-rata frekuensi pemakaian tempat tidur untuk pelayanan non jiwa cenderung menurun dari 14,93 kali pada tahun 2016 menjadi 7,78 kali pada tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa frekuensi pemakaian tempat tidur di UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan dari Provinsi Sulawesi Selatan belum bermutu. Situasi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber data : Bagian Program & Informasi Tahun 2021

Bed Turn Over (BTO) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur rumah sakit. Sebagai rumah sakit khusus pelayanan jiwa maka frekuensi rata-rata pemakaian tempat tidur/tahun cenderung menurun dengan rata-rata pemakaian 1 tempat tidur 4 kali per tahun.

Untuk capaian indikator mutu pelayanan medis (outcome) di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2016-2021 sebagai berikut:

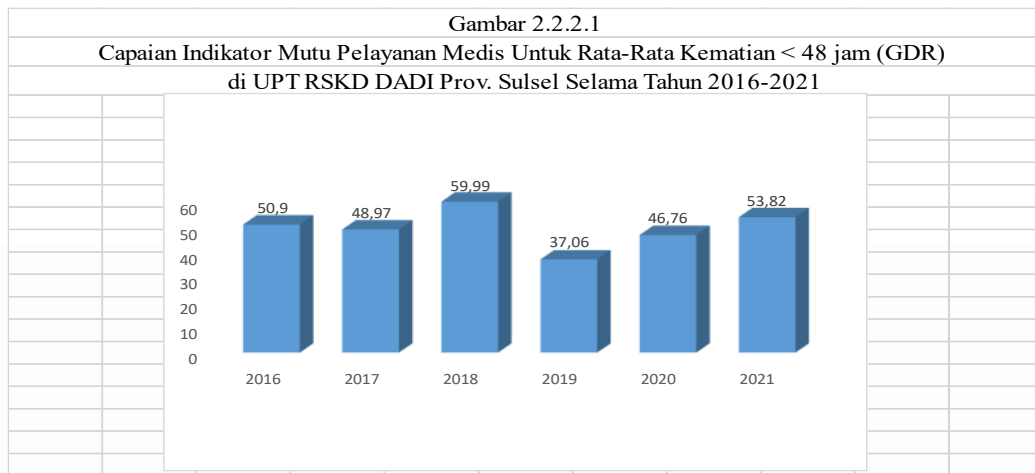
Gambar 2.2.2
Capaian Indikator Mutu Pelayanan Medis (Outcome) di UPT RSKD Dadi Prov. Sulsel Selama Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	GDR (%) < 48 jam	50,90	48,97	59,99	37,06	46,76	53,82
2	NDR (%) < 48 jam	36,75	35,27	47,30	23,98	9,04	44,81

Sumber data : Bagian Program & Informasi Tahun 2021

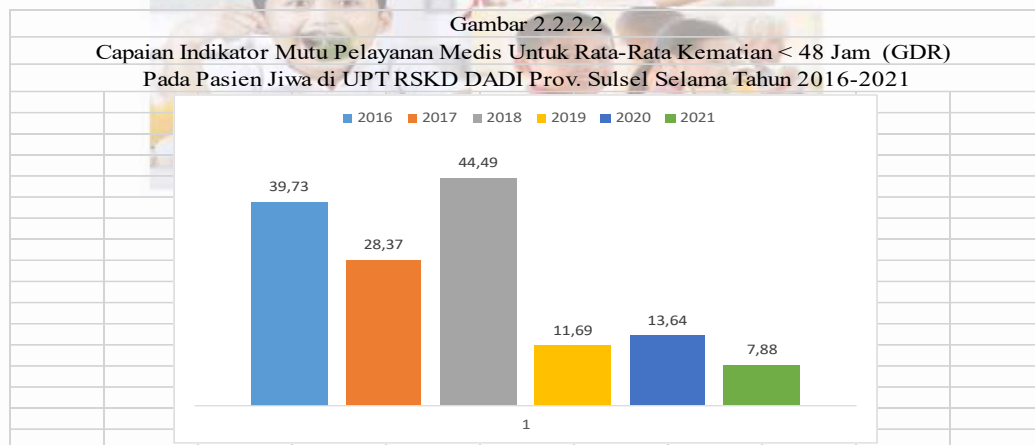
Gross Death Rate (GDR) dan **Net Death Rate** (NDR) merupakan indikator yang menggambarkan mutu pelayanan di ruang perawatan baik yang dirawat < 48 jam maupun yang dirawat > 48 jam. Tabel 2.2.2 menunjukkan bahwa mutu pelayanan medis di UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan juga masih membutuhkan perbaikan-perbaikan dalam rangka menurunkan angka kematian di Rumah Sakit. Kondisi tersebut nampak pada angka GDR dimana terlihat bahwa jumlah kematian di bagian Gawat Darurat relatif meningkat dari 50,90 % tahun 2016 menjadi 53,82 % tahun 2021, demikian juga untuk angka NDR menjadi meningkat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain, peralatan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Situasi rata-rata NDR selama tahun 2016-2021 sebagai berikut :



Sumber data : Bagian Program & Informasi Tahun 2021

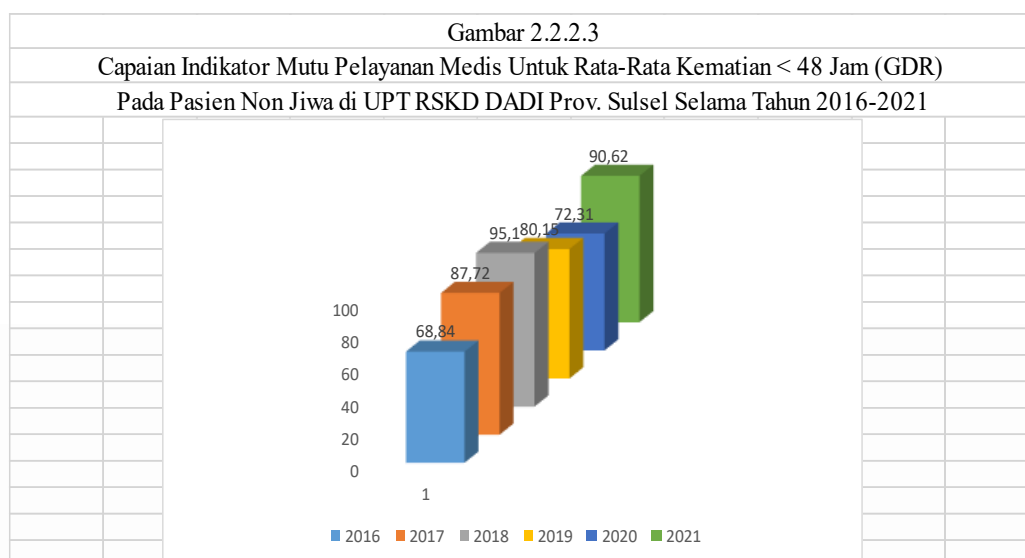
Sementara indikator mutu pelayanan medis untuk GDR menurut masing-masing jenis pelayanan baik pelayanan jiwa maupun non jiwa dapat dijelaskan bahwa rata-rata indikator GDR untuk pelayanan jiwa dalam 6 tahun terakhir cenderung menurun dari 39,73 % di tahun 2016 menjadi 7,88 di tahun 2021. Situasi tersebut seperti pada grafik berikut ini :



Sumber data : Bagian Program & Informasi Tahun 2021

Artinya dalam 1000 penderita jiwa yang dirawat inap, terdapat 44 orang yang meninggal dalam waktu < 48 jam atau dalam 100 penderita jiwa yang dirawat inap terdapat 4 orang yang meninggal dalam waktu < 48 jam (2 hari) selama setahun.

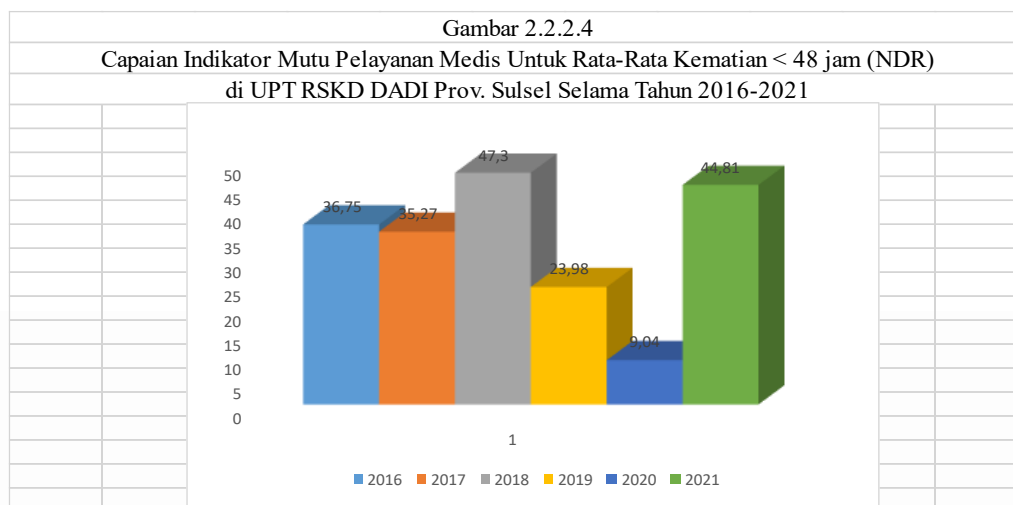
Sedangkan indikator mutu pelayanan medis GDR pada pelayanan non jiwa juga cenderung meningkat dalam 6 tahun terakhir dari 48,80% tahun 2016 menjadi 72,31% tahun 2021 sebagaimana nampak pada grafik berikut ini :



Sumber data : Bagian Program & Informasi Tahun 2021

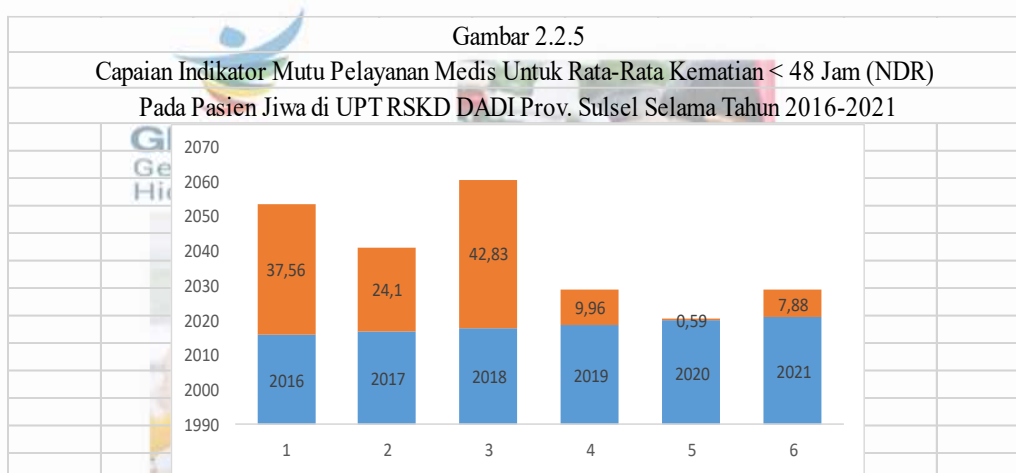
Gross Death Rate (GDR) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar (Depkes RI.2005), Sedangkan **Net Death Rate (NDR)** adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (Depkes RI.2005). Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di Rumah Sakit.

Situasi rata-rata NDR selama tahun 2016-2021 juga cenderung meningkat dari 36,75 % di tahun 2016 menjadi 44,81 % di tahun 2021 sebagaimana terlihat pada gambar 2.2.2.4. Indikator mutu pelayanan medis untuk NDR menurut masing-masing jenis pelayanan baik pelayanan jiwa maupun pelayanan non jiwa dapat dijelaskan bahwa rata-rata indikator NDR untuk pelayanan jiwa dalam 6 tahun terakhir cenderung menurun dari 37,56 % di tahun 2016 menjadi 7,88 % di tahun 2021. Artinya dalam 1000 penderita jiwa yang dirawat inap selama setahun terdapat 42 orang yang meninggal dalam waktu < 48 jam atau dalam 100 penderita jiwa yang dirawat inap terdapat 3 orang yang meninggal dalam waktu > 48 jam (2 hari).

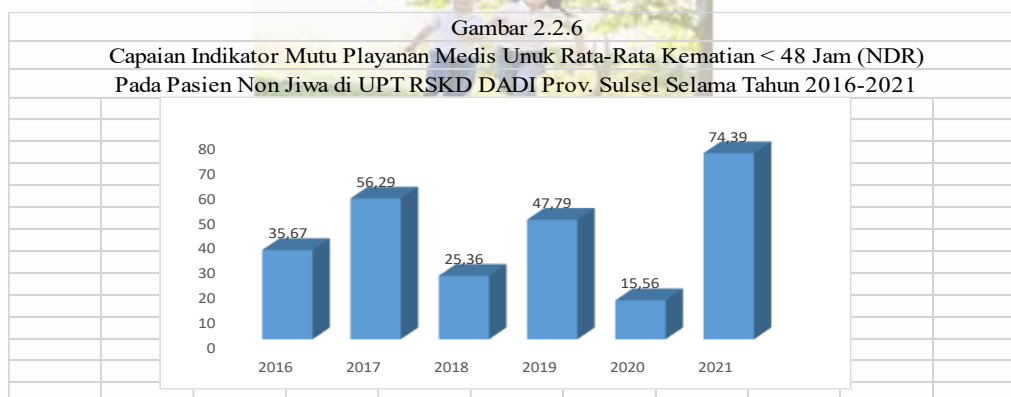


Sumber data : Bagian Program & Informasi Tahun 2021

Situasi NDR menurut masing-masing pelayanan seperti pada grafik berikut ini :



Sumber data : Bagian Program & Informasi Tahun 2021



Sumber data : Bagian Program & Informasi Tahun 2021

Sedangkan indikator mutu pelayanan medis NDR pada pelayanan non jiwa cenderung meningkat dalam 6 tahun terakhir dari 35,67 % tahun 2016 menjadi 74,39 % tahun 2021 sebagaimana nampak pada gambar 2.2.6. Capaian mutu pelayanan secara proses maupun secara outcome dipengaruhi oleh kunjungan pengguna jasa pelayanan kesehatan baik kunjungan rawat jalan maupun kunjungan rawat inap.

Pencapaian kinerja pelayanan RSKDIA Pertiwi dapat dilihat pada tabel TC.30 berikut :

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-3)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-3)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT													
	a. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	b. Jam buka pelayanan gawat darurat (kabupaten/kota)	24 jam		24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam		
	c. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%		75%	90%	100%	100%	100%	75%	76%	100%	100%		
	d. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 Tim		1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	2 Tim		
	e. Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat	≤ 5 menit		≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit	100%	100%	≤ 5 menit	≤ 5 menit		
	f. Kepuasan pelanggan pada gawat darurat	≤70%		75%	80%	80%	80%	80%	82,61%	83%	80%	90%		
	g. Kematian pasien < 24 jam di gawat darurat	≤ 2‰		4 ‰	3 ‰	2 ‰	2 ‰	2 ‰	0‰	0‰	2 ‰	2 ‰		
	h. Tidak ada keharusan untuk membayar uang muka	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN													
	Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis	100% spesialis		100% spesialis	100% spesialis	100% spesialis	100% spesialis	100% spesialis	100% spesialis	100% spesialis	100% spesialis	100% spesialis		
	Ketersediaan pelayanan rawat jalan	a. Klinik anak b. Klinik Penyakit dalam c. Klinik Kebidanan d. Klinik Bedah		6 klinik	7 klinik	8 klinik	8 klinik	8 klinik	6 klinik	6 klinik	8 klinik	9 klinik		
	Jam buka pelayanan	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 s/d 11.00		08.00 s/d 12.00 setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 s/d 10.30	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 s/d 11.00	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 s/d 11.00	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 s/d 11.00	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 s/d 11.00	100%	100%	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 s/d 11.00	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 s/d 11.00		
	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit		60 menit	≤60 menit	≤60 menit	≤60 menit	≤60 menit	100%	100%	≤60 menit	≤60 menit		
	Kepuasan pelanggan pada rawat jalan	≥ 90%		75%	80%	80%	80%	80%	82,61%	83%	80%	80%		
3	PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP													
	Pemberi pelayanan rawat inap	dokter spesialis dan perawat minimal pendidikan D3		dokter spesialis dan perawat minimal pendidikan D3	dokter spesialis dan perawat minimal pendidikan D3	dokter spesialis dan perawat minimal pendidikan D3	dokter spesialis dan perawat minimal pendidikan D3	dokter spesialis dan perawat minimal pendidikan D3	100%	100%	dokter spesialis dan perawat minimal pendidikan D3	dokter spesialis dan perawat minimal pendidikan D3		
	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-3)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-3)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13			
	Ketersediaan pelayanan rawat inap	100%		15 ruang	15 ruang	15 ruang	15 ruang	15 ruang	31 ruang	31 ruang	15 ruang	16 ruang	15 ruang			
	Jam visite dokter spesialis	08.00 s.d 14.00 setiap hari kerja		08.00 s.d 14.00 setiap hari kerja	08.00 s.d 14.00 setiap hari kerja	08.00 s.d 14.00 setiap hari kerja	08.00 s.d 14.00 setiap hari kerja	08.00 s.d 14.00 setiap hari kerja	99,92%	99,92%	08.00 s.d 14.00 setiap hari kerja	08.00 s.d 14.00 setiap hari kerja	08.00 s.d 14.00 setiap hari kerja			
	Kejadian infeksi pasca operasi	≤1,5%		0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	2,74%	2,30%	0,50%	0,50%	0,50%			
	Angka kejadian infeksi nosokomial	≤1,5%		0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	1,06%	1,04%	0,02%	0,02%	0,02%			
	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat/kematian	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	Kematian pasien > 48 jam	0,24%		0,40%	0,30%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	0%	0%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%			
	Kejadian pulang paksa	5%		1%	1%	1%	1%	1%	0%	0%	1%	1%	1%			
	Kepuasan pelanggan rawat inap	≥ 90%		75%	80%	80%	80%	80%	82,61%	83%	80%	80%	80%			
4	PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN BEDAH SENTRAL															
	a. Waktu tunggu operasi elektif	≤2 hari		1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	100%	100%	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari			
	b. Kejadian kematian di meja operasi	≤1%		1%	1%	1%	1%	1%	0%	0%	1%	1%	1%			
	c. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	d. Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	e. operasi Tidak adanya kejadian salah tindakan pada	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	f. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	g. Komplikasi anestesi karena over dosis, reaksi anestesi dan	≤ 6%		1%	1%	1%	1%	1%	0%	0%	1%	1%	1%			
5	PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN PERSALINAN DAN PERINATOLOGI															
	a. Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Perdarahan ≤1 % b. Pre-eklampsia ≤30 % c. Sepsis ≤0,2 %		a. Perdarahan ≤1% b. Pre-eklampsia ≤30% c. Sepsis ≤0,2%	a. Perdarahan ≤1% b. Pre-eklampsia ≤30% c. Sepsis ≤0,2%	a. Perdarahan ≤1% b. Pre-eklampsia ≤30% c. Sepsis ≤0,2%	a. Perdarahan ≤1% b. Pre-eklampsia ≤30% c. Sepsis ≤0,2%	a. Perdarahan ≤1% b. Pre-eklampsia ≤30% c. Sepsis ≤0,2%	0%	0%	a. Perdarahan ≤1% b. Pre-eklampsia ≤30% c. Sepsis ≤0,2%	a. Perdarahan ≤1% b. Pre-eklampsia ≤30% c. Sepsis ≤0,2%	a. Perdarahan ≤1% b. Pre-eklampsia ≤30% c. Sepsis ≤0,2%			
	b. Pemberi pelayanan persalinan normal	a. Dokter Sp. OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan		a. Dokter Sp. OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan	a. Dokter Sp. OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan	a. Dokter Sp. OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan	a. Dokter Sp. OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan	a. Dokter Sp. OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan	100%	100%	a. Dokter Sp. OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan	a. Dokter Sp. OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan	a. Dokter Sp. OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan			
	c. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK yang terlatih		Tim PONEK yang terlatih	Tim PONEK yang terlatih	Tim PONEK yang terlatih	Tim PONEK yang terlatih	Tim PONEK yang terlatih	100%	100%	Tim PONEK yang terlatih	Tim PONEK yang terlatih	Tim PONEK yang terlatih			
	d. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	a. Dokter Sp. OG b. Dokter Sp. A c. Dokter Sp. An		a. Dokter Sp. OG b. Dokter Sp. A c. Dokter Sp. An	a. Dokter Sp. OG b. Dokter Sp. A c. Dokter Sp. An	a. Dokter Sp. OG b. Dokter Sp. A c. Dokter Sp. An	a. Dokter Sp. OG b. Dokter Sp. A c. Dokter Sp. An	a. Dokter Sp. OG b. Dokter Sp. A c. Dokter Sp. An	100%	100%	a. Dokter Sp. OG b. Dokter Sp. A c. Dokter Sp. An	a. Dokter Sp. OG b. Dokter Sp. A c. Dokter Sp. An	a. Dokter Sp. OG b. Dokter Sp. A c. Dokter Sp. An			

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-3)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-3)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	e. Kemampuan menangani BBLR 1.500 gr - 2.500 gr	100%		90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	f. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20 %		20%	20%	≤19%	≤19%	≤19%	24%	25%	≤19%	≤19%	≤19%	
	g. Keluarga Berencana Mantap dilakukan oleh Sp. OG	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	h. Konseling KB Mantap	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	i. Kepuasan pelanggan	≥ 80%		75%	80%	80%	80%	80%	82,61%	83%	80%	80%	80%	
6	PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN INTENSIF													
	a. Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤3%		0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0%	0%	0,20%	0,20%	0,20%	
	b. Pemberi pelayanan unit intensif	a. Dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani b. 100% Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU /setara		a. Dokter Sp. An dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani, b. 90% perawat D3 yang terlatih	a. Dokter Sp. An dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani, b. 90% perawat D3 yang terlatih	a. Dokter Sp. An dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani, b. 100% perawat D3 yang terlatih	a. Dokter Sp. An dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani, b. 100% perawat D3 yang terlatih	a. Dokter Sp. An dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani, b. 100% perawat D3 yang terlatih	100%	100%	a. Dokter Sp. An dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani, b. 100% perawat D3 yang terlatih	a. Dokter Sp. An dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani, b. 100% perawat D3 yang terlatih	a. Dokter Sp. An dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani, b. 100% perawat D3 yang terlatih	
7	PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI													
	a. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤3 jam		1-2 jam	1-2 jam	1-2 jam	1-2 jam	1-2 jam	100%	100%	1-2 jam	1-2 jam	1-2 jam	
	b. Pelaksana ekspertisi hasil	Dokter Sp. Rad		Dokter Sp. Rad	Dokter Sp. Rad	Dokter Sp. Rad	Dokter Sp. Rad	Dokter Sp. Rad	Dokter Sp. Rad	Dokter Sp. Rad	Dokter Sp. Rad	Dokter Sp. Rad	Dokter Sp. Rad	
	c. Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	Kerusakan foto ≤2%		2%	2%	2%	2%	2%	0%	0%	2%	2%	2%	
	d. Kepuasan pelanggan	≥80 %		75%	80%	80%	80%	80%	82,61%	83%	80%	80%	80%	
8	PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK													
	a. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium.	≤140 menit		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp. PK		Dokter Sp. PK	Dokter Sp. PK	Dokter Sp. PK	Dokter Sp. PK	Dokter Sp. PK	100%	100%	Dokter Sp. PK	Dokter Sp. PK	Dokter Sp. PK	
	c. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	d. Kepuasan pelanggan	≥80%		75%	80%	80%	80%	80%	82,61%	83%	80%	80%	80%	
9	PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIK													
	a. Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan	≤ 50%		100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	
	b. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%			80%	80%	100%	
	c. Kepuasan pelanggan	≥ 80%		80%	80%	80%	80%	80%			100%	100%	80%	

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-3)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-3)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	
10	PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN FARMASI													
	a. Waktu tunggu obat jadi	≤ 30 menit		5 - 10 menit	5 - 10 menit	5 - 10 menit	5 - 10 menit	5 - 10 menit	0,01%	0,01%	5 - 10 menit	5 - 10 menit	5 - 10 menit	
	b. Waktu tunggu obat racikan	≤ 60 menit		10 - 15 menit	10 - 15 menit	10 - 15 menit	10 - 15 menit	10 - 15 menit	0,01%	0,01%	10 - 15 menit	10 - 15 menit	10 - 15 menit	
	c. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%		100%	100%	100%	100%	100%	0,01%	0,01%	100%	100%	100%	
	d. Kepuasan pelanggan	≥ 80%		75%	80%	80%	80%	80%	82,61%	83%	80%	80%	80%	
	e. Penulisan resep sesuai formularian	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	f. Waktu tunggu obat jadi	≤ 30 menit		5 - 10 menit	5 - 10 menit	5 - 10 menit	5 - 10 menit	5 - 10 menit	0,01%	0,01%	5 - 10 menit	5 - 10 menit	5 - 10 menit	
11	PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN PELAYANAN GIZI													
	a. Ketepatan waktu pemberian	≥90%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5-10 menit	5-10 menit	100%	
	b. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20%		10%	10%	10%	10%	10%	0,10%	0,10%	10-15 Menit	10-15 Menit	10%	
	c. Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN KELUARGA MISKIN													
	a. Pelayanan terhadap pasien Gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN REKAM MEDIK													
	a. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	87%	87,50%	100%	100%	100%	
	b. Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%		100%	100%	100%	100%	100%	83%	85%	100%	100%	100%	
	c. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 10 menit		≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	100%	100%	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	
	d. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 15 menit		≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	100%	100%	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	
14	PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH													
	a. Baku mutu limbah cair	a. BOD < 30 mg/l, b. COD < 80 mg/l, c. TSS < 30 mg/l, d. PH 6 -9		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-3)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (tnn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-3)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		
15	PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN														
	a. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi	100%		96%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	b. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	c. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	d. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	e. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun	≥ 60%		55%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	79,40%	86%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%		
	f. Cost recovery	≥ 40%		55%	56%	57%	57%	57%	73,80%	73,80%	57%	57%	57%		
	g. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	h. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien	≤ 2 jam		1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	100%	100%	1 jam	1 jam	1 jam		
	i. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
17	PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN AMBULANS / KERETA JENAZAH														
	a. Waktu pelayanan ambulans/kereta jenazah	24 jam		24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	100%	100%	24 jam	24 jam	24 jam		
	b. Kecepatan memberikan pelayanan ambulans/kereta jenazah di rumah sakit	≤ 230menit		≤ 230 menit	≤ 230 menit	≤ 230 menit	≤ 230 menit	≤ 230 menit	100%	100%	≤ 230 menit	≤ 230 menit	≤ 230 menit		
18	PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT														
	a. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≤80%		2 jam	80%	80%	80%	80%	100%	100%	80%	80%	80%		
	b. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%		2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	100%	100%	2 jam	2 jam	2 jam		
	c. Peralatan laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
19	PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN LAUNDRY														
	a. Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%		97%	98%	100%	100%	100%	99,83%	99,83%	100%	100%	100%		
	b. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%		100%	100%	100%	100%	100%	99,58%	99,78%	100%	100%	100%		

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-3)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-3)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
20	PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI													
	a. Tersedianya anggota tim PPI yang terlatih	75%		50%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	75%	75%	75%	
	b. Koordinasi APD (Alat Pelindung Diri)	60%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	c. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di RS	75%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



✚ RSKD GIGI DAN MULUT

Kinerja pelayanan yang diukur melalui indikator sasaran RSKD Gigi dan Mulut telah mencapai target yang telah ditetapkan. Analisa Pelayanan RSKD Gigi dan Mulut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan pada RSKDGM Prov. Sulsel

No	Jenis Layanan	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Restra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pelayanan Loker	Waktu pelayanan pendaftaran pasien	2 Menit		2 Menit	2 Menit	2 Menit	2 Menit	2 Menit	2 Menit	2 Menit	100%	
		Buka Pelayanan 6 (enam) hari Kerja	07.30 s/d 13.00 kecuai hari jumat 08.30 s/d 11.00		07.30 s/d 13.00 kecuai hari jumat 08.30 s/d 11.00	07.30 s/d 13.00 kecuai hari jumat 08.30 s/d 11.00	07.30 s/d 13.00 kecuai hari jumat 08.30 s/d 11.00	07.30 s/d 13.00 kecuai hari jumat 08.30 s/d 11.00	07.30 s/d 13.00 kecuai hari jumat 08.30 s/d 11.00	07.30 s/d 13.00 kecuai hari jumat 08.30 s/d 11.00	07.30 s/d 13.00 kecuai hari jumat 08.30 s/d 11.00	100%	
		Kepuasan Pasien	≥70%		≥70%	≥70%	≥70%	≥70%	≥70%	≥70%	≥70%	100%	
2	Pelayanan Diagnose	Waktu pemeriksaan dokter gigi	< 5 Menit		< 5 Menit	< 5 Menit	< 5 Menit	< 5 Menit	< 5 Menit	< 5 Menit	< 5 Menit	100%	
		Tindakan ada kesalahan pemeriksaan kes. gigi dan mulut	< 2		< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	98%	
3	Pelayanan Petugas Rotgen	Waktu tindakan medic Rotgen	< 15 Menit		< 15 Menit	< 15 Menit	< 15 Menit	< 15 Menit	< 15 Menit	< 15 Menit	< 15 Menit	100%	

		Waktu proses Pencucian Film	< 15 Menit		< 15 Menit	< 15 Menit	< 15 Menit	< 15 Menit	< 15 Menit	< 15 Menit	< 15 Menit	100%	
		Kejadian Kegagalan pelayanan Rotgen	< 2%		< 2%	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%	98 %	
4	Pelayanan Pencabutan	Pemeriksaan tekanan darah	< 2 Menit		< 2 Menit	< 2 Menit	< 2 Menit	< 2 Menit	< 2 Menit	< 2 Menit	< 2 Menit	100%	
		Lokal Anastesi	< 2 Menit		< 2 Menit	< 2 Menit	< 2 Menit	< 2 Menit	< 2 Menit	< 2 Menit	< 2 Menit	100%	
		Tindakan Pencabutan	3-30 Menit		3-30 Menit	3-30 Menit	3-30 Menit	3-30 Menit	3-30 Menit	3-30 Menit	3-30 Menit	100%	
		Kepuasan Pasien	85%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Pelayanan Bedah Mulut	Dokter pemberi pelayanan	100% Dokter Gigi Spesialis		100% Dokter Gigi Spesialis	100% Dokter Gigi Spesialis	100% Dokter Gigi Spesialis	100% Dokter Gigi Spesialis	100% Dokter Gigi Spesialis	100% Dokter Gigi Spesialis	100% Dokter Gigi Spesialis	100%	
		Pemeriksaan tekanan darah	< 2 Menit		< 2 Menit	< 2 Menit	< 2 Menit	< 2 Menit	< 2 Menit	< 2 Menit	< 2 Menit	100%	
		Lokal Anastesi	30-60 Menit		30-60 Menit	30-60 Menit	30-60 Menit	30-60 Menit	30-60 Menit	30-60 Menit	30-60 Menit	100%	
		Tindakan doter gigi Spesialis	30-60 Menit		30-60 Menit	30-60 Menit	30-60 Menit	30-60 Menit	30-60 Menit	30-60 Menit	30-60 Menit	100%	
		Kepuasan Pasien	85%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Pelayanan Penambalan	Tindakan Pulpitis, GP, Saluran Akar	5-10 Menit		5-10 Menit	5-10 Menit	5-10 Menit	5-10 Menit	5-10 Menit	5-10 Menit	5-10 Menit	100%	
		Tindakan, Premedika, IP, HP	1-5 Menit		1-5 Menit	1-5 Menit	1-5 Menit	1-5 Menit	1-5 Menit	1-5 Menit	1-5 Menit	100%	
		Kepuasan Pasien	85%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

RSKDIA SITI FATIMAH

Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Indikator untuk pelayanan medik rumah sakit berupa Indikator khusus terdiri dari : **BOR, LOS, BTO, TOI, NDR, GDR dan Jumlah Kunjungan**. Pelaksanaan program-program pelayanan yang dilaksanakan oleh UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah dapat dijelaskan dalam pencapaian sasaran sebagai berikut :

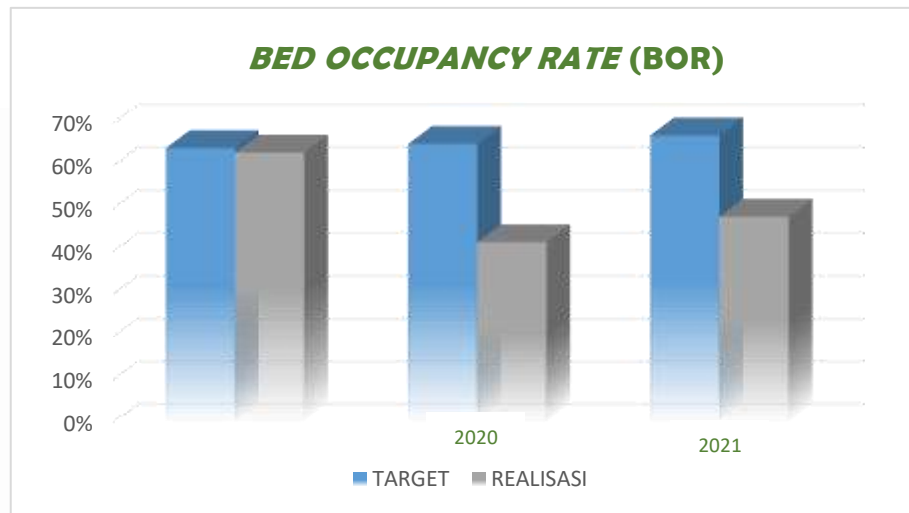
TC.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah
Provinsi Sulawesi Selatan

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
1	Tingkat Pemanfaatan Tempat Tidur (BOR)	60-85%		64%	65%	67%	67%	68%	63%	42%	48%	67%	68%	
2	Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur (BTO)	>30 kali		40 kali	50 kali	60 kali	60 kali	60 kali	68 kali	57 kali	46 kali	60 kali	60 kali	
3	Rata-rata Waktu Penggunaan Tempat Tidur (TOI)	1-3 hari		1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	2 hari	4 hari	4 hari	2 hari	2 hari	
4	Rata-Rata Hari Lama di Rawat (AVLOS)	3-12 hari		3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	2 hari	2 hari	2 hari	3 hari	3 hari	
5	Menurunnya Angka kematian Kasar (GDR)	< 45‰		15‰	15‰	15‰	15‰	10‰	7,35‰	10.46‰	15.49%	10‰	10‰	
6	Menurunnya Angka kematian Setelah Dirawat (NDR)	< 25‰		10‰	10‰	10‰	10‰	5‰	10.29‰	5.81‰	4.59%	5‰	5‰	
7	Indeks Kepuasan Pasien			80%	83%	85%	90%	95%	-	-	-	90%	95%	

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan UPT RSKDIA Siti Fatimah

Standar *Bed Occupancy Rate* (BOR) pada Rumah Sakit Khusus adalah 60-85%, Indikator ini untuk mengukur tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur. Berdasarkan data tahun 2019 – 2021 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2019 BOR mencapai 64% menurun menjadi 42% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 BOR meningkat menjadi 48%. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dimana masyarakat takut untuk

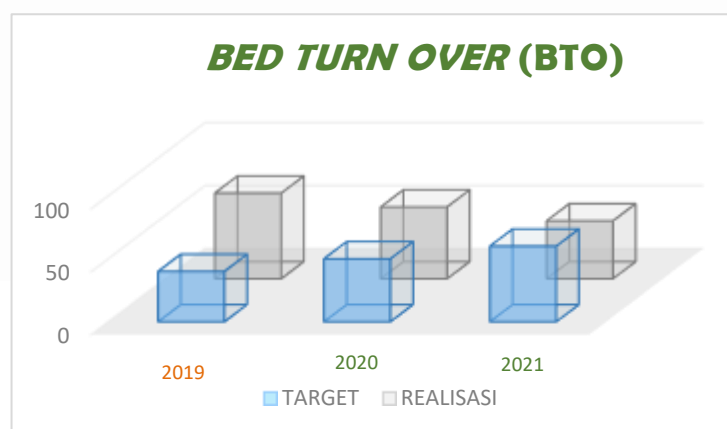
mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan salah satunya di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.



Grafik 1. Bed Occupancy Rate (BOR)

✚ **Bed Turn Over (BTO)**

Indikator ini untuk mengukur frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satuan waktu. Frekuensi pemakaian tempat tidur pada tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 sebanyak 68 kali. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan BTO masing-masing sebanyak 57 dan 46 kali. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 ini disebabkan adanya pandemic Covid-19 dimana masyarakat takut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan salah satunya di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

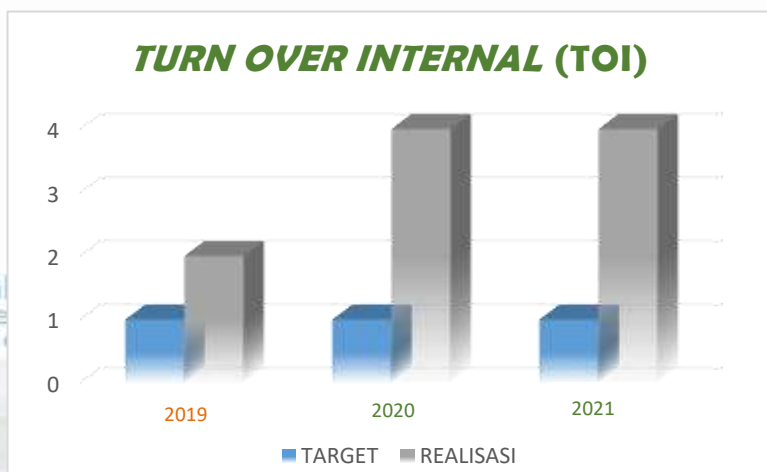


Grafik 2. Bed Turn Over (BTO)

✚ **Turn Over Internal (TOI)**

Standart *Turn Over Internal* (TOI) pada Rumah Sakit Khusus adalah 1-3 hari, Indikator ini untuk mengukur rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat ke

saat sampai terisi berikutnya. TOI RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah berturut-turut pada tahun 2019 adalah 2 hari. Pada tahun 2020 dan 2021 rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati meningkat menjadi 4 hari. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 dimana pada awal pandemi masyarakat dianjurkan agar tidak menjalani perawatan di Rumah Sakit jika keadaan kesehatannya tidak termasuk dalam kategori kritis.



Grafik 3. Turn Over Internal (TOI)

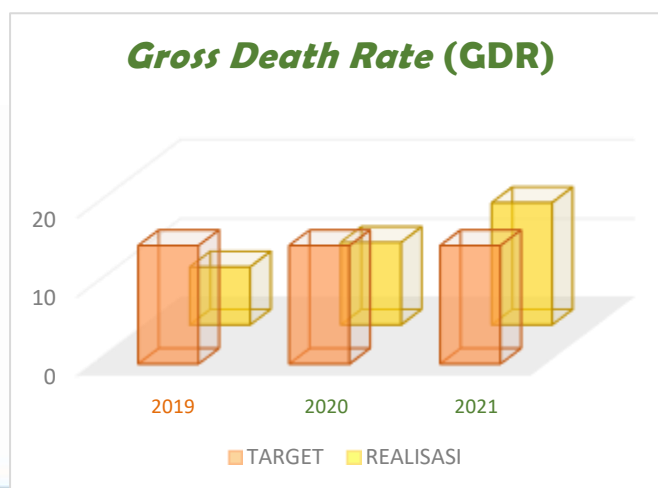
✚ Average Length of Stay (AvLOS)

Standart AvLOS pada Rumah Sakit Khusus adalah 3-12 hari, Indikator ini untuk mengukur rata-rata hari lama dirawat. Rata-rata hari lama dirawat selama tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang sama, dimana pada tahun 2019, 2020 dan 2021 masing-masing selama 2 hari. Hal ini menunjukkan efisiensi pelayanan di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Siti Fatimah masih dikategorikan kondusif.

✚ Gross Death Rate (GDR)

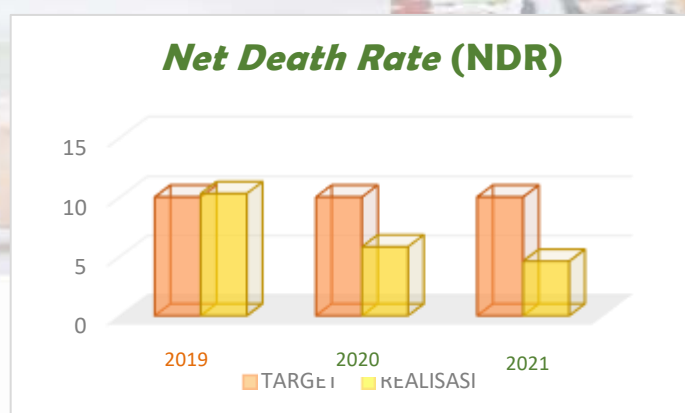
Gross Death Rate (GDR) atau angka kematian kasar digunakan untuk menilai angka kematian penderita kurang dari 48 jam setelah dirawat untuk 1000 penderita keluar sembuh. Berdasarkan data historis rata-rata GDR selama tiga tahun terakhir adalah 7,35/1000 penderita keluar sembuh atau 0,0073 pada tahun 2019. Pada 2 tahun terakhir terjadi peningkatan angka kematian kasar yaitu masing-masing 10,46/1000 penderita keluar sembuh atau 0,0104 pada tahun 2020 dan 15,49/1000

atau sebesar 0,0154 pada tahun 2021. Angka pencapaian aktual GDR masih lebih kecil dari Standar Nasional, yaitu < 45 penderita/1000.



Grafik 4. Gross Death Rate (GDR)

✚ Net Death Rate (NDR)



Grafik 5. Net Death Rate (NDR)

Net Death Rate (NDR) atau angka kematian bersih digunakan untuk menilai angka kematian lebih dari 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar sembuh. Berdasarkan data laporan, rata-rata NDR selama tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2019 sebanyak 10,29/1000 penderita keluar sembuh atau 0,0102. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan NDR masing-masing 5,81/1000 penderita keluar sembuh atau 0,0058 dan 4,59/1000 penderita keluar sembuh atau 0,0045. Angka pencapaian NDR masih lebih rendah dari standar nasional < 25 orang penderita/1000.

✚ RSUD SAYANG RAKYAT

Indikator untuk pelayanan medik Rumah Sakit Sayang Rakyat antara lain **BOR, LOS, BTO, TOI, NDR, GDR, Hari Perawatan dan Jumlah Kunjungan**. Sementara untuk Indikator Program Kegiatan yang digunakan terdiri dari :

Indikator input : Berupa dana APBD Propinsi Sulawesi Selatan dan Sumber Daya Manusia

Indikator output : Tingkat pencapaian pelayanan sesuai rencana, sehingga terjadi peningkatan kualitas pelayanan.

Indikator benefit/impact : Indikator yang berpengaruh pada jangka panjang yang menghasilkan keuntungan dan belum bisa dimonitor pada jangka pendek.

Pelaksanaan program-program pelayanan yang dilaksanakan oleh RSUD Sayang Rakyat dapat dijelaskan dalam pencapaian sasaran sebagai berikut :

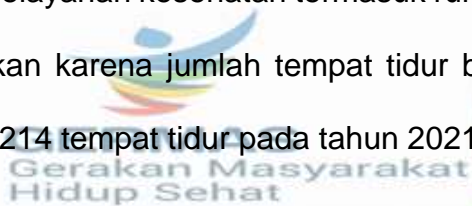
Tabel TC. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan UPT RSUD Sayang Rakyat
Provinsi Sulawesi Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi			Proyeksi			Catat atan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR)	60-85 %		25%	30%	40%	50%	9%	18%	21%	9%	40%	50%	9%	
2	Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI)	1-3 hari		15 Hari	13 Hari	10 Hari	6 Hari	70 Hari	13 Hari	33 Hari	70 Hari	10 Hari	6 Hari	70 Hari	
3	Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO)	40-50 kali		20 Kali	25 Kali	30 Kali	35 Kali	5 kali	22 Kali	9 Kali	5 kali	30 Kali	35 Kali	5 kali	
4	Rata-rata lamanya pasien dirawat (LOS)	6-9 hari		4 Hari	5 Hari	6 Hari	7 Hari	38 Hari	3 Hari	7 Hari	38 Hari	6 Hari	7 Hari	38 Hari	
5	Menurunnya angka kematian kasar (GDR)	<45 ‰		0‰	0‰	0‰	0‰	77‰	0‰	65‰	77‰	0‰	0‰	77‰	
6	Menurunnya angka kematian setelah di rawat (NDR)	<25 ‰		2‰	0‰	0‰	0‰	42‰	0‰	36‰	42‰	0‰	0‰	42‰	
7	Indeks Kepuasan Pasien			80%	83%	85%	90%		-	-	-	85%	90%	-	

Sumber : Rekam Medik RSUD Sayang Rakyat, 2021

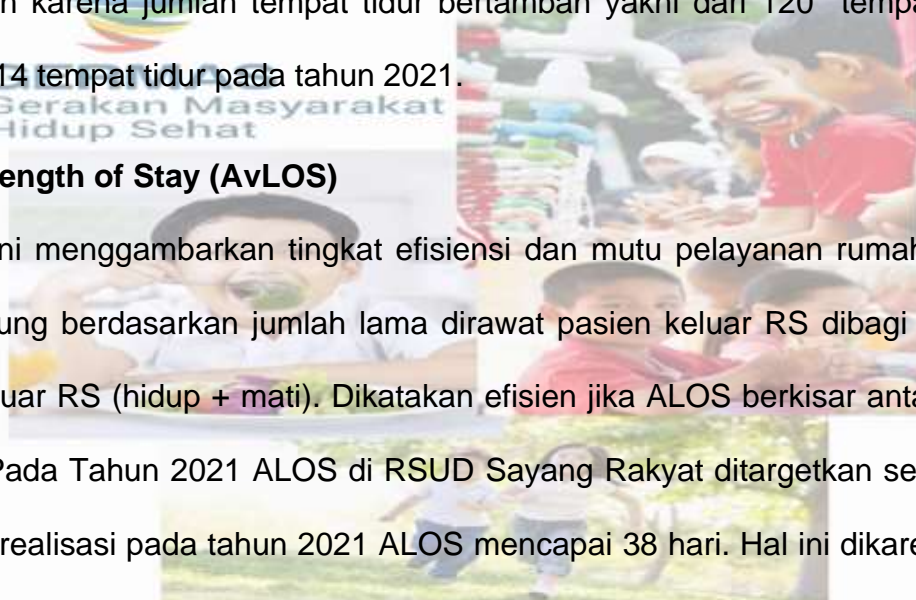
➤ **Bed Occupancy Rate (BOR)**

BOR menggambarkan berapa banyak Tempat Tidur (TT) di rumah sakit yang digunakan dalam suatu masa, dihitung berdasarkan jumlah hari perawatan dalam waktu tertentu dibagi jumlah tempat kali jumlah hari dalam satu satuan waktu kali 100%. Dikatakan ideal jika mencapai 75 - 85%. Target BOR RSUD Sayang Rakyat pada tahun 2021 yakni 18% dengan capaian 9%. Hal ini disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pasien enggan untuk berobat ke sarana pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit, disamping itu penurunan BOR disebabkan karena jumlah tempat tidur bertambah yakni dari 120 tempat tidur menjadi 214 tempat tidur pada tahun 2021.



➤ **Average Length of Stay (AvLOS)**

Indikator ini menggambarkan tingkat efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit, yang dihitung berdasarkan jumlah lama dirawat pasien keluar RS dibagi jumlah pasien keluar RS (hidup + mati). Dikatakan efisien jika ALOS berkisar antara 7 – 10 hari. Pada Tahun 2021 ALOS di RSUD Sayang Rakyat ditargetkan selama 3 hari, dan realisasi pada tahun 2021 ALOS mencapai 38 hari. Hal ini dikarenakan kurangnya masyarakat memanfaatkan sarana pelayanan rumah sakit disebabkan karena ada rasa takut untuk berkunjung/memanfaatkan sarana pelayanan karena adanya Pandemi Covid-19.



➤ **Bed Turn Over (BTO)**

Indikator ini menggambarkan berapa kali satu TT ditempati pasien dalam 1 tahun, yang dihitung berdasarkan jumlah pasien keluar RS (hidup+mati) dalam 1 tahun dibagi jumlah tempat tidur tahun bersangkutan. Dikatakan ideal jika BTO lebih dari 40-50 kali/tahun. Adapun target BTO pada tahun 2021 yakni 22 kali sedangkan pencapaiannya pada tahun 2021 mencapai 5 kali. Hal ini menggambarkan bahwa frekuensi penggunaan tempat tidur di RSUD Sayang Rakyat masih jauh dari target dan standar ideal rumah sakit.

Meskipun demikian bukan berarti RSUD Sayang Rakyat mutu pelayanannya jelek akan tetapi keterjangkauan lokasi RSUD Sayang Rakyat disamping itu banyaknya rumah sakit swasta lainnya yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan lokasinya berada di tengah kota sehingga pasien lebih memilih rumah sakit tersebut dan dampak dari Pandemi Covid-19.

➤ **Net Death Rate (NDR)**

Indikator ini menggambarkan tingkat kematian yang disebabkan faktor pelayanan di Rumah Sakit, yang dihitung berdasarkan jumlah pasien mati > 48 jam dirawat dibagi jumlah pasien keluar (hidup + mati) kali 1000. Idealnya NDR adalah 25‰ sedangkan target yang ingin dicapai pada tahun 2021 adalah 1‰ sedangkan capaiannya 42‰. Tingginya NDR di Rumah Sakit Sayang Rakyat disebabkan karena Pandemi Covid-19.

➤ **Kunjungan Rawat Inap**

Kunjungan rawat inap dan kunjungan rawat jalan sama-sama mengalami penurunan jumlah kunjungan. Kunjungan rawat inap pada tahun 2020 mencapai 1.385 orang sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan yakni 1.345 orang.

➤ **Kunjungan Rawat Jalan**

Kunjungan Rawat Jalan pada tahun 2020 sebesar 11.806 orang, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yakni sebanyak 12.635 orang. Hal ini disebabkan karena adanya regulasi BPJS yang mengharuskan pelayanan kesehatan pertama di Puskesmas kemudian dilanjutkan ke Rumah Sakit type C. Hal inilah yang menjadi keuntungan dari RSUD Sayang Rakyat yang merupakan Rumah Sakit type C, disamping itu adanya Dokter Spesialis turut berkontribusi dalam peningkatan pasien rawat jalan di tahun 2018.

✚ **UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD)**

Penjelasan terhadap Program/Kegiatan/Sub kegiatan baik yang telah memenuhi maupun yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada matriks berikut ini :

A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	853.826.112	812.715.929	-41.110.183	95,19	100,00
I	Administrasi Umum Perangkat Daerah	434.950.800	427.329.793	-7.621.007	98,25	100,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.100.000	11.100.000	0	100,00	100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.861.800	31.861.800	0	100,00	100,00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	145.920.000	141.313.912	-4.606.088	96,84	100,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	107.960.000	107.910.000	-50.000	99,95	100,00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.050.000	10.050.000	0	100,00	100,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.059.000	125.094.081	-2.964.919	97,68	100,00
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 427.329.793,-				
	Keluaran	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah (100%)				
	Hasil	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah (100%)				
	Sumber Dana	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
	Lokasi	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar				
II	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.500.000	32.500.000	0	100,00	100,00
1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	32.500.000	32.500.000	0	100,00	100,00
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 32.500.000,-				
	Keluaran	Persentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah (100%) (Terealisasi 2 jenis)				
	Hasil	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah (100%)				
	Sumber Dana	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
	Lokasi	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar				
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.740.312	173.455.118	-26.285.194	86,84	100,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	199.740.312	173.455.118	-26.285.194	86,84	100,00
Realisasi keuangan kurang dari 90% karena terdapat efisiensi penggunaan Listrik, Air Dan Internet						

Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 173.455.188,-				
Keluaran		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (100%)				
Hasil		Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah (100%)				
Sumber Dana		Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Lokasi		Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar				
IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.635.000	179.431.018	-7.203.982	96,14	100,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.110.000	29.703.344	-406.656	98,65	100,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.425.000	141.327.674	-5.097.326	96,52	100,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.100.000	8.400.000	-1.700.000	83,17	100,00
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 179.431.018,-				
Keluaran		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (100%) (7 Unit Kendaraan)				
Hasil		Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				
Sumber Dana		Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Lokasi		Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar				
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6.852.785.867	6.162.177.307	-690.608.560	89,92	98,89
I	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3.073.879.475	2.437.744.515	-636.134.960	79,31	96,67
1	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	545.500.000	544.143.657	-1.356.343	99,75	100,00
2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	590.142.575	503.703.488	-86.439.087	85,35	100,00
3	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	29.280.000	28.800.000	-480.000	98,36	100,00
4	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei,	61.200.000	61.143.500	-56.500	99,91	100,00

	Handuk dan Habis Pakai Lainnya)					
5	Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/ Peralatan Laboratorium Kesehatan	25.000.000	25.000.000	0	100,00	100,00
6	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.822.756.900	1.274.953.870	-547.803.030	69,95	80,00

Realisasi tidak mencapai 90% karena hal-hal sebagai berikut :

1. Pada kegiatan ini terdapat belanja kantong darah, dimana pada proses tender yang terpilih sebagai penyedia memiliki nilai penawaran yang cukup rendah dan menyisakan anggaran
2. pada kegiatan ini juga terdapat belanja bahan kimia yang awalnya direncanakan dengan metode penunjukan langsung berdasarkan perjanjian kerjasama (KSO), tetapi setelah dilakukan review pada LPSE mekanisme ini dianulir karena terdapat beberapa poin yang dianggap tidak relevan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penunjukan langsung. Pengadaan dilanjutkan dengan sistem e-katalog. Dimana paket bahan kimia pada sistem e-katalog memiliki harga yang lebih rendah dari DPA dan menyisakan anggaran. Dengan kekurangan pada sistem ini tidak melingkupi pemeliharaan alat testing yang digunakan.

Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 2.437.744.515,-
Keluaran	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan (100%)
Hasil	Tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan (100%)
Sumber Dana	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	Kota Makassar

II	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	394.080.000	376.446.500	-17.633.500	95,53	100,00
1	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	298.440.000	293.906.500	-4.533.500	98,48	100,00
2	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	95.640.000	82.540.000	-13.100.000	86,30	100,00

Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 376.446.500,-
Keluaran	Persentase penyediaan layanan untuk UKP, UKM dan UKM Rujukan tingkat daerah Provinsi (100%)
Hasil	Tersedianya layanan untuk UKP, UKM dan UKM Rujukan tingkat daerah Provinsi (100%)
Sumber Dana	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	Kota Makassar

III	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	3.384.826.392	3.347.986.292	-36.840.100	98,91	100,00
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	3.384.826.392	3.347.986.292	-36.840.100	98,91	100,00

Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 3.347.986.292,-
Keluaran	Persentase pemenuhan pelayanan operasional Unit Transfusi Darah (100%)
Hasil	Tersedianya kegiatan pelayanan operasional Unit Transfusi Darah (100%)
Sumber Dana	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	Kota Makassar

Keberhasilan dalam pencapaian target terus dipertahankan dan ditingkatkan, adapun program dan kegiatan yang belum mencapai target, maka akan ditempuh Rencana Tindak Lanjut diantaranya :

1. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Perencana untuk melaksanakan perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja Aparatur Perencana
2. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran sehingga transparansi akan lebih terwujud

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan UPT Transfusi Darah pada kurun waktu satu tahun dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target.

a. Kendala yang dihadapi

- Tidak lancarnya klaim pembayaran BPJS yang diajukan ke Rumah Sakit
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang mendonorkan darah
- Belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan darah di Rumah Sakit
- Sistem Informasi Pelayanan darah belum berjalan dengan maksimal

b. Tindak Lanjut

- Melakukan koordinasi kepada pihak Rumah Sakit tentang pembayaran klaim BPJS
- Meningkatkan Sosialisasi donor darah ke Instansi, Instirusi pemerintah/swasta/TNI/POLRI/BUMN/LSM dan masyarakat
- Perlu adanya dukungan regulasi oleh Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan jumlah kegiatan donor darah di Instansi, Institusi pemerintah/swasta/TNI/POLRI/BUMN/LSM dan masyarakat
- Pengadaan Sistem informasi pelayanan darah yang terintegrasi di Kab/Kota

UPT LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH

UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah merupakan UPT baru hasil penggabungan dari UPT Unit Pelatihan Kesehatan, UPK Balai Pelayanan Kesehatan dan UPK Balai Pelayanan Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetik, yang dibentuk dalam rangka menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan pertimbangan khusus bahwa hingga saat ini Provinsi Sulawesi Selatan belum memiliki Laboratorium Kesehatan Provinsi. Keberadaan Laboratorium Kesehatan Provinsi sebagai penunjang untuk pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat yang merupakan kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu fungsi UPT Laboratorium Kesehatan adalah menyediakan fasilitas yang terjangkau bagi masyarakat terkait pelayanan kesehatan umum, pelayanan kesehatan kerja masyarakat, pelayanan kesehatan olahraga masyarakat, pelayanan Kosmetika, kesehatan kulit dan kelamin serta pelayanan kesehatan lainnya.

Sebagai UPT baru yang belum memiliki kinerja pelayanan, maka kinerja pelayanan yang akan diuraikan adalah kinerja pelayanan instansi induk dalam hal ini UPT Pelatihan Kesehatan. Sementara untuk UPK Balai Pelayanan Kesehatan dan UPK Balai Pelayanan Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetik pada tahun 2021 ini masih bergabung dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Analisis kinerja UPT Pelatihan Kesehatan Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang indikator kinerjanya yakni persentase (%) tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan telah terlaksana sebesar 68,70%
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang indikator kinerjanya yakni Persentase (%) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan SDM terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan telah terlaksana sebesar 92,56 %

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang indikator kinerjanya yakni persentase (%) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan telah terlaksana sebesar 86,43 %

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan secara berkesinambungan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berupa pengaturan, pembinaan dan pengawasan bidang Pelayanan Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penyakit dan Sumber Daya Kesehatan baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Pada tahun 2021 untuk mencapai sasaran strategis Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan 3 Program 13 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan dengan hasil evaluasi sasaran menunjukkan rata-rata pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 90,29% dan rata-rata pencapaian indikator sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 93,12%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, maka Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam kriteria penilaian kinerja Sangat Tinggi (ST). Faktor keberhasilan ini didukung dengan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang didukung oleh regulasi-regulasi di bidang pelayanan kesehatan, pengalokasian dana, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta adanya dukungan lintas sektor terkait.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, dilakukan koordinasi dan sinergisme program dan kegiatan dengan Kementerian Kesehatan RI serta Lintas Program dan Lintas Sektor terkait tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sinergisme dilakukan pada tahap perencanaan program/kegiatan, tahap pelaksanaan program/kegiatan serta tahap monitoring dan evaluasi program/kegiatan. Namun demikian, koordinasi dan sinergisme antar lembaga/OPD ini masih perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan peran lintas sektor dalam pembangunan kesehatan.

Masih diperlukan upaya advokasi yang lebih intens dan proaktif oleh Perangkat Daerah yang bergerak di sektor kesehatan dalam rangka mendorong lintas sektor terkait berkontribusi aktif melaksanakan program-program pembangunan berwawasan kesehatan.

Program Prioritas Gubernur menjadi isu penting yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan menjelang akhir periode pemerintahan tahun 2023, diantaranya Pembangunan RS Regional dimana ditargetkan sebanyak 6 (enam) RS yang akan dibangun dan ditingkatkan kualitasnya, 1 (satu) pembangunan baru RS Regional Bone yang sementara dilaksanakan, 1 (satu) peningkatan kualitas RS Hasrie Ainun Habibie di Kota Parepare, selebihnya adalah peningkatan kualitas 4 (empat) Rumah Sakit, selanjutnya adalah pencegahan dan penanggulangan Stunting dimana akan diturunkan Prevalensi Balita Stunting hingga 18,59%, begitu pula target lainnya terkait Brigade Siaga Bencana (BSB), Klinik Rest Area dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.

Pada sisi lain, masih ditemukan kendala teknis berupa distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan kepulauan, kualitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan serta adanya beban ganda penyakit di masyarakat berupa meningkatnya angka kejadian penyakit infeksi disertai meningkatnya angka kejadian penyakit tidak menular, bahkan saat ini kita masih terus berjuang menghadapi Pandemi Global Covid-19 (Corona Virus Disease) yang telah banyak menelan korban jiwa di seluruh dunia termasuk Indonesia dan terkhusus Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari sisi penganggaran juga banyak terjadi refocusing/efisiensi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19 dan terjadinya defisit anggaran sehingga dapat mempengaruhi pencapaian target program dan kegiatan.

Kolaborasi antar OPD dan lintas sektor terkait serta kendala teknis yang dihadapi, dapat menjadi hambatan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi apabila upaya yang dilakukan hanya berfokus pada internal sektor kesehatan saja, sementara banyak sektor lain yang harus ikut terlibat dalam menyelesaikan

permasalahan sektornya masing-masing yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan sektor kesehatan, sehingga apabila kolaborasi tidak terjadi maka tentu akan memperlambat pencapaian visi-misi pembangunan, demikian pula akan mempengaruhi capaian program nasional dan internasional seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals) karena program-program dimaksud membutuhkan kolaborasi dan keterlibatan seluruh komponen bangsa untuk mencapai target/goals yang telah ditetapkan di tingkat global.

Hal penting lainnya, terkait pengarusutamaan gender. Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, pengarusutamaan gender telah dilaksanakan dan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah dilampirkan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) yang memuat program dan kegiatan yang dianalisis gender. Program dan kegiatan yang telah dianalisis gender terkait kesehatan keluarga diantaranya Kesehatan Ibu dan Anak, Kesehatan Reproduksi, Kelas Ibu Hamil, dan sebagainya.

Namun demikian, implementasi pengarusutamaan gender masih perlu ditingkatkan dan direplikasi ke program kesehatan lainnya contohnya kegiatan yang melibatkan peran suami atau ayah dalam peningkatan kesehatan ibu, anak dan keluarga atau penerapan pengarusutamaan gender pada semua bidang/seksi sehingga diharapkan pencapaian program dan kegiatan serta implementasi pengarusutamaan gender dapat lebih optimal.

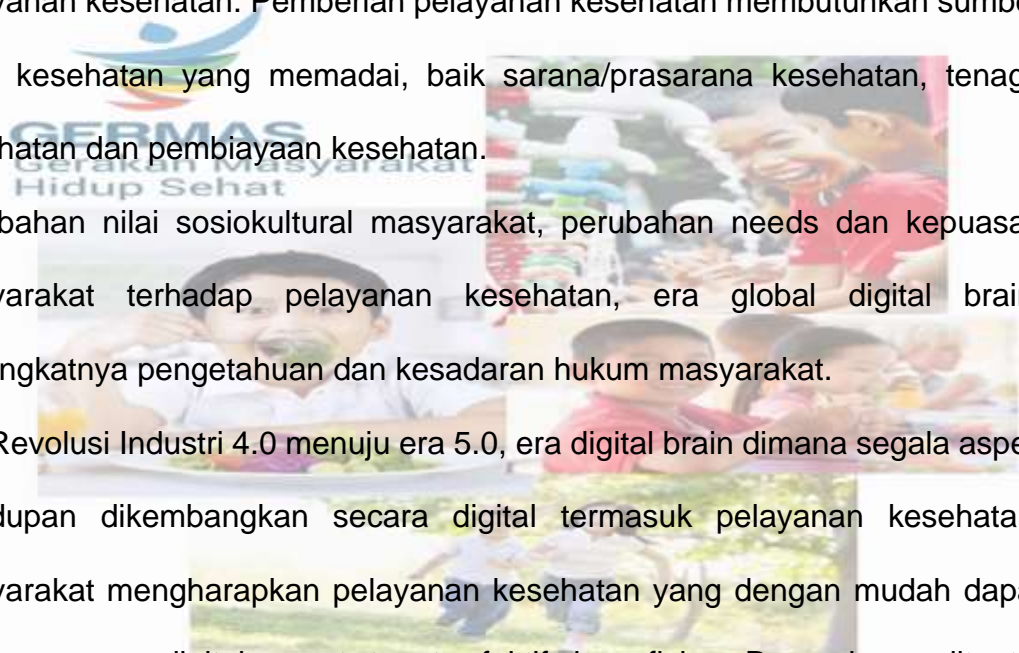
Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah, beberapa hal menjadi tantangan dan peluang antara lain :

- Terjadinya Pandemi Kesehatan. Dibutuhkan kesiapsiagaan dan penanganan khusus dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejadian global Pandemi Covid -19 (Corona Virus) dan Pandemi Kesehatan lainnya di masa mendatang. Hal ini menjadi tantangan serius bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi pencegahan dan

penanggulangan pandemi/wabah penyakit dengan cepat dan tepat, agar tidak menimbulkan korban jiwa.

- Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan belum optimal. Diperlukan upaya Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat secara lebih berkesiambungan agar dapat melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan sadar terhadap kesehatan pribadi, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.
- Jumlah penduduk besar juga menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi pelayanan kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan membutuhkan sumber daya kesehatan yang memadai, baik sarana/prasarana kesehatan, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan.
- Perubahan nilai sosiokultural masyarakat, perubahan needs dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, era global digital brain, meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Era Revolusi Industri 4.0 menuju era 5.0, era digital brain dimana segala aspek kehidupan dikembangkan secara digital termasuk pelayanan kesehatan. Masyarakat mengharapkan pelayanan kesehatan yang dengan mudah dapat diakses secara digital, cepat, tepat, efektif dan efisien. Dampaknya, dituntut profesionalisme dan keterampilan petugas kesehatan dalam memanfaatkan teknologi canggih dan mengembangkan sistem pelayanan kesehatan berbasis teknologi untuk meningkatkan kinerja pembangunan kesehatan serta bagaimana mengembangkan teknologi informasi yang komprehensif dan terintegrasi.
- Perubahan strata demografi ke umur tua. Dengan makin meningkatnya umur harapan hidup, jumlah penduduk lanjut usia semakin meningkat sehingga ke depan membutuhkan upaya penanganan khusus. Hal ini tentu dapat menjadi peluang sekaligus tantangan dalam mengembangkan pelayanan kesehatan bagi usia lanjut.



- Perubahan sistem kesehatan, mengikuti perkembangan situasi dan kondisi kesehatan penduduk, perkembangan informasi dan teknologi serta perkembangan kondisi global.
- Era pasar bebas, dimana sektor kesehatan dapat memanfaatkannya untuk mengembangkan kapasitas tenaga kesehatan, sistem pelayanan kesehatan, menawarkan jasa sektor pelayanan kesehatan kepada negara lain, membangun kerjasama sektor kesehatan, namun disisi lain sekaligus menjadi tantangan dengan maraknya persaingan sektor jasa pelayanan kesehatan dari negara lain memasuki sektor jasa pelayanan kesehatan dalam negeri
- Adanya kesepakatan global seperti Sustainable Development Goals (SDG) yang menuntut kerja keras dan kerja cerdas semua Organisasi Perangkat Daerah, pihak swasta/NGO/Instansi terkait lainnya dan seluruh lapisan masyarakat, untuk berkolaborasi menuntaskan permasalahan kesehatan yang dihadapi sesuai goals yang telah ditetapkan, dimana diharapkan hingga 2030, **no one left behind.**
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang akan meningkatkan kinerja birokrasi, menciptakan petugas/birokrat yang Profesional dan Berintegritas, memberikan pelayanan birokrasi yang berkualitas tinggi dan memuaskan masyarakat.
- Perkembangan terkini adalah adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan Transformasi Kesehatan yang mencakup 6 (enam) hal prinsip yaitu 1) Transformasi Layanan Primer; 2) Transformasi Layanan Rujukan; 3) Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah Penyakit/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; 4) Transformasi Pembiayaan Kesehatan; 5) Transformasi SDM Kesehatan dan 6) Transformasi Teknologi Kesehatan

Adapun isu-isu penting yang berkembang di UPT Dinas Kesehatan antara lain :

- Perlunya peningkatan mutu dan kualitas Pelayanan Kesehatan

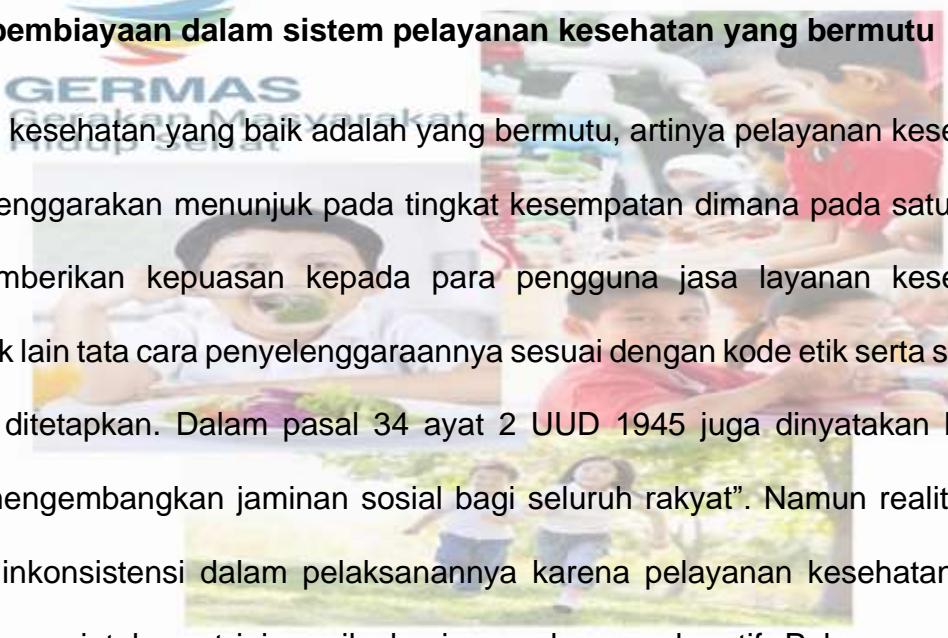
Syarat pokok pelayanan kesehatan adalah tersedia (*available*) dan berkesinambungan (*Continuous*) artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan; diterima (*acceptable*) dan wajar (*appropriate*) artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat terutama dari sudut lokasi; mudah dijangkau (*affordable*) oleh masyarakat terutama dari sudut biaya; bermutu (*quality*). Meningkatnya pengguna jasa pelayanan di sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit tanpa diikuti dengan peningkatan kualitas dan kualitas sumber daya kesehatan bisa menjadikan syarat pokok pelayanan kesehatan terabaikan sehingga mutu pelayanan kesehatan diterima masyarakat semakin rendah. Selain itu, banyaknya terbangun rumah sakit – rumah sakit swasta semakin menunjukkan adanya disparitas dalam penyediaan dan pemberian pelayanan kesehatan yang mencerminkan **Tingginya tingkat kepuasan pengguna jasa pelayanan kesehatan**. Sejalan dengan [kebijakan yang ada saat ini maka solusi isu strategis tersebut adalah implementasi **Penerapan Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 juni 2019 sampai 22 juni 2019 dengan kategori Akreditasi Utama**, sebagaimana yang dinyatakan dalam UUNo.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Bab IX Bagian Ketiga Akreditasi, pasal 40 ayat (1), Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali; (2), Akreditasi Rumah Sakit dilakukan oleh suatu Lembaga independent baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku; (3) Lembaga Independen ditetapkan oleh Menteri, dan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Menteri.

➤ **Harapan/Hak/Kesadaran masyarakat dan permintaan akan pelayanan dan penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu semakin meningkat**

Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 menyebutkan 'setiap penduduk atas pelayanan kesehatan'. Dengan demikian maka pelayanan kesehatan bersifat *public goods* yang

berarti bahwa pemakaian jasa kepada seseorang tidak mengurangi jatah bagi orang lain yang ingin menggunakannya sehingga tidak perlu berebut. Mengamati kebijakan yang ada saat ini maka solusi dari isu tersebut cenderung diarahkan kepada **penyelenggaraan tata kelola klinik** (*Clinical governance*) yang merupakan pendekatan baru yang bertujuan untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatanyang bermutu (*continous quality improvement*) dan terselenggara dengan baik (*accountability*) berdasarkan standar pelayanan yang tinggi (*high quality standard ofcare*) serta dilakukan pada lingkungan kerja (*environment*) yang memiliki tingkat profesionalisme tinggi.

➤ **Prioritas pembiayaan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bermutu**



Pelayanan kesehatan yang baik adalah yang bermutu, artinya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan menunjuk pada tingkat kesempatan dimana pada satu pihak dapat memberikan kepuasan kepada para pengguna jasa layanan kesehatan dan dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yangtelah ditetapkan. Dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 juga dinyatakan bahwa “Negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat”. Namun realita saat ini terjadi inkonsistensi dalam pelaksanaannya karena pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah saat ini masih dominan pelayanan kuratif. Pola penanganan kesehatan yang pasif ini akan memicu pemborosan keuangan karena pembiayaan untuk orangyang sudah jatuh sakit jauh lebih mahal dibanding dengan pembiayaan untuk menjaga kesehatan.

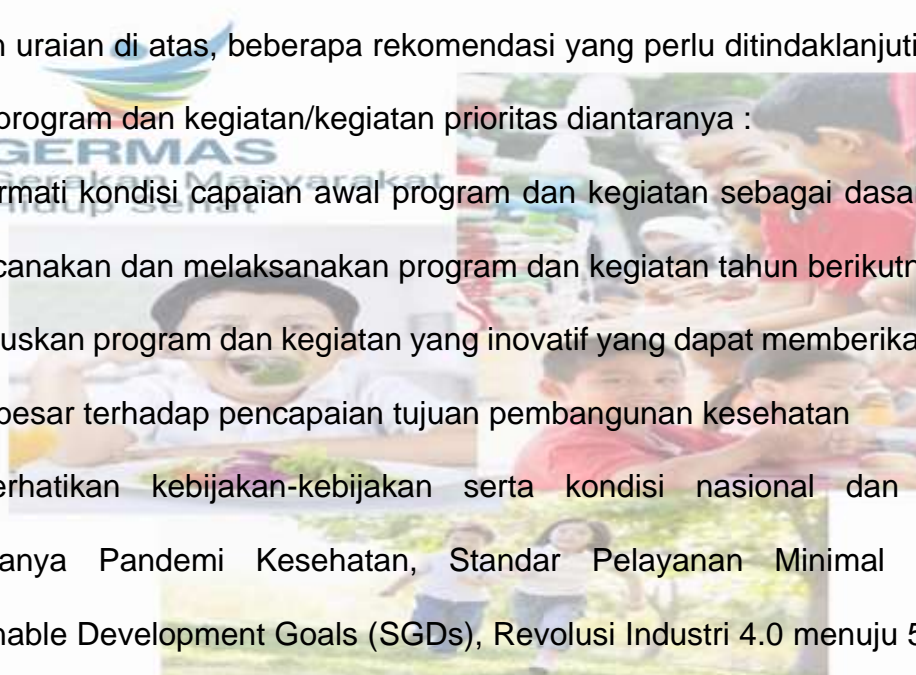
Menjawab kondisi tersebut, disusunlah UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang merupakan awal dimulainya reformasi menyeluruh sistem jaminan sosial di Indonesia. Implementasi UU SJSN tersebut dilanjutkan dengan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang mengatur kejelasan penyelenggara, prinsip-prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitasdan portabilitas. Solusi dari isu tersebut diarahkan pada **pemberlakuan BadanJaminan Sosial**

(BPJS) per 1 Januari 2014 sebagai perwujudan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Oleh karena itu, diharapkan seluruh penduduk di Sulawesi Selatan telah memiliki kartu kepesertaan sehingga memudahkan pelayanan kesehatan dan pengklaiman.

➤ **Pemenuhan sarana dan prasarana**

Pemenuhan sarana dan prasarana masih menjadi isu penting, karena sebagian UPT masih mengalami kondisi kekurangan sarana dan prasarana. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan yang akan diberikan.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan/kegiatan prioritas diantaranya :

- 
- Mencermati kondisi capaian awal program dan kegiatan sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan tahun berikutnya.
 - Merumuskan program dan kegiatan yang inovatif yang dapat memberikan daya ungkit besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan kesehatan
 - Memperhatikan kebijakan-kebijakan serta kondisi nasional dan global diantaranya Pandemi Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Sustainable Development Goals (SGDs), Revolusi Industri 4.0 menuju 5.0 dan sebagainya.
 - Mengutamakan kolaborasi dan integrasi antar program dan antar sektor terkait
 - Mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan dalam mencapai output dan outcome yang direncanakan
 - Fokus orientasi pada pemberian pelayanan terbaik dan kepuasan masyarakat

Rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh UPT Dinas Kesehatan antara lain :

- Peningkatan standar dan mutu pelayanan kesehatan
- Pemenuhan dan peningkatan kualitas SDM (tenaga kesehatan, pembiayaan/keuangan, kerjasama BPJS,dll)
- Peningkatan Promosi Kesehatan oleh masing-masing UPT

- Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan
- Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan. Proses ini dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rancangan awal program dan kegiatan dengan kebutuhan program dan kegiatan.

Berdasarkan yang dilakukan, diketahui bahwa rancangan awal RKPD sudah sejalan dengan kebutuhan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing Bidang/Pengelola Program. Tidak terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Hal ini dapat dilihat pada **tabel T-C.31** tentang Review terhadap Rancangan Awal RKPD (**Terlampir**).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tahapan proses perencanaan dan penganggaran juga memberikan ruang kepada para pemangku kepentingan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota untuk mengusulkan program dan kegiatannya kepada Perangkat Daerah Provinsi.

Pada proses pengusulan program dan kegiatan untuk RKPD tahun 2023, dilakukan validasi usulan secara elektronik, guna memverifikasi dan validasi usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, DPRD, perangkat daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat. Validasi dilakukan bersama antara Bappeda Provinsi dan Perangkat Daerah Provinsi terhadap usulan pemangku kepentingan dan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang diinput dalam aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD). Usulan program dan kegiatan dari Kabupaten/Kota pada dasarnya sudah sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi, sebagian besar usulan tersebut telah

terakomodir dalam usulan Program dan Kegiatan yang dirumuskan oleh Perangkat Daerah Provinsi. Kabupaten/Kota dan masyarakat juga diarahkan untuk mengalokasikan kegiatan yang belum terakomodir di tingkat Provinsi sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota dan masyarakat melalui dana APBD masing-masing Kabupaten/Kota dan melalui Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 10.32



BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rancangan teknokratis RPJMN 2020-2024 menetapkan Visi : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

Mandiri : mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Maju : Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum

Adil : Tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender maupun wilayah

Makmur : Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain

Tema rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 : “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”

- Berpenghasilan Menengah Tinggi :
 - Transformasi struktural berjalan
 - Produktivitas tenaga kerja meningkat
 - Iklim investasi kondusif
 - GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055
- Sejahtera
 - Kualitas hidup meningkat
 - Perilaku disiplin dan beradab
 - SDM berkualitas dan berdaya saing
 - Indeks kebahagiaan meningkat
- Adil
 - Ketimpangan menurun
 - Redistribusi berjalan baik

- Berkesinambungan
 - Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development)
 - Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Sementara pencapaian Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019

- On Track

- Kematian Ibu
- TFR
- CPR semua cara
- Kematian Bayi
- Prevalensi TB
- Prevalensi HIV
- Eliminasi Malaria
- Imunisasi Dasar Lengkap
- Ketersediaan Obat Vaksin di Puskesmas
- Obat yang memenuhi syarat



- Perlu Kerja Keras

- *Stunting* pada anak bawah dua tahun (baduta)
- Cakupan kepesertaan JKN/KIS
- Akreditasi Puskesmas
- Puskesmas dengan 5 Jenis tenaga kesehatan

- Sulit Tercapai

- Tekanan Darah Tinggi
- Obesitas
- Perilaku Merokok

Indikator Pembangunan Kesehatan

- ❖ Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak
 - Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)

- Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)
- ❖ Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
 - Prevalensi Stunting Balita (%)
 - Prevalensi Wasting Balita (%)
- ❖ Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular
 - Insidensi TB (per 100.000 Penduduk)
 - Insidensi HIV (%)
 - Eliminasi Malaria (Kab/Kota)
 - Merokok Usia ≤ 18 Tahun (%)
 - Obesitas Usia 18+ Tahun (%)
- ❖ Meningkatnya Kinerja Sistem Kesehatan dan Meningkatnya Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan Berkualitas
 - Kab/Kota yang mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap (%)
 - Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi (%)
 - RS Terakreditasi (%)
 - Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)
 - Puskesmas dengan Dokter sesuai standar (%)
 - Puskesmas dengan ketersediaan Obat Esensial (%)
 - Sediaan Farmasi memenuhi syarat (%)
 - Makanan memenuhi syarat (%)
- ❖ Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk
 - Cakupan Kepesertaan JKN (%)
 - Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN (Juta Jiwa)

Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Sementara Strategi RPJMN 2020-2024 adalah :

- Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Kesehatan Reproduksi
- Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
- Peningkatan Pengendalian Penyakit
- Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan

Adapun fokus Pemerintah Pusat saat ini adalah terkait Transformasi Kesehatan diantaranya :

- Transformasi pelayanan kesehatan primer menuju penguatan dan peningkatan pelayanan yang lebih berkualitas
- Transformasi pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka penyediaan layanan rujukan yang lebih berkualitas
- Transformasi menuju ke sistem ketahanan kesehatan yang tangguh
- Transformasi pembiayaan kesehatan dilakukan untuk menuju pembiayaan kesehatan yang lebih terintegrasi untuk mewujudkan ketersediaan, kecukupan, keberlanjutan, keadilan serta efektivitas dan efisiensi pada penyelenggaraan pembiayaan
- Transformasi SDM kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang kompeten, merata serta berkeadilan, sehingga tidak ada lagi puskesmas yang tanpa dokter, serta ada peningkatan yang signifikan dari persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar dan persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 (empat) dokter spesialis dasar dan 3 (tiga) dokter spesialis lainnya
- Transformasi teknologi kesehatan menuju pada digitalisasi kesehatan dan pemanfaatan teknologi yang lebih luas pada sektor kesehatan

Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 telah sejalan dengan Arah kebijakan dan strategi RPJMN 2015-2019 serta RPJMN 2020-2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan target kinerjanya pada tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 -2023 adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Indikator : % Area Perubahan (Reform) Reformasi Birokrasi

(Target : 100%)

2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator : Umur Harapan Hidup (UHH)

(Target : 70,80 Tahun)

Sasaran

Sasaran pembangunan bidang kesehatan tahun 2023 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun sasaran pokok yang akan dicapai sampai akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Target 2023
Nilai SAKIP OPD	81%
% Temuan Material	0 %

2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja	Target 2023
Angka Kematian Ibu (AKI)	90/100.000 Kelahiran Hidup
Angka Kematian Bayi (AKB)	4/1.000 Kelahiran Hidup
Prevalensi Balita Stunting	18,59 %

Adapun target indikator lainnya yang harus dicapai adalah :

Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	SUMBER DATA
1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	70,80 Tahun	BPS (Badan Pusat Statistik)
	Angka Kematian Ibu (AKI)	90/100.000 Kelahiran Hidup	Dinkes Provinsi Sulsel (Laporan Kab/Kota)
	Angka Kematian Bayi (AKB)	4/1.000 Kelahiran Hidup	Dinkes Provinsi Sulsel (Laporan Kab/Kota)
	Prevalensi Balita Stunting	18,59 %	Survey Status Gizi Indonesia (SSGI)

Indikator SPM

NO	INDIKATOR SPM PROVINSI	TARGET 2023
1	Jumlah Warga Negara yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%
2	Jumlah Warga Negara pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%

Indikator SDGs

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	Target 2023
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN					
TARGET 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan					
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas kesehatan	%	87,02	100
TARGET 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro					
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas kesehatan	%	89.43	93
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah)	Dinas kesehatan	%	95.5	95

1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-9 tahun yang berstatus kawin.	Dinas kesehatan	%	73	74.17
-----------	--	-----------------	---	----	-------

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	Target 2023
TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN					
TARGET 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun					
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas kesehatan	%	15.30	17
TARGET 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula					
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas kesehatan	%	30.59	18.59
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas kesehatan	%	17.64	23
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas kesehatan	%	70,82	85

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	Target 2023
TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA					
TARGET 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup					
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Dinas kesehatan	%	90,97	98
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas kesehatan	kematian per 100.000 kelahiran hidup	144	90/100.000 KH
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas kesehatan	%	89,43	93
TARGET 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000					
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas kesehatan	kematian per 1000 kelahiran hidup	991	4/1.000 KH
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas kesehatan	kematian per 1000 kelahiran hidup	919	4/1.000 KH
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas kesehatan	%	96,15	96

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	Target 2023
TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA					
TARGET 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan					
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinas kesehatan	%	3,10	7.02
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas kesehatan	%	4,7	17.58
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Dinas kesehatan	%	4,35	10.11
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Dinas kesehatan	Kab/ Kota	18	24
TARGET 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membayakan					
TARGET 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional					
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas kesehatan	%	73	74.17
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Dinas kesehatan	%	17,13	21.5

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	Target 2023
TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA					
TARGET 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang					
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Dinas kesehatan	Jiwa	8.200 Jiwa	1.000 jiwa
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas kesehatan	%	87,02	100
TARGET 3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat					
TARGET 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua					
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas kesehatan	%	90%	95%
TARGET 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil					
3.c.1*	Rasio Tenaga Kesehatan	Dinas kesehatan	Tenaga Kesehatan/100.000 penduduk	17/100.000 penduduk	23/100.000 penduduk

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2019)	Target 2023
Tujuan 6 : AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK					
TARGET 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan					
21.11	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas kesehatan	Desa / Kelurahan	3,047	3.047
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas kesehatan	Desa / Kelurahan	2.070	2.500



✚ Indikator Kinerja Program

3.3. Program dan Kegiatan

No	Program	Indikator Kinerja	Target 2023	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%
		2	% ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%
		3	% Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	0%
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	100%
		2	% Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan	100%
		3	% Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%
		4	% Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%
		5	% Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	7,5%
		6	% Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	13%
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1	Rasio Tenaga Kesehatan	23/100.000 Penduduk
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1	% Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	100%
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1	% Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	85%

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Program dan Kegiatan yang dirumuskan dalam pembangunan sektor kesehatan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain :

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah memprioritaskan antara lain pada aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas dalam pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya pelayanan bidang kesehatan.

Visi Kepala Daerah adalah "Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter" dimana diharapkan terwujud Provinsi Sulawesi Selatan yang "Bersih dan Melayani", "Terkoneksi", "Mandiri dan Sejahtera", "Sehat dan Cerdas" serta "Berkarakter". Sementara Misi yang dirumuskan terkait sektor Kesehatan adalah bagaimana mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif serta mewujudkan kualitas manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter.

Kinerja utama sektor Kesehatan adalah meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH), menurunkan Kematian Ibu dan Bayi, meningkatkan Status Gizi Masyarakat khususnya penanggulangan Stunting, Kekurangan Gizi (Underweight) dan Balita Kurus (Wasting), mengedalikan Penyakit Menular dan Tidak Menular serta meningkatkan upaya preventif dan promotif dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan prioritas untuk Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya Pembangunan RS Regional, Penanggulangan Stunting, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan implementasi Brigade Siaga Bencana.

- Pencapaian SDGs

Pencapaian SDGs sangat pula berpengaruh terhadap perumusan program dan kegiatan disebabkan terdapat beberapa tujuan dan indikator yang belum tercapai pada saat pelaksanaan MDGs dilanjutkan untuk dicapai melalui program SDGs antara lain Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Tujuan 2 Tanpa Kelaparan, Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera dan Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak. Adapun beberapa indikator yang masih perlu dicapai adalah penurunan angka kematian Ibu dan Anak, penurunan kasus Underweight dan Stunting, pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak

Menular serta pencapaian Universal Health Coverage melalui pemenuhan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

- Pencapaian NSPK dan SPM

Pencapaian SPM merupakan dasar utama penyusunan Program dan Kegiatan karena merupakan standar minimal yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

SPM Provinsi mewajibkan tercapainya Persentase Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan serta Persentase Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan.

Pada sisi lain, Dinas Kesehatan Provinsi memiliki fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pencapaian SPM tingkat Kabupaten/Kota. Dimana indikator SPM Kabupaten/Kota menekankan pada upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang meliputi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM), Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB), Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.

Kabupaten/Kota dan Provinsi bertanggungjawab terhadap tercapainya SPM Provinsi dan SPM Kabupaten/Kota.

- Prioritas Kementerian Kesehatan RI

Prioritas Kementerian Kesehatan RI menjadi standar bagi seluruh Provinsi untuk merumuskan program dan kegiatan, dimana arah kebijakan RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju Cakupan Kesehatan Semesta. Sementara indikator pembangunan kesehatan yang akan dicapai diantaranya meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak, meningkatnya Status Gizi Masyarakat, meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Faktor

Resiko Penyakit Tidak Menular, meningkatnya Kinerja Sistem Kesehatan, meningkatnya Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan Berkualitas, meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk serta penerapan Transformasi Kesehatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

- Rekapitulasi program dan kegiatan adalah jumlah Program sebanyak 5 (lima) Program dengan 17 Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan
- Lokasi program dan kegiatan berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 Kabupaten/Kota, meliputi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) dan di tingkat masyarakat.
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif tahun 2023 sebesar Rp. 236.559.788.802,- bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah prakiraan maju tahun 2024 sebesar Rp. 180.878.812.294,-

c. Rumusan program dan kegiatan yang disusun telah sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023.

d. Tabel rencana program dan kegiatan terlampir

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program yang merupakan penjabaran kebijakan, tujuan dan sasaran yang tertera dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Rancangan Renja Tahun 2023 memuat a). Indikator Kinerja Program/Kegiatan; b). Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan; c). Hasil Kegiatan d). Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif serta e). Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024. Rancangan Renja tersebut dapat dilihat secara detail pada matriks terlampir.



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ini, memuat sasaran program dan kegiatan yang akan dicapai selama tahun anggaran 2023 dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Kerja ini merupakan acuan bagi seluruh Bidang / Seksi / Sub Bagian lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Rencana kerja ini harus dijalankan secara bertanggung jawab, dilandasi komitmen dan dedikasi tinggi agar seluruh target yang ditetapkan dapat dicapai dengan hasil yang optimal sehingga pada akhirnya dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Gubernur-Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Makassar, Juli 2022

Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

dr. ARMAN BAUSAT, Sp.B., Sp.OT (K) Spine

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 196302241990101001

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

				Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Hasil Program Sub Kegiatan Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								236,559,788,802	180,878,812,294				
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								75,381,961,476	96,505,707,126				
1	02	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								442,434,400	419,837,655				
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100% 0% %	3 Dokumen	100 %	176,836,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100% 100% 0% %	140,958,936
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tamalanrea	100% 100% 0% %	1 Dokumen	100 %	18,694,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100% 100% 0% %	19,629,225
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tamalanrea	100% 100% 0% %	1 Dokumen	100 %	19,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100% 100% 0% %	20,790,000
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tamalanrea	100% 100% 0% %	1 Dokumen	100 %	17,729,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100% 100% 0% %	18,616,500
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tamalanrea	100% 100% 0% %	1 Dokumen	100 %	16,651,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100% 100% 0% %	17,483,844
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tamalanrea	100% 100% 0% %	6 Laporan	100 %	192,723,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan	100% 100% 0% %	202,359,150



1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									63,468,685,171				89,619,479,880	
						% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	100% 100% 0%	532 Orang/ Bulan	100 %		63,116,799,771	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan	100% 100% 0%		89,250,000,000
						Berdasarkan LHP										Berdasarkan LHP			
						% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	100% 100% 0%	12 Dokumen	100 %		20,253,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan	100% 100% 0%		21,265,650
						Berdasarkan LHP										Berdasarkan LHP			
						% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengecekan/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	100% 100% 0%	100 Dokumen	100 %		270,725,500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan	100% 100% 0%		284,261,880
						Berdasarkan LHP										Berdasarkan LHP			
						% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	100% 100% 0%	2 Laporan	100 %		5,171,900	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan	100% 100% 0%		5,430,600
						Berdasarkan LHP										Berdasarkan LHP			
						% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Terpenuhinya Dokumen dan Laporan Koordinasi Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuang Perangkat Daerah Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Terpenuhinya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	100% 100% 0%	19 Laporan	100 %		50,563,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan	100% 100% 0%		53,091,150
						Berdasarkan LHP	SKPD									Berdasarkan LHP			
						% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terpenuhinya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	100% 100% 0%	1 Dokumen	100 %		5,172,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan	100% 100% 0%		5,430,600
						Berdasarkan LHP										Berdasarkan LHP			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Hasil Program Sub Kegiatan Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						159,999,110				168,000,000		
1.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	100% 100% 0% %	1 Dokumen	100 %	49,999,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100% 100% 0% %	52,500,000
1.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	100% 100% 0% %	1 Laporan	100 %	109,999,210	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100% 100% 0% %	115,500,000
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1,807,273,892				2,111,793,262		
1.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100% 0% %	0 Paket	100 %	0		% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100% 100% 0% %	0
1.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100% 0% %	26 Dokumen	100 %	1,807,273,892	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100% 100% 0% %	1,928,043,262

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Hasil Program Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	100% 100% 0% %	30 Orang 100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100% 100% 0% %	105,000,000
1.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	100% 100% 0% %	100 Orang 100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100% 100% 0% %	78,750,000
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							864,743,756					663,123,404
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terkelolanya Administrasi Umum Kantor	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	100% 100% 0% %	15 Paket 100 %	149,499,750	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100% 100% 0% %	126,000,000
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terkelolanya Administrasi Umum Kantor	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	100% 100% 0% %	36 Paket 100 %	353,709,306	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100% 100% 0% %	157,500,000
1.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terkelolanya Administrasi Umum Kantor	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	100% 100% 0% %	1 Paket 100 %	80,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100% 100% 0% %	84,000,000
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terkelolanya Administrasi Umum Kantor	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	100% 100% 0% %	7 Paket 100 %	31,545,900	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100% 100% 0% %	33,123,404
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkelolanya Administrasi Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100% 0% %	1 Laporan 100 %	249,988,800	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100% 100% 0% %	262,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Hasil Program Sub Kegiatan Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
1 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						65,000,000				68,250,000	
1 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terkelolanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	100% 100% 0% %	3 Paket 100 %	65,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100% 100% 0% %	68,250,000
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						859,878,648				3,066,722,925	
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terkelolanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	100% 100% 0% %	12 Laporan 100 %	859,878,648	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100% 100% 0% %	3,066,722,925
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						7,713,946,499				388,500,000	
1 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	100% 100% 0% %	34 Unit 100 %	299,990,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100% 100% 0% %	315,000,000
1 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	100% 100% 0% %	1 Unit 100 %	7,344,401,499	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100% 100% 0% %	0
1 02 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	100% 100% 0% %	1 Unit 100 %	69,555,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100% 100% 0% %	73,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Hasil Program Sub Kegiatan Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						155,824,063,526				67,180,615,358		
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						123,221,467,002				36,071,474,759		
1 02 02 1.01 01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Terperuhnya Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	1 Unit	100 %	114,155,556,456	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	100% 100% 100% 7,5% 13% %	0
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Terperuhnya Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan	Kota Makassar, Tamalanrea	100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	1021 Unit	100 %	149,997,215	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	21,249,375,000

					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Hasil Program Sub Kegiatan Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja Tolak Ukur Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; %	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	1063 Unit	100 %	448,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
						Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);									
						% Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)									
						Kehidupan (HPK)									
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan		100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	25 Unit	100 %	87,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Hasil Program Sub Kegiatan Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	14 Unit	100 %	362,887,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	732,560,875
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	1 Dokumen	100 %	285,958,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	300,255,900

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Hasil Program Sub Kegiatan Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	3 Paket	100 %	7,730,967,631	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	13,789,282,984
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								31,545,692,524				29,999,391,399
1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi sesuai Standar Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Terlaksananya Layanan Kesehatan UKP dan UKM Rujukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	91015 orang 0 Orang	100 %	1,276,987,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	1,321,592,790

					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Hasil Program Sub Kegiatan Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	   	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100% 100% 7,5% 13% %	1 Dokumen	100 %	258,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	100% 100% 100% 7,5% 13% %	271,005,000
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	  	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100% 100% 7,5% 13% %	1 Dokumen	100 %	21,927,097,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Penguatan Penguatan Intervensi Stunting	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	100% 100% 100% 7,5% 13% %	21,162,304,695

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Hasil Program Sub Kegiatan Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	  	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100% 100% 100% 13% %	1 Dokumen	100 %	163,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	100% 100% 100% 100% 13% %	171,780,000
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	 	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100% 100% 100% 13% %	1 Dokumen	100 %	380,495,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	100% 100% 100% 100% 13% %	399,519,855

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Hasil Program Sub Kegiatan Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Terlaksananya Layanan Kesehatan UKP dan UKM Rujukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	1 Dokumen 100 %	1,140,000,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Hibah	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	1,274,080,710
						Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)										
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Layanan Kesehatan UKP dan UKM Rujukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	1 Dokumen 100 %	1,107,776,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	1,181,373,900
						Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Hasil Program Sub Kegiatan Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	Terlaksananya Layanan Kesehatan UKP dan UKM Rujukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	130 Orang	100 %	1,149,493,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	155,358,000
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Layanan Kesehatan UKP dan UKM Rujukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	1 Dokumen	100 %	172,750,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	199,500,000

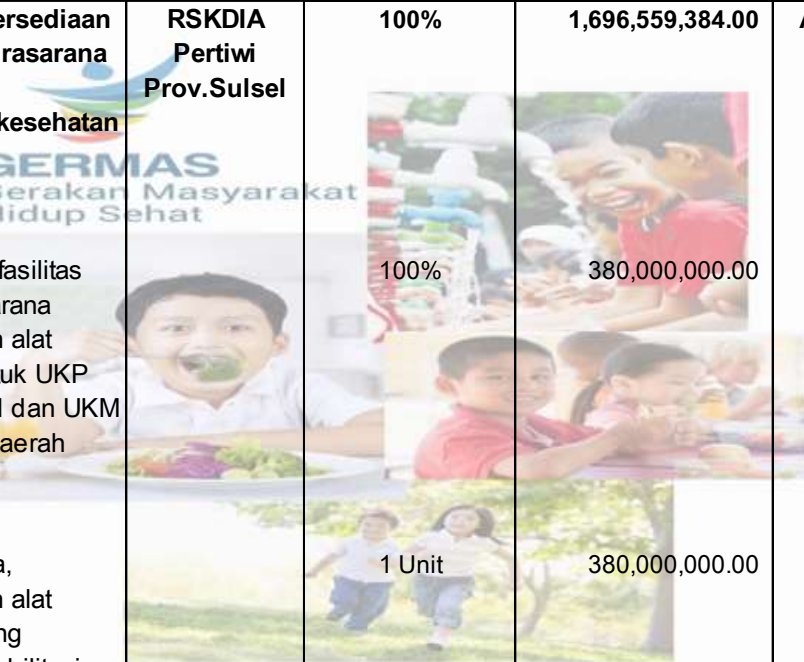

					Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Hasil Program Sub Kegiatan Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
		% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; %									% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; %				
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	 	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Layanan Kesehatan UKP dan UKM Rujukan	Semua Kab/Kota, 100% Semua Kecamatan, 100% Semua, 100% 7,5% Seluruh Kelurahan, 13% %	1 Dokumen 100 %	158,332,600 (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	100% 100% 100% 7,5% 13% %	151,252,500
		Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);									Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)				
		% Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)									Kesehatan; % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Hasil Program Sub Kegiatan Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
1 02 02 1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								191,904,000			201,499,200		
1 02 02 1.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terkelolanya Sistem Informasi Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	1 Dokumen	100 %	131,904,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	138,499,200
1 02 02 1.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terkelolanya Sistem Informasi Kesehatan		100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	3 Dokumen	100 %	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	100% 100% 100% 100% 7,5% 13% %	63,000,000

1	02	02	1.04	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Hasil Program Sub Kegiatan Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi										865,000,000			% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)		908,250,000
						Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; %												% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)		
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; %	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Terpenuhinya Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100% 100% 100% 13% %	100 %			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		740,000,000		100% 100% 100% 100% 13% %		
																		% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)		
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Terpenuhinya Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 13% %	0 Unit 31 Unit	100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		125,000,000		100% 100% 100% 100% 100% 100% 13% %		131,250,000
																		% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)		

				Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Hasil Program Sub Kegiatan Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						1,677,887,000				13,311,782,085	
1	02	03	1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						325,006,000				11,891,256,300	
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Terpenuhnya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23/100.000 Penduduk	100 %	325,006,000 (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio Tenaga Kesehatan	23/100.000 Penduduk
1	02	03	1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Pr						1,352,881,000				1,420,525,785	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Kompeten	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23/100.000 Penduduk	100 %	926,280,000 (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio Tenaga Kesehatan	23/100.000 Penduduk
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Kompeten	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23/100.000 Penduduk	100 %	426,601,000 (PAD)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio Tenaga Kesehatan	23/100.000 Penduduk

					Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Hasil Program Sub Kegiatan Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						539,376,300				587,345,115		
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)						539,376,300				587,345,115		
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	% Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	Tersedianya Pedagang Besar Farmasi Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Sesuai Standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	189 Sarana	100 %	475,376,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	100 %	499,145,115
1	02	04	1.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	% Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Tersedianya Pedagang Besar Farmasi Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Sesuai Standar	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	64,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	100 %	88,200,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat	RSKDIA Pertiwi Prov.Sulsel	100%	1,696,559,384.00	APBD DAK		100%	5,497,498,717.28
	Kegiatan 1. - Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi	Tersedianya fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi		100%	380,000,000.00			100%	2,270,000,000.00
	Sub Kegiatan 1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan RS	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit		1 Unit	380,000,000.00			1 Unit	1,000,000,000.00
	2. Pengadaan Sarana difasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah sarana difasilitas layanan kesehatan yang disediakan		50 Unit	-			7 Jenis	1,270,000,000.00

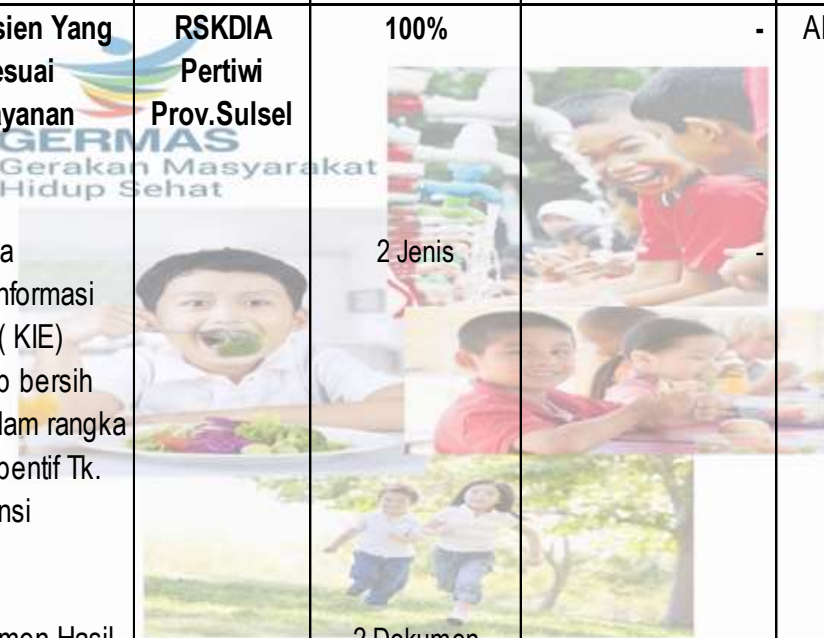
**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023**




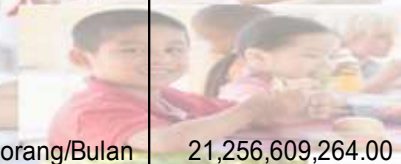


Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.08.0000 RS KHUSUS DAERAH DADI
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.08.0000 RS KHUSUS DAERAH DADI

Kode	Urusan Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (pp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							181,793,019,210				190,882,670,169	
1 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							117,159,700,560				123,017,685,587	
1 02 01 1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							62,235,940,253				65,347,737,265	
1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6300 Orang/Bulan	62,235,940,253	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				65,347,737,265	
1 02 01 1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4,923,760,307				5,169,948,322	
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan	4,923,760,307	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				5,169,948,322	
1 02 01 1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							50,000,000,000				52,500,000,000	
1 02 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit Kerja	50,000,000,000	Pendapatan dari BLUD				52,500,000,000	
1 02 02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							64,633,318,650				67,864,984,582	
1 02 02 1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							64,633,318,650				67,864,984,582	
1 02 02 1.01 03	Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit	25,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				26,250,000,000	
1 02 02 1.01 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Unit	13,300,000,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				13,965,000,000	
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		62 Unit	25,000,000,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				26,250,000,000	
1 02 02 1.01 14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)		Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35 Paket	1,333,318,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,399,984,582	
TOTAL								181,793,019,210				190,882,670,169		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Ketuaran Hasil	Rencana Tahun 2023		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Target		
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								3,136,500,500					3,293,362,610
1 02 05 1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi								470,947,200					494,497,500
1 02 05 1.01 01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	% Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Pemberdayaan, Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85% (20 Kab/Kota) %	1 Dokumen	100 %	470,947,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		% Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	85% (20 Kab/Kota) %	494,497,500
1 02 05 1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi								1,202,807,000					1,262,977,882
1 02 05 1.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	% Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85% (20 Kab/Kota) %	1 Dokumen	100 %	1,202,807,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		% Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	85% (20 Kab/Kota) %	1,262,977,882
1 02 05 1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi								1,462,746,300					1,535,887,228
1 02 05 1.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	% Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85% (20 Kab/Kota) %	1 Dokumen	100 %	1,462,746,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		% Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	85% (20 Kab/Kota) %	1,535,887,228
									TOTAL	236,559,788,802				180,878,812,294

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan 2 - Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP, Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi	- Tersedianya layanan kesehatan untuk UKP, Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi		100%	1,316,559,384.00			100%	3,227,498,717.28
	Sub Kegiatan Operasional pelayanan RS	Jumlah Dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit		7071 pasien	1,316,559,384.00			7778 Dokumen	3,227,498,717.28
	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan Kegiatan 1 Pengembangan Mutru dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan tk.daerah Provinsi	Meningkatnya Kompetensi teknis SDM Meningkatnya Mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan Tk.daerah Provinsi	RSKDIA Pertiwi Prov.Sulsel	100%	-	APBD		100%	300,000,000.00
	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah sumbe daya manusia kesehatan kompeten dan kualifikasi meningkat		100%	-			100%	300,000,000.00
				30 orang	-			50	300,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Pasien Yang tertangani sesuai Standar Pelayanan	RSKDIA Pertiwi Prov.Sulsel	100%	-	APBD		100%	200,000,000.00
	Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif, prepentif Tk. Daerah Provinsi	Terlaksananya Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif, prepentif Tk. Daerah Provinsi		2 Jenis	-			2 Jenis	200,000,000.00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi kegiatan dan perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku		2 Dokumen	-			2 Dokumen	200,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penunjang urusan Pemerintah daerah Provinsi	Persentase Pencapaian Pendapatan RSKD Ibu dan Anak Pertiwi	RSKDIA Pertiwi Prov.Sulsel	100%	33,506,609,264.00	APBD BLUD		100%	36,485,136,502.00
	Kegiatan 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan TPP ASN		100%	21,256,609,264.00			100%	23,255,136,502.00
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		213 orang/Bulan	21,256,609,264.00			213 orang/Bulan	23,255,136,502.00
	Kegiatan 2 Peningkatan Pelaksanaan BLUD	Terlaksananya pelayanan RS		100%	12,250,000,000.00			100%	13,230,000,000.00
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan pelayanan penunjang		1 Unit Kerja	12,250,000,000.00			1 Unit Kerja	13,230,000,000.00

Tabel TC.33
Rancangan Akhir Renja
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah: Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Hasil Kegiatan	Target Hasil Kegiatan	Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Renja	Usulan Masyarakat yang diakomodir					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	38%			RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH		31,503,557,985	APBD		20%	36,603,249,277
		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	90%								90%	
		Persentase ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	85%								95%	
000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	100%			RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH		16,414,620,369			100%	20,518,275,461
000	Perencanaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan nya setiap bulan	2.268 OB					16,414,620,369			170 orang/bulan	20,518,275,461
000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN				RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH					100%	130,955,000
000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta kelengkapannya									170 Paket	130,955,000
000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100 %			RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH						
000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan										

0	00	x.xx.01	x.xx.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	89%			RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH		1,588,937,616		100%	2,104,018,816
0	00	x.xx.01	x.xx.01.1.08	x.xx.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya biaya tagihan air dan listrik tepat waktu	12 Bulan								
0	00	x.xx.01	x.xx.01.1.08	x.xx.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan gajinya	792 OB					1,588,937,616		12 Laporan	2,104,018,816
0	00	x.xx.01	x.xx.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%			RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH				100%	200,000,000
0	00	x.xx.01	x.xx.01.1.09	x.xx.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara Jumlah genset yang dipelihara Jumlah Kendaraan roda 4 yang dipelihara	1 Unit 1 Unit 4 Unit								
0	00	x.xx.01	x.xx.01.1.09	x.xx.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara dan direhabilitasi	1 Paket							1 Unit	200,000,000
0	00	x.xx.01	x.xx.01.1.09	x.xx.01.1.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara dan direhabilitasi	1 Paket								
0	00	x.xx.01	x.xx.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD	3.85%			RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH		13,500,000,000	BLUD	1.11%	13,650,000,000
0	00	x.xx.01	x.xx.01.1.10	x.xx.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pendapatan BLUD (Rp)	Rp. 13.500.000.000					13,500,000,000		Rp. 13.650.000.000	13,650,000,000
1	02	1.02.02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan sarana dan prasarana RS Khusus Ibu dan Anak dalam kondisi baik	95%			RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH			APBD	100%	3,230,000,000
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan yang diadakan	90%			RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH				95%	3,030,000,000
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Fasilitas Pelayanan yang direhabilitasi / diadakan	1 Paket							1 Unit	500,000,000
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang diadakan	10 Unit							4 Unit	2,000,000,000
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah sarana di fasilitas layanan kesehatan	5 Unit							10 Unit	130,000,000

1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas layanan kesehatan yang diadakan	10 Unit							1 Unit	200,000,000.				
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang dipelihara	50 Jenis												
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas layanan kesehatan yang dipelihara	10 jenis												
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas layanan kesehatan yang dipelihara	4 Paket							1 Unit	200,000,000				
1	02	1.02.02	1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan	100%			RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH				100%	200,000,000				
1	02	1.02.02	1.02.02.1.04	1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah survey akreditasi rumah sakit yang dilaksanakan	1 Dokumen							1 Dokumen	200,000,000				
1	02	1.02.03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi Sumber daya kesehatan	55.7%			RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH		APBD		100%	500,000,000				
1	02	1.02.03	1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan mutu dan kompetensi SDM	55.7%			RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH				64.0%	500,000,000				
1	02	1.02.03	1.02.03.1.02	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah pegawai baik laki-laki dan perempuan yang mengikuti peningkatan mutu dan kompetensi	30 Orang							30 Orang	300,000,000				
1	02	1.02.03	1.02.03.1.02	1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan baik laki-laki dan perempuan yang dibina dan diawasi	1 Dokumen							1 Dokumen	200,000,000				
JUMLAH																31,503,557,985			40,333,249,277.0

**MATRIX RENCANA KERJA ANGGARAN BERDASARKAN PAGU INDIKATIF RKPD PROV. SULSEL
PADA RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH GIGI DAN MULUT
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO. REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
02.05	UPT RSK GIGI DAN MULUT	24,802,045,395.00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3,825,000,000.00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2,850,000,000.00	
1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	300,000,000.00	Disediakan untuk biaya pemeliharaan Gedung dan Ruang Klinik RS
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1,350,000,000.00	Disediakan untuk pengadaan alat alat kesehatan dan kedokteran pada kelengkapan UGD dan Rawat Inap
1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,200,000,000.00	Disediakan untuk pengadaan Obat, Bahan dan Alat-alat habis pakai kebutuhan RS

NO. REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	975,000,000.00	
1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	975,000,000.00	Disediakan untuk Oprasional RS dan Gaji Non ASN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	379,977,365.00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	379,977,365.00	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	379,977,365.00	Disediakan untuk Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20,597,068,030.00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,597,068,030.00	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,597,068,030.00	Disediakan untuk Gaji dan Tunjangan bagi ASN
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	8,000,000,000.00	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	8,000,000,000.00	Disediakan untuk Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
JUMLAH PAGU ANGGARAN		24,802,045,395.00	

TABEL 33
Rancangan Akhir RENJA
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : UPT Pelatihan Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan								
1	02	02							
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	150,004,744.00	APBD Provinsi		100%	2,077,432,222.00
1	02	02	1	01					
	Penyediaan fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Ketersediaannya fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	150,004,744.00	APBD Provinsi		100%	1,589,320,462.00
1	02	02	1	01	10				
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Obat-obatan dan Bahan Kimia yang tersedia	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	150,004,744.00	APBD Provinsi		100%	1,031,537,962.00
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan / Peralatan Laboratorium Kesehatan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	-	-	-	0.00	-		100%	557,782,500.00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi	-	-	-	0.00	-		100%	231,000,000.00
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	-	-	-	0.00	-		100%	231,000,000.00
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	0.00	-		100%	257,111,760.00
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	-	-	-	0.00	-		100%	257,111,760.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	49,637,460.00	APBD Provinsi		100%	128,555,880.00
1 02 03 1 02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	32,729,460.00	APBD Provinsi		100%	128,555,880.00
1 02 03 1 02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan gizi yang mengikuti pelatihan PAGT	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	32,729,460.00	APBD Provinsi		100%	128,555,880.00
1 02 03 1 01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	16,908,000.00	APBD Provinsi		100%	-
1 02 03 1 01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Rencana Pelatihan Peningkatan SDM Balai Pelatihan Teknis Kesehatan	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	16,908,000.00	APBD Provinsi		100%	-
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	1,322,294,166.00	APBD Provinsi		100%	2,504,013,419.00
1 02 01 1 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	33,816,000.00	APBD Provinsi		100%	78,800,028.00
1 02 01 1 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Jumlah Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	33,816,000.00	APBD Provinsi		100%	77,133,528.00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	0.00	-			1,666,500.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 01 1 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	16,908,000.00	APBD Provinsi		100%	25,711,176.00
1 02 01 1 05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	16,908,000.00	APBD Provinsi		100%	25,711,176.00
1 02 01 1 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	132,398,400.00	APBD Provinsi		100%	396,281,560.00
1 02 01 1 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	132,398,400.00	APBD Provinsi		100%	261,392,560.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	0.00	-		100%	134,889,000.00
1 02 01 1 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	463,102,000.00	APBD Provinsi		100%	312,737,785.00
1 02 01 1 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	5,000,000.00	APBD Provinsi		100%	13,402,500.00
1 02 01 1 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	13,082,000.00	APBD Provinsi		100%	100,040,650.00
1 02 01 1 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	4,642,000.00	APBD Provinsi		100%	27,946,635.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 01 1 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	3,500,000.00	APBD Provinsi		100%	13,350,000.00
1 02 01 1 06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	14,943,000.00	APBD Provinsi		100%	97,480,000.00
1 02 01 1 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	421,935,000.00	APBD Provinsi		100%	60,518,000.00
1 02 01 1 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	199,998,720.00	APBD Provinsi		100%	344,061,000.00
1 02 01 1 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	199,998,720.00	APBD Provinsi		100%	344,061,000.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0.00	-		100%	55,331,900.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	-	-	-	0.00	-		100%	55,331,900.00
1 02 01 1 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	449,354,046.00	APBD Provinsi		100%	1,134,860,442.00
1 02 01 1 08 02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	149,331,156.00	APBD Provinsi		100%	438,909,450.00
1 02 01 1 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jumlah jasa pelayanan umum kantor	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	300,022,890.00	APBD Provinsi		100%	695,950,992.00

1	02	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan perencanaan perangkat daerah	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100%	16,908,000.00	APBD Provinsi	100%	29,349,976.00
						Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	-	-	-	0.00	-	100%	32,121,176.00
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	-	-	-	0.00	-	100%	6,384,200.00
									JUMLAH	1,421,936,370.00			4,710,001,521.00

Tabel T-C. 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN ASPIRASI MASYARAKAT TAHUN 2023
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	TGL USUL	PENGUSUL	PROFIL	URUSAN	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN	USUL KE	SKPD TUJUAN AWAL	SKPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI BAPPEDA (MITRA OPD)	KATEGORI USULAN	KOEFISIEN	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
23200420240	17-03-2022	BAPPEDA Kab. Bone	Bappeda Kab/Kota	Kesehatan	Peningkatan Upaya penanganan gizi kurang dan Stunting	Masih tingginya prevalensi Balita yang mengalami Stunting (34,1%)	Kab. Bone, Kab. Bone	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	Provinsi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Rekomendasi : - dapat ditindak lanjut dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah. - perhatikan kelengkapan dokumen pendukung. - sesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah. Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Usulan diterima, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dalam bentuk pendampingan dan Makanan Tambahan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 250000000	Rekomendasi : Usulan diterima, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dalam bentuk pendampingan dan Makanan Tambahan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 250000000	Usulan disetujui
23200709661	11-03-2022	BAPPEDA Kab. Bulukumba	Bappeda Kab/Kota	Kesehatan	Peningkatan Upaya penanganan gizi kurang dan Stunting	masih kurangnya pengadaan makanan tambahan untuk gizi Stunting	21 Puskesmas, Kab. Bulukumba	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	Provinsi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Rekomendasi : - usulan ini dapat ditindak lanjut dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah - agar memperhatikan kelengkapan dokumen pendukung - disesuaikan dengan pagu dan keuangan daerah aikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah. Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Usulan diterima, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dalam bentuk pendampingan dan Makanan Tambahan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 500000000	Rekomendasi : Usulan diterima, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dalam bentuk pendampingan dan Makanan Tambahan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 500000000	Usulan disetujui
23109805887	16-03-2022	BAPPEDA Kab. Enrekang	Bappeda Kab/Kota	Kesehatan	Peningkatan Upaya penanganan gizi kurang dan Stunting	Masih tingginya balita penderita stunting dan semakin berkurangnya anggaran untuk penanganan stunting	Jl. Sultan Hasanuddin No.56 Enrekang, Kab. Enrekang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	Provinsi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Rekomendasi : - usulan ini dapat ditindak lanjut dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah - agar memperhatikan kelengkapan dokumen pendukung - disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah. Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Usulan diterima, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran (media promosi dan bimtek/sosialisasi terkait penurunan stunting) Koefisien : 2 paket Anggaran : 250000000	Rekomendasi : Usulan diterima, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran (media promosi dan bimtek/sosialisasi terkait penurunan stunting) Koefisien : 2 paket Anggaran : 250000000	Usulan disetujui
6.23422613	18-03-2022	BAPPEDA Kab. Enrekang	Bappeda Kab/Kota	Kesehatan	Pengawasan PBF Cabang dan PAK cabang	Belum adanya Bimbingan dan Pengawasan PBF dan PAK (Permintaan Bimbingan dan Pengawasan PBF dan PAK)	Belum adanya Bimbingan dan Pengawasan PBF dan PAK, Kab. Enrekang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	Provinsi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Rekomendasi : - dapat ditindak lanjut dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah - perhatikan kelengkapan dokumen pendukung (proposai, nama kelompok, lokasi, dll) - sesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Dapat diterima dengan ketersediaan anggaran dalam bentuk Bimbingan teknis Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10000000	Rekomendasi : Dapat diterima dengan ketersediaan anggaran dalam bentuk Bimbingan teknis Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10000000	Usulan disetujui
23202840504	17-03-2022	BAPPEDA Kab. Kepulauan Selayar	Bappeda Kab/Kota	Kesehatan	Peningkatan cakupan layanan kesehatan masyarakat	Untuk mendorong pengelolaan data dan informasi kesehatan pada masa/pasca pandemi COVID-19 dibutuhkan dukungan penganggaran yang sepenuhnya dapat diakomodir di daerah	Benteng, Kab. Kepulauan Selayar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	Provinsi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Rekomendasi : - dapat ditindak lanjut dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah. - perhatikan kelengkapan dokumen pendukung. - disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah. Koefisien : 0 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : Dapat diterima disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dalam bentuk Penyelidikan Epidemiologi Daerah Kepulauan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 300000000	Rekomendasi : Dapat diterima dengan ketersediaan anggaran dalam bentuk Penyelidikan Epidemiologi Daerah Terpencil dan Kepulauan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 300000000	Usulan disetujui
23209033688	17-03-2022	BAPPEDA Kab. Toraja Utara	Bappeda Kab/Kota	Kesehatan	Peningkatan jumlah alat-alat kesehatan / peralatan laboratorium	Pengadaan Alat kesehatan unit transfusi darah	Kabupaten Toraja Utara, Kab. Toraja Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	Provinsi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Rekomendasi : - dapat ditindak lanjut dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah. - memperhatikan kelengkapan dokumen pendukung. - disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah. Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER				Rekomendasi : disesuaikan dengan ketersediaan anggaran - prioritas bank darah senilai Rp. 500.000.000,- untuk UTD RSUD Pongtiku Kab. Toraja Utara Koefisien : 1 unit Anggaran : 500000000	Rekomendasi : disesuaikan dengan ketersediaan anggaran - prioritas bank darah senilai Rp. 500.000.000,- untuk UTD RSUD Pongtiku Kab. Toraja Utara Koefisien : 1 unit Anggaran : 500000000	Usulan disetujui

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD SULSEL
TAHUN 2023**

NO	TGL USUL	PENGUSUL	FRAKSI	URUSAN	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI SETWAN	REKOMENDASI BAPPEDA (MITRA OPD)	KATEGORI USULAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
R56228630419e0f	09-03-2022	A. INA KARTIKA SARI, SH, M.SI	GOLKAR	Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Tirai PVC Rumah Sakit Untuk Rumah Sakit Labuang Baji	Kota Makassar, Kota Makassar	Mamajang	Seluruh Kelurahan/Desa	300 Meter	DINAS KESEHATAN	RSUD LABUANG BAJI	Rekomendasi : Membutuhkan adanya Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Koefisien : 300 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : - disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah - dapat ditindak lanjuti dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah Koefisien : 300 Meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER			Diteruskan ke Forum SKPD
R5622863a6cd999	09-03-2022	A. INA KARTIKA SARI, SH, M.SI	GOLKAR	Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Tirai PVC Rumah Sakit Untuk Rumah Sakit Sayang Rakyat	Kota Makassar, Kota Makassar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	200 Meter	DINAS KESEHATAN	RSUD SAYANG RAKYAT	Rekomendasi : Membutuhkan adanya Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Koefisien : 200 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : - disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah - dapat ditindak lanjuti dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah Koefisien : 200 Meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER			Diteruskan ke Forum SKPD
R562286422ea270	09-03-2022	A. INA KARTIKA SARI, SH, M.SI	GOLKAR	Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Tirai PVC Rumah Sakit Untuk Rumah Sakit Dadi	Kota Makassar, Kota Makassar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	250 Meter	DINAS KESEHATAN	RS KHUSUS DAERAH DADI	Rekomendasi : Membutuhkan adanya Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Koefisien : 250 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : - dapat ditindak lanjuti dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah - disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 250 Meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER			Diteruskan ke Forum SKPD
R5622864bcae171	09-03-2022	A. INA KARTIKA SARI, SH, M.SI	GOLKAR	Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Tirai PVC Rumah Sakit Untuk Rumah Sakit Haji	Kota Makassar, Kota Makassar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	240 Meter	DINAS KESEHATAN	RSUD HAJI MAKASSAR	Rekomendasi : Membutuhkan adanya Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Koefisien : 240 Meter Anggaran : 0	Rekomendasi : - dapat ditindak lanjuti dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah - disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 240 Meter Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER			Diteruskan ke Forum SKPD
R5622c8c9f3d4f5	12-03-2022	A. JANUAR JAURY DHARWIS, SE	DEMOKR	Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pengembangan system/Web	Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Kota Makassar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket	DINAS KESEHATAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Rekomendasi : Membutuhkan adanya Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : - dapat ditindak lanjuti dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah - disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah - agar memperhatikan kelengkapan dokumen pendukung Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER			Diteruskan ke Forum SKPD
R5622c11e3ef6a6	12-03-2022	Haidar Majid, S. SOS	DEMOKR	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	Jl. Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar	Biringkanaya	Sudiang Raya	2 kali	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Rekomendasi : Membutuhkan adanya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Koefisien : 2 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : - dapat ditindak lanjuti dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah - disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah - agar memperhatikan kelengkapan dokumen pendukung Koefisien : 2 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : usulan diterima disesuaikan pagu anggaran yang tersedia Koefisien : 2 kali Anggaran : 200000000	Rekomendasi : usulan diterima disesuaikan pagu anggaran yang tersedia Koefisien : 2 kali Anggaran : 200000000	Usulan disetujui

NO	TGL USUL	PENGUSUL	FRAKSI	URUSAN	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI SETWAN	REKOMENDASI BAPPEDA (MITRA OPD)	KATEGORI USULAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS
R562213646649	12-03-2022	HAIDAR MAJID, S. SOS	DEMOKR	Kesehatan	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	II, perintis Kemendesaan, Kota Makassar	Panakkukang II	Panakkukang	2 kali	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Rekomendasi : Membutuhkan adanya peningkatan kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Koefisien : 2 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat di tindak lanjut dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah - disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah - agar memperhatikan kelengkapan dokumen pendukung Koefisien : 2 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Koefisien : 2 kali Anggaran : 20000000	Rekomendasi : Usulan diterima disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Koefisien : 2 kali Anggaran : 20000000	Usulan diastujui
R5622716766645	08-03-2022	ISMAIL BAHTIAR, SKM	PKS	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Workshop pembinaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumbdaya Masyarakat)	Sulawesi Selatan, Kab. Bone	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	200 Orang	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Rekomendasi : Membutuhkan adanya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Koefisien : 5000 Orang Anggaran : 0	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 5000 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 200 Orang Anggaran : 20000000	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 200 Orang Anggaran : 20000000	Usulan diastujui
R5622718c7aa10	08-03-2022	ISMAIL BAHTIAR, SKM	PKS	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Workshop pembinaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumbdaya Masyarakat)	Sulawesi Selatan, Kab. Maros	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	200 Orang	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Rekomendasi : Membutuhkan adanya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Koefisien : 5000 Orang Anggaran : 0	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 5000 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 200 Orang Anggaran : 20000000	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 200 Orang Anggaran : 20000000	Usulan diastujui
R562271913ec72c	08-03-2022	ISMAIL BAHTIAR, SKM	PKS	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Workshop pembinaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumbdaya Masyarakat)	Sulawesi Selatan, Kab. Pangkajene Kepulauan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	200 Orang	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Rekomendasi : Membutuhkan adanya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Koefisien : 5000 Orang Anggaran : 0	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 5000 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 200 Orang Anggaran : 20000000	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 200 Orang Anggaran : 20000000	Usulan diastujui
R56227194c9c0db	08-03-2022	ISMAIL BAHTIAR, SKM	PKS	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Workshop pembinaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumbdaya Masyarakat)	Sulawesi Selatan, Kab. Barru	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	200 Orang	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Rekomendasi : Membutuhkan adanya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Koefisien : 5000 Orang Anggaran : 0	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 5000 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 200 Orang Anggaran : 20000000	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 200 Orang Anggaran : 20000000	Usulan diastujui
R5622719704808b	08-03-2022	ISMAIL BAHTIAR, SKM	PKS	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Workshop pembinaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumbdaya Masyarakat)	Sulawesi Selatan, Kota Pare Pare	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	200 Orang	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Rekomendasi : Membutuhkan adanya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Koefisien : 5000 Orang Anggaran : 0	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 5000 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 200 Orang Anggaran : 20000000	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 200 Orang Anggaran : 20000000	Usulan diastujui
R5622719916e42f	08-03-2022	ISMAIL BAHTIAR, SKM	PKS	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Workshop pembinaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumbdaya Masyarakat)	Sulawesi Selatan, Kab. Wajo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	200 Orang	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Rekomendasi : Membutuhkan adanya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Koefisien : 5000 Orang Anggaran : 0	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 5000 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 200 Orang Anggaran : 20000000	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 200 Orang Anggaran : 20000000	Usulan diastujui
R5622719e509b51	08-03-2022	ISMAIL BAHTIAR, SKM	PKS	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Workshop pembinaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumbdaya Masyarakat)	Sulawesi Selatan, Kab. Soppeng	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	200 Orang	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Rekomendasi : Membutuhkan adanya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Koefisien : 5000 Orang Anggaran : 0	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 5000 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 200 Orang Anggaran : 20000000	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 200 Orang Anggaran : 20000000	Usulan diastujui
R5622725e6f60988	08-03-2022	ISMAIL BAHTIAR, SKM	PKS	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Workshop pembinaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumbdaya Masyarakat)	Sulawesi Selatan, Kab. Sinjai	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	200 Orang	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Rekomendasi : Membutuhkan adanya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Koefisien : 5000 Orang Anggaran : 0	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 5000 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 200 Orang Anggaran : 20000000	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 200 Orang Anggaran : 20000000	Usulan diastujui
R5622726441b916	08-03-2022	ISMAIL BAHTIAR, SKM	PKS	Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Workshop pembinaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumbdaya Masyarakat)	Sulawesi Selatan, Kab. Bututumba	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	200 Orang	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Rekomendasi : Membutuhkan adanya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Koefisien : 5000 Orang Anggaran : 0	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 5000 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 200 Orang Anggaran : 20000000	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 200 Orang Anggaran : 20000000	Usulan diastujui

NO	TGL USUL	PENGUSUL	FRAKSI	URUSAN	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI SETWAN	REKOMENDASI BAPPEDA (MITRA OPD)	KATEGORI USULAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI BAPPEDA	STATUS	
R5621da08d56a0d	01-03-2022	MUKHTAR BADEWING, S.PI., MM	PAN	Kesehatan	Pemeliharaan fasilitas layanan kesehatan	pekerjaan anti rayap	RSUD Sayang Rakyat Makassar, Kota Makassar	Biringkaneva	Bulurokeng	4000 titik	DINAS KESEHATAN	RSUD SAYANG RAKYAT	Rekomendasi : Membutuhkan adanya Pemeliharaan Fasilitas layanan kesehatan Koefisien : 4000 titik lubang/injeksi Anggaran : 0	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 4000 titik lubang/injeksi Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER		Rekomendasi : Diterima	Rekomendasi : Diterima	Diteruskan ke Forum SKPD
R5622063ba7ce56	03-03-2022	RUDY PIETER GONI, SE, MM	PDI-P	Kesehatan	Peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat bidang kesehatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Sosialisasi Pentingnya Donor Darah di Kecamatan Makassar	Kecamatan Makassar, Kota Makassar	Makassar	Seluruh Kelurahan/ Desa	14 Paket	DINAS KESEHATAN	UPT TRANSFUSI DARAH	Rekomendasi : Membutuhkan adanya peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat bidang kesehatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 14 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Akan disesuaikan dengan kemampuan daerah Koefisien : 14 Paket Anggaran : 2000000	Rekomendasi : Akan disesuaikan dengan kemampuan daerah Koefisien : 14 Paket Anggaran : 2000000	Usulan disetujui	
R562206bb7202d8	03-03-2022	RUDY PIETER GONI, SE, MM	PDI-P	Kesehatan	Peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat bidang kesehatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Sosialisasi Pentingnya Donor Darah di Kecamatan Ujung Pandang	Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar	Ujung Pandang	Seluruh Kelurahan/ Desa	10 paket	DINAS KESEHATAN	UPT TRANSFUSI DARAH	Rekomendasi : Membutuhkan adanya peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat bidang kesehatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 10 paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Diterima disesuaikan dengan pagu yang tersedia Koefisien : 10 paket Anggaran : 40000000	Rekomendasi : Diterima disesuaikan dengan pagu yang tersedia Koefisien : 10 paket Anggaran : 40000000	Usulan disetujui	
R562206e16141d1	03-03-2022	RUDY PIETER GONI, SE, MM	PDI-P	Kesehatan	Peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat bidang kesehatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Sosialisasi Pentingnya Donor Darah di Kota Makassar	Kota Makassar, Kota Makassar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	112 Paket	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Rekomendasi : Membutuhkan adanya peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat bidang kesehatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 11 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : akan dikoordinasikan dengan UPT Unit Transfusi Darah untuk ditindaklanjuti Koefisien : 4 Paket Anggaran : 100000000	Rekomendasi : akan dikoordinasikan dengan UPT Unit Transfusi Darah untuk ditindaklanjuti Koefisien : 4 Paket Anggaran : 100000000	Usulan disetujui	
R562206ea32283b	03-03-2022	RUDY PIETER GONI, SE, MM	PDI-P	Kesehatan	Peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat bidang kesehatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pelayan Kesehatan Transfusi Darah	Kota Makassar, Kota Makassar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	10 Paket	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Rekomendasi : Membutuhkan adanya peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat bidang kesehatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 10 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : akan dikoordinasikan ke UPT Unit Transfusi Darah untuk ditindaklanjuti karena dokumen penganggarnya tidak melekat di Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Koefisien : 1 Paket Anggaran : 30000000	Rekomendasi : akan dikoordinasikan ke UPT Unit Transfusi Darah untuk ditindaklanjuti karena dokumen penganggarnya tidak melekat di Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Koefisien : 1 Paket Anggaran : 30000000	Usulan disetujui	
R56220703164334	03-03-2022	RUDY PIETER GONI, SE, MM	PDI-P	Kesehatan	Peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat bidang kesehatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penguatan Komitmen dan Jejaring Donor Darah	Kota Makassar, Kota Makassar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	10 Paket	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Rekomendasi : Membutuhkan adanya peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat bidang kesehatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 12 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : akan dikoordinasikan ke UPT Unit Transfusi Darah untuk ditindaklanjuti karena dokumen penganggarnya tidak melekat di Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Koefisien : 1 Paket Anggaran : 30000000	Rekomendasi : akan dikoordinasikan ke UPT Unit Transfusi Darah untuk ditindaklanjuti karena dokumen penganggarnya tidak melekat di Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Koefisien : 1 Paket Anggaran : 30000000	Usulan disetujui	
R5622070d20a56	03-03-2022	RUDY PIETER GONI, SE, MM	PDI-P	Kesehatan	Peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat bidang kesehatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Souvenir Promosi Kesehatan Bagi Pendonor dan Mitra Jejaring Donor Darah	Kota Makassar, Kota Makassar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/ Desa	10 Paket	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Rekomendasi : Membutuhkan adanya peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat bidang kesehatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 8 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : akan dikoordinasikan ke UPT Unit Transfusi Darah untuk ditindaklanjuti karena dokumen penganggarnya tidak melekat di Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Koefisien : 1 Paket Anggaran : 30000000	Rekomendasi : akan dikoordinasikan ke UPT Unit Transfusi Darah untuk ditindaklanjuti karena dokumen penganggarnya tidak melekat di Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Koefisien : 1 Paket Anggaran : 30000000	Usulan disetujui	
R562284aa85a6bd	09-03-2022	RUDY PIETER GONI, SE, MM	PDI-P	Kesehatan	Peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat bidang kesehatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Sosialisasi Pentingnya Donor Darah di Kecamatan Ujung Tanah	Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar	Ujung Tanah	Seluruh Kelurahan/ Desa	9 Paket	DINAS KESEHATAN	UPT TRANSFUSI DARAH	Rekomendasi : Membutuhkan adanya peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat bidang kesehatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Koefisien : 9 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 9 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : usulan diterima dengan menyesuaikan pagu yang ada Koefisien : 9 Paket Anggaran : 36000000	Rekomendasi : usulan diterima dengan menyesuaikan pagu yang ada Koefisien : 9 Paket Anggaran : 36000000	Usulan disetujui	
R562284c05288db	09-03-2022	RUDY PIETER GONI, SE, MM	PDI-P	Kesehatan	Peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat bidang kesehatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Sosialisasi Pentingnya Donor Darah di Kecamatan Tamalate	Kecamatan Tamalate, Kota Makassar	Tamalate	Seluruh Kelurahan/ Desa	11 Paket	DINAS KESEHATAN	UPT TRANSFUSI DARAH	Rekomendasi : Membutuhkan adanya peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat bidang kesehatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Koefisien : 11 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : disesuaikan dengan pagu dan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 11 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : usulan diterima dengan menyesuaikan pagu yang ada Koefisien : 11 Paket Anggaran : 44000000	Rekomendasi : usulan diterima dengan menyesuaikan pagu yang ada Koefisien : 11 Paket Anggaran : 44000000	Usulan disetujui	